



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO
(Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro
pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar
Kabupaten Bogor – Jawa Barat)**

TESIS

**M. SYAFAR SUPARDJAN
0906655692**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO
(Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro
pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar
Kabupaten Bogor – Jawa Barat)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial**

**M. SYAFAR SUPARDJAN
0906655692**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Berkas Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : M. Syafar Supardjan

NPM : 0906655692

Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

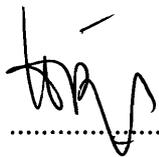
Tesis ini diajukan oleh

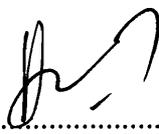
Nama : M. Syafar Supardjan
NPM : 0906655692
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : Pemberdayaan Masyarakat Pada Program
Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan
Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi
Baytul Ikhtiar, Kabupaten Bogor – Jawa Barat)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Dewan Penguji

Pembimbing : Arif Wibowo S.Sos., S.Hum., M.Hum 

Penguji : Triyanti Anugrahini, S.Sos, M.Si 

Penguji : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D 

Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si 

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 25 Juni 2012

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan *Alhamdulillah*, berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Penulis sepenuhnya menyadari tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk mewujudkan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Almarhum Prof. Dr. Ir. Sajogyo (wafat : 17 Maret 2012) yang telah memotivasi penulis melanjutkan kuliah pada program studi ini sebagai wujud bertambahnya pemahaman istilah “... *dari teori ke praktek menuju praktek yang berteori...*” Segala jasa, gagasan, dan jejak keteladananmu akan selalu dikenang dan dilanjutkan oleh generasi penerusmu;
2. Almarhum Suwantji Sisworahardjo, SH., MDS (wafat : 6 April 2012) yang telah membimbing penulis mulai dari masa praktikum sampai kajian literatur, gagasan dan cakrawala keilmuanmu hingga kritik yang penulis peroleh menjadi motivasi berharga dan telah tercatat dalam karya kecil ini;
3. Arif Wibowo S.Sos., S.Hum., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dari awal sampai akhir;
4. Fentiny Nugroho, MA, Ph.D, Triyanti Anugrahini, S.Sos, M.Si dan Ibu Dra. Fitriyah, M.Si yang telah bersedia menjadi penguji dan pengoreksi sehingga tesis ini menjadi lebih sistematis dan mudah dibaca;
5. Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS, Ir. Yoyoh Indaryanti, M.Si, Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt, M.Si, Dyah Ita Mardiyansih, SP, M.Si dan seluruh pegawai PSP3 IPB serta rekan-rekan di Bogor yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

6. Bapak-bapak pengurus Yayasan Peramu dan Koperasi BAIK : Mulyadi Hasan, M. Asadullah, Azis M. Abduh, Latief Effendy, Taufil Ilmawan, M. Syukur, serta rekan-rekan lainnya yang telah banyak membantu penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Para staf pengajar, tenaga administrasi, mahasiswa magister angkatan 2010 Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang telah banyak memberikan saran, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Kedua orang tuaku: Djliteng Tjipto Supardjan dan Kafiya, serta kedua mertuaku : Prasetyo Budi Utomo dan Suprpti yang telah melumuri penulis dengan semangat dan doa-doa mustajabnya sepanjang siang dan malam;
9. Istriku tercinta Prasthy Widhyasmara Putri, S.PdI dan permataku Muhammad Syathir ar-Rasyid yang lahir pada masa-masa menyelesaikan tesis ini (19 April 2012) : *Tidak ada kata demi kata yang kutuliskan dalam tesis selain karena motivasi dan senyum kalian, serta masa depan kita semua;*
10. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis berharap semoga Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak di atas dengan balasan yang jauh lebih baik. Akhir kata, “tak ada gading yang tak retak,” dengan segenap ketulusan penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam tesis ini. Tidak ada harapan yang lebih tinggi dari penulis kecuali bahwa tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu kesejahteraan sosial.

Bogor, 25 Juni 2012

(M. Syafar Supardjan)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Syafar Supardjan
NPM : 0906655692
Program Studi : Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar, Kabupaten Bogor – Jawa Barat)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 25 Juni 2012

Yang menyatakan,



(M. Syafar Supardjan)

ABSTRAK

Nama : M. Syafar Supardjan
NPM : 0906655692
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar, Kabupaten Bogor – Jawa Barat)

Tesis ini membahas proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi BAIK Program Pembiayaan Mikro khusus Ibu Rumah Tangga miskin pedesaan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif-Analitik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK sejalan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor namun belum sepenuhnya dipahami sebagai proses dalam konteks teoritiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat, yaitu : a) Faktor penghambat : Penyaluran pembiayaan usaha produktif belum maksimal sehingga menambah beban hutang anggota yang mengakibatkan tingkat keaktifan anggota menurun; b). Faktor pendukung : Partisipasi anggota relatif tinggi untuk diberdayakan.

Kata Kunci:

Pemberdayaan masyarakat, koperasi, pembiayaan mikro

ABSTRACT

Nama : M. Syafar Supardjan
NPM : 0906655692
Program Studi : Social Welfare
Judul Tesis : Community Empowerment on Microfinance Programs
(Case Study on the Implementation of Microfinance
Programs on Koperasi Baytul Ikhtiar Members, Bogor
Regency - West Java – Indonesia)

The focus this study is the process of community empowerment conducted by Koperasi BAIK on Microfinance Program, specifically Housewife poor in rural Bogor Regency. This research is qualitative descriptive-analytic. The data were collected by means of deep interview. The study concluded that implementation of microfinance program in line with government policy but has not been fully understood as a process in theoretical context. Factors that influence the process : a) Blockage Factors: Distribution of financing productive enterprises is not yet maximized and increase the debt burden of the members; b). Supporting factors: Participation of the members could be empowered.

Keyword:

Community development, cooperative, microfinance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	11
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.4.1. Manfaat Akademis	14
1.4.2. Manfaat Praktis	14
1.5. Metode Penelitian	15
1.5.1. Pendekatan Penelitian	15
1.5.2. Jenis Penelitian.....	16
1.5.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
1.5.4. Teknik Pemilihan Informan	18
1.5.5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.5.6. Teknik Analisis Data.....	23
1.5.7. Teknik Meningkatkan Kualitas Penelitian	24
1.6. Keterbatasan Penelitian	26
1.7. Sistematika Penulisan	26
2. KOPERASI, PEMBIAYAAN MIKRO DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	28
2.1. Kemiskinan	28
2.2. Kebijakan Sosial	31
2.3. Konsep Koperasi	32
2.4. Pembiayaan Mikro	35
2.5. Pembangunan Berpusat pada Manusia (<i>People-Centred Development</i>)	40
2.6. Pemberdayaan Masyarakat	42
2.6.1. Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat.....	43
2.6.2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	46
2.6.3. Peran Community Worker (Tenaga Pendamping)	49
2.9 Faktor Penghambat dan Pendukung Program	53

3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOGOR, KEBIJAKAN KOPERASI DAN PEMBIAYAAN MIKRO, PROFIL DAN ANGGOTA KOPERASI BAIK.....	61
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Bogor	61
3.1.1. Kondisi Letak dan Batas Administratif	61
3.1.2. Kondisi Penduduk & Tenaga Kerja.....	62
3.1.3. Kondisi Perekonomian	64
3.2. Kebijakan Pemerintah terhadap Koperasi dan Pembiayaan Mikro	66
3.3. Profil Koperasi BAIK	73
3.4. Profil Anggota Koperasi BAIK	87
4. TEMUAN LAPANGAN.....	92
4.1. Proses Pemberdayaan pada Program Pembiayaan Mikro	92
4.1.1. Perekrutan Tenaga Pendamping	93
4.1.2. Tahapan Pelaksanaan Program	102
4.2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program Pembiayaan Mikro	128
4.2.1. Faktor Pendukung	129
4.2.1. Faktor Penghambat	133
5. ANALISIS TEMUAN LAPANGAN.....	139
5.1. Analisis Proses Pemberdayaan pada Program Pembiayaan Mikro	139
5.1.1. Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Pembiayaan Mikro	140
5.1.2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	145
5.2. Analisis Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program Pembiayaan Mikro	157
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	166
6.1. Kesimpulan.....	166
6.2. Saran.....	168
DAFTAR REFERENSI	170

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Kurun Waktu 30 Tahun Terakhir)	3
Tabel 1.2.	Program Peningkatan Kapasitas Sosial Ekonomi (Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir)	4
Tabel 1.3.	Sektor Usaha Anggota yang Memperoleh Pembiayaan	12
Tabel 1.4.	Perkembangan Jumlah Keluar-Masuk Anggota (Desember 2010)	13
Tabel 1.5.	Distribusi Waktu Penelitian.....	18
Tabel 1.6.	Informan yang Diwawancarai di Lapangan	20
Tabel 3.1.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk Kabupaten Bogor	63
Tabel 3.2.	Sumber Penghasilan Pertanian Penduduk Kabupaten Bogor...	64
Tabel 3.3.	Matriks Kebijakan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Koperasi dan Pembiayaan Mikro	68
Tabel 3.4.	Matriks Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	72
Tabel 3.5.	Skema jumlah tabungan wajib yang harus disetorkan	83
Tabel 3.6.	Skema jumlah tabungan kelompok yang harus disetorkan	83
Tabel 3.7.	Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi BAIK	86
Tabel 3.8.	Jumlah Penyaluran Pembiayaan Anggota Koperasi BAIK	87
Tabel 3.9.	Sektor Usaha Anggota yang Memperoleh Pembiayaan	87
Tabel 3.10.	Tingkat Pendidikan Istri (anggota) dan Suami.....	88
Tabel 3.11.	Jenis Pekerjaan Istri (Anggota) dan Suami	91
Tabel 4.1.	Jenis dan Jumlah Sarana Pendidikan Desa Sukaluyu (2011)...	105

Tabel. 4.2.	Jenis, Keberadaan, Jumlah, Jarak, dan Kemudahan Akses Sarana Kesehatan di Desa Sukaluyu (2011)	105
Tabel. 4.3.	Jenis&Jumlah Sarana Perekonomian Desa Sukaluyu (2011)...	106
Tabel. 4.4	Pendapatan Suami Perbulan	111
Tabel 4.5.	Pendapatan Isteri Perbulan	111
Tabel 4.6.	Skema Jumlah Tabungan Wajib yang harus Disetorkan	121
Tabel 4.7.	Skema Jumlah Tabungan Kelompok yang harus Disetorkan ..	122
Tabel 4.8.	Nominal Perkembangan Tingkat Kelancaran Angsuran	132
Tabel 4.9.	Pengguliran Pembiayaan terhadap Jenis Usaha Anggota Tahun 2011	134
Tabel 5.1.	Matriks Keterlibatan Pelaku dalam Tahapan Program	146
Tabel 5.2.	Matriks Keterkaitan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat (Teoritik dan Empirik)	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Persentase Alasan Anggota Keluar dari Koperasi	13
Gambar 2.1.	Kerangka Pemberdayaan (Narayan, 2002)	46
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi Koperasi BAIK	77
Gambar 3.2.	Jumlah Anggota Koperasi BAIK	86
Gambar 3.3.	Anggota yang Bekerja sebagai Buruh Sayuran di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor	90
Gambar 4.1.	Alur Proses Perekrutan Tenaga Pendamping	95
Gambar 4.2.	Pendamping (kiri) Mengucapkan Terima Kasih kepada Pemateri (kanan) dalam Acara Pelatihan bagi para TPL	96
Gambar 4.3.	Pendamping Bersama dengan Masyarakat dalam Proses Pengkajian Wilayah	108
Gambar 4.4.	Proses Pelaksanaan UK yang dilakukan oleh Pendamping kepada Calon Anggota Koperasi	112
Gambar 4.5.	Pendamping sedang Memfasilitasi Proses LWK Calon Anggota di Kecamatan Cijeruk	115
Gambar 4.6.	Proses Pelayanan Simpan-Pinjam pada Kelompok Di Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.....	120
Gambar 4.7.	Pengurus sedang Memfasilitasi Pelatihan bagi Anggota.....	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	176
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	179



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan prioritas pembangunan nasional, sebab kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, dimana kemiskinan tidak terbatas pada ketidakmampuan secara ekonomi, melainkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar warga negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu indikator tercapainya pembangunan Indonesia 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, yaitu tercapainya pembangunan sosial ekonomi yang berkesinambungan, ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Salah satu pencapaian misi pembangunan nasional dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional yaitu pembangunan bidang sosial ekonomi yang menjelaskan bahwa pembangunan sosial ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu :

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;
3. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

Untuk merealisasikan sasaran pertumbuhan sosial ekonomi nasional dalam konteks era otonomi daerah, pemerintah daerah berupaya menyusun rencana pembangunan masing-masing daerah mengacu pada rencana pembangunan nasional tersebut disesuaikan dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Bentuk Rencana pembangunan daerah tersebut antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Daerah. Rencana pembangunan daerah diturunkan dalam bentuk kebijakan daerah sebagai implementasi mencapai tujuan pembangunan.

Kebijakan di atas sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang diturunkan dalam bentuk program sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam 20 tahun terakhir, program nasional seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan bentuk upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Data Pusat Statistik (2011) Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 %), turun 0,13 juta orang (0,13 %) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 %) (h. 2).

Mengacu pada runutan garis kemiskinan nasional yang dilaporkan oleh Bappenas (2007) menunjukkan kecenderungan menurun selama 30 tahun terakhir, tingkat kemiskinan atau proporsi jumlah orang miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 1990 tercatat 15,10 persen, yang terus meningkat menjadi 17,75 persen pada tahun 2006 (h. 12). Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi ini sangat membutuhkan perhatian besar dari negara dalam rangka mengurangi dan mengentaskan jumlah penduduk yang berada pada garis kemiskinan maupun di bawah garis kemiskinan (Tabel 1.1)

**Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia
(Kurun Waktu 30 Tahun Terakhir)**

Penduduk Miskin		Keterangan
Tahun	Jumlah	
1976	40,1 persen	Turun
1987	17,4 persen	Turun
1996	11,3 persen	Turun
1998	24,2 persen	Naik karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998
2005	15,97 persen	Turun
2006	17,75 persen	Kenaikan harga bahan bakar minyak dalam negeri,
2007	16,58 persen	Turun

Sumber : Telah diolah kembali (Bappenas, 2007)

Pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin mencapai 40,1 persen, kemudian turun menjadi 17,4 persen pada tahun 1987, dan terus menurun menjadi 11,3 persen pada tahun 1996. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 mengakibatkan persentase penduduk miskin melonjak kembali menjadi 24,2 persen pada tahun 1998. Pemulihan ekonomi dalam lima tahun terakhir berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Akan tetapi pada tahun 2006 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 17,75 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya angka inflasi karena Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dalam negeri, diikuti dengan meningkatnya harga beras selama kurun waktu tersebut. Naiknya harga bahan bakar minyak dalam negeri dilakukan demi menyehatkan perekonomian nasional, seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia. Di lain pihak, sebagai dampak positif dari beberapa program pembangunan dan membaiknya perekonomian, tingkat kemiskinan pada tahun 2007 turun menjadi 16,58 persen, dengan populasi penduduk miskin tercatat sekitar 37,17 juta jiwa.

Usaha pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang berkecukupan. Semuanya diupayakan bekerja keras dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada dan diikuti dengan peningkatan mutu kualitas masyarakat tersebut. Sekarang, usaha mengentaskan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung.

Pendekatan langsung untuk mengurangi kemiskinan penduduk secara langsung dapat dilakukan melalui program pangan seperti beras untuk orang miskin (raskin), subsidi, asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin), penciptaan lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Sementara itu, untuk program tidak langsung dapat dilakukan dengan penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pengembangan berbagai jenis pembiayaan mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku usaha yang mengedepankan aspek kooperatif bukan kompetitif dalam wadah koperasi. Beberapa program peningkatan kapasitas sosial ekonomi melalui penyaluran pembiayaan mikro selama 3 (tiga) tahun terakhir yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sosial Ekonomi Indonesia (Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir)

No	Program Peningkatan kapasitas Sosial-Ekonomi	Keberadaan		Sumber Dana			
		Ada	Tidak Ada	PPNM	Non PNPMP	PNPM & Non PNPM	Lainnya
1	Dana bergulir/simpan pinjam untuk modal usaha pertanian	32.47%	67.53%	15.26%	13.27%	3.94%	67.53%
2	Dana bergulir/simpan pinjam untuk modal usaha nonpertanian	49.56%	50.44%	35.88%	7.23%	6.46%	50.44%
3	Dana hibah untuk usaha produktif (budidaya dan nonbudidaya)	8.53%	91.47%	1.83%	5.76%	0.94%	91.47%

Sumber : Telah diolah kembali (BPS, 2011)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitas sosial ekonominya melalui peningkatan usaha produktif dalam program pengembangan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keberadaan program tersebut yang dilaksanakan di pedesaan dan kelurahan seluruh Indonesia yaitu : Dana Bergulir/Simpan Pinjam Modal Usaha Pertanian, Dana Bergulir/Simpan Pinjam Modal Usaha non-Pertanian, Dana Hibah untuk Usaha Produktif yang masing-masing mencapai 32.47%, 49.56%, 8.53%. Sumber pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut berasal dari PNPMP dan Non-PNPMP serta beberapa alokasi pendanaan lainnya untuk mendukung program tersebut.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor usaha produktif di Indonesia yang mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Jika ditelusuri ke belakang, pada tahun 1997, saat krisis ekonomi melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia, UKM mampu bertahan karena modal yang dimiliki tidak tergantung pada pemerintah. Disamping itu, produk atau barang yang ditawarkan adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari, dimana setiap orang membutuhkannya. Masyarakat miskin bisa membuka usaha di bidang UKM. Artinya, dengan modal yang tidak terlalu banyak, uang tersebut dapat dikelola untuk membeli beberapa macam kebutuhan sehari-hari, dimana semua rumah tangga membutuhkannya. Kreativitas yang dimiliki para pengusaha kecil tidak berhenti sampai di sini saja. Mereka bisa mengembangkan usaha dengan membuka kios-kios kecil yang memiliki pelanggan tetap dan pada akhirnya mampu menciptakan lapangan kerja bagi keluarganya dan masyarakat sekitar.

Kendala utama bagi masyarakat miskin untuk membuka usaha adalah akses terhadap permodalan. Mengingat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan. Disinilah peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dituntut untuk lebih peka. Pemerintah telah menyalurkan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan melalui Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), IDT, dan sebagainya. Masyarakat paling miskin dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi. Kemudian, dunia usaha juga melakukan terobosan-terobosan pemberdayaan melalui *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang lebih populer dengan *akronim* CSR, dimana perusahaan menganggarkan sebagian dari keuntungan yang didapatnya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga, unsur dari masyarakat yang peka terhadap pengentasan kemiskinan juga melakukan upaya membantu masyarakat untuk memperoleh akses terhadap permodalan, baik dalam wadah kelembagaan ekonomi yang dibentuk atas swadaya masyarakat (misal : Koperasi) maupun lembaga sosial lain yang fokus dalam pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin sebagai kelompok sasarannya.

Penyaluran pembiayaan sejumlah dana atau modal yang khusus diperuntukkan bagi pengembangan usaha orang miskin atau mereka yang berpendapatan rendah dikenal dengan istilah pembiayaan mikro (Microfinance). Orang miskin tidak memiliki akses terhadap bank-bank konvensional, karena mereka dianggap tidak memiliki kredibilitas dalam mengajukan pembiayaan modal usaha. Hal inilah yang melatar-belakangi Muhammad Yunus, seorang Ekonom dari Universitas Chittagong – Bangladesh mendirikan *Grameen Bank* yang menawarkan sedikit pinjaman kepada masyarakat miskin untuk membangun usaha mandiri yang dikenal dengan istilah Bank Kaum Miskin. Pinjaman ini menjadi titik awal bagi industri rumah tangga dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan pendapatan yang memanfaatkan keterampilan yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Yunus, 2007 : 1).

Pembiayaan mikro merupakan cara efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Menanggulangi kemiskinan berarti berupaya membuat penduduk tidak miskin dan membendung jumlah penduduk miskin agar tidak semakin bertambah banyak. Caranya, dengan memberdayakan mereka melalui program pembiayaan mikro. Memberdayakan disini bermakna membangun kesadaran penduduk miskin melalui pembiayaan mikro agar timbul keinginan berusaha secara swadaya di bidang ekonomi secara berkelanjutan.

Program pembiayaan mikro diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan yang berada pada garis kemiskinan, namun perempuan lebih diutamakan karena memiliki karakter dan sifat-sifat yang hemat, teliti dan cermat dalam penggunaan uang. Perempuan tidak hanya dapat mengajukan modal usaha saja, tetapi juga memperoleh pelatihan keuangan untuk bisa mengelola sejumlah dana yang didapat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menabung, asuransi pendidikan, kesehatan, dan lain lain. Selain itu, perempuan juga merupakan kelompok yang sangat strategis dalam konteks pengembangan pembiayaan mikro dan kecil. Dari sekitar 40 juta pengusaha skala mikro dan kecil di Indonesia pada 2006, diperkirakan sebanyak 60% diantaranya digerakkan oleh kaum perempuan (Muharram, 2008 : 1). Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung perekonomian nasional salah satunya sangat tergantung pada kaum perempuan.

Oleh karenanya, upaya mengentaskan kemiskinan dimulai dengan mengidentifikasi potensi dan memberdayakan usaha produktif perempuan miskin.

Pengelolaan pembiayaan mikro memberikan kontribusi dalam menimbulkan kesadaran perempuan untuk melakukan keswadayaan secara berkelanjutan. Menurut Stoler (1977) “Pada rumah tangga yang berpendapatan rendah (wanita mempunyai penghasilan dari perdagangan, kerajinan dan buruh tani) memberi kontribusi sepertiga atau lebih *income* rumah tangga” (Muharram, 2008 : 8). Sedangkan Riza (2008) mengatakan bahwa, “Hasil kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan istri, dengan modal Rp 500.000,- mendapat untung bersih sebesar Rp 150.000,- (kira-kira 30%). (h. 229)

Dalam proses pemberdayaan perempuan terkandung usaha-usaha untuk mencerdaskan perempuan. Sebab proses pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan dengan membantu dan menolong orang untuk memahami potensi yang mereka miliki agar mereka dapat hidup dengan lebih baik dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Di dalam proses tersebut, masyarakat tidak serta merta memetakan sendiri potensi mereka, tetapi dibantu oleh orang lain agar mereka dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kebutuhannya dan memenuhi hak-haknya dengan melakukan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga pada akhirnya mereka dapat menentukan sendiri dan memutuskan nasib dan kehidupannya agar dapat hidup menuju kesejahteraan sosial yang lebih baik. Hal ini membutuhkan pendampingan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat luas termasuk kelembagaan sosial untuk membantu masyarakat dari jeratan kemiskinan.

Salah satu upaya dari pemerintah yang berhasil mengembangkan Koperasi dan UKM (KUKM) yaitu Pemerintah Kabupaten Bogor. Data Kementerian KUKM RI (2011) mencatat bahwa dari total koperasi seluruh Indonesia sebanyak 188.181 unit, jumlah terbesar ada di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (12.27%, 13.55%, 15.29%), namun penghargaan khusus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas dasar kebijakan daerahnya terhadap pengembangan koperasi dianggap berhasil dalam memberdayakan koperasi dengan jumlah koperasi aktif tertinggi di Jawa Barat, dimana pada tahun 2009

hingga 2011 koperasi yang aktif di Kabupaten Bogor tercatat 889, 943, dan 1012 unit koperasi. Jumlah koperasi yang cukup signifikan di Kabupaten Bogor berimbas pada peningkatan volume usaha masyarakat dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang cukup besar serta berdampak bagi peningkatan ekonomi daerah. Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengembangkan koperasi dianggap telah berhasil membina koperasi dan UKM di wilayah Kabupaten Bogor. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan penganugerahan Bhakti Koperasi tahun 2011 dari Kementerian KUKM RI yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. (Kementerian KUKM RI, 2011)

Prestasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pemberdayaan perkoperasian dan UKM secara serius dan berkesinambungan. Melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) Kabupaten Bogor, koperasi di wilayahnya mampu berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas dalam mencapai laju optimalisasi perkembangan perkoperasian dan berdampak bagi penguatan ekonomi masyarakat lokal. Salah satu koperasi yang sejalan dengan kebijakan Pemkab. Bogor yaitu Koperasi *Baytul Ikhtiar* (BAIK). Berbeda dengan koperasi lainnya, koperasi ini mengalami kemajuan yang cukup pesat dari sisi kuantitas keanggotaan dan permodalan mencapai 6.888 anggota dengan total nilai aset sebesar Rp. 6,1 Milyar, serta kegiatannya difokuskan pada peningkatan usaha ekonomi rumah tangga di pedesaan melalui model pemberdayaan masyarakat. Koperasi ini muncul sebagai dampak keberlanjutan program yang sebelumnya diprakarsai oleh Yayasan Peramu di Bogor.

Yayasan Peramu merupakan salah satu lembaga yang fokus pada kegiatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bogor. Lembaga yang didirikan pada tahun 1993 ini kegiatan utamanya adalah penguatan kapasitas sosial ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi mikro pada masyarakat desa. Kelompok sasarannya adalah pengusaha kecil, buruh industri, petani kecil, buruh tani, dan pedagang kecil. Pelaksanaan program dilakukan melalui pendampingan pada kelompok-kelompok kecil sebagai basis pengembangannya, pola pendampingan dijadikan

instrumen dalam penguatan di tingkat kelompok. Peran tenaga pendamping yang membantu kelompok sasaran mempengaruhi keberhasilan program agar tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Sejak tahun 1994 Peramu mulai merumuskan perlunya pembentukan lembaga yang mampu menjadi penghubung antara masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan modal usaha dengan orang-orang yang memiliki kelebihan materi (kaya) untuk membantu antar sesama anggota. Lembaga ini dikelola pada skala ekonomi yang layak agar berkelanjutan dan memiliki prosedur standar tetapi mudah diakses oleh masyarakat miskin. Yayasan Peramu menetapkan Lembaga Koperasi *Baytul Maal wa At-Tamwil* (K-BMT). Kata BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT merupakan lembaga keuangan syariah nonbank, dengan bentuk kelembagaan informal (dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat) maupun formal dengan bentuk hukum koperasi, dan mudah menjangkau pengusaha kecil, sehingga terlepas dari kewajiban perbankan. Sebagai tindak lanjut keputusan tersebut, Yayasan Peramu kemudian memfasilitasi berdirinya 3 (tiga) BMT secara bertahap.

Pembentukan K-BMT yang difasilitasi oleh Yayasan Peramu sejak tahun 1994 hingga kini sebagai berikut : K-BMT *Wihdatul Ummah* (WU), K-BMT *Khidmatul Ummah* (KU), BMT *Tadbiirul Ummah* (TbU), dan Koperasi *Baytul Ikhtiar* (BAIK). Keempat Koperasi tersebut merupakan output dari program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembiayaan mikro sejalan dengan program kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor, yang hingga kini program pembiayaan mikro tersebut sudah memiliki badan hukum sendiri. Semua kelompok sasaran yang terlibat dalam program pemberdayaan, kini menjadi anggota Koperasi. Pengelolaan Koperasi sepenuhnya dikelola oleh anggota secara mandiri, dimana partisipasi aktif anggota menentukan keberhasilan dan kemajuan Koperasi. Keempat koperasi tersebut memiliki pelayanan yang sama kepada anggotanya, yaitu memberikan pelayanan simpan pinjam, namun berbeda

kelompok sasarannya. K-BMT WU, KU, dan TbU fokus pada pelayanan pelaku usaha menengah yang membutuhkan modal di atas Rp. 5 juta, anggotanya sebagian besar merupakan kelompok pengusaha ternak, pedagang, pertanian, industri kecil, dan sebagainya. Berbeda dengan Koperasi BAIK, pelayanan Koperasi ini fokus pada Ibu Rumah Tangga miskin, dimana perempuan sebagai kelompok sasaran yang memiliki skala usaha yang relatif kecil dengan modal Rp. 300.000 – Rp. 3.000.000,- yang memiliki usaha sebagai pedagang warung, sayur-sayuran, petani & buruh tani, serta buruh pabrik industri kecil (sepatu & sandal). Peran perempuan dalam mengatur keuangan keluarga miskin diupayakan mampu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mampu dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan keluarga sehingga tidak menimbulkan sifat boros. Pertemuan rutin anggota di tingkat kelompok selalu diadakan setiap minggu yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Lapangan (TPL), pertemuan tersebut sebagai wahana interaksi antar anggota dan TPL dengan agenda, yaitu : pelayanan keuangan (simpan-pinjam) dan tukar-pikir (sharing) fokus pada masalah yang dibahas dan perlu dicari solusinya secara bersama-sama.

Koperasi BAIK melibatkan berbagai pihak dalam membangun kemitraan dan jejaring kelembagaan, baik pemerintah, LSM, Swasta, dan Perguruan Tinggi. Koperasi BAIK memposisikan diri sebagai lembaga mitra dengan pemerintah yang dapat membantu program-program pemerintah yang belum menyentuh masyarakat miskin di pedesaan Kabupaten Bogor. Sebagai timbal-baliknya, pemerintah juga mengakses data-data masyarakat miskin yang dimiliki Koperasi sebagai bahan kebijakan dalam menyalurkan bantuan modal usaha kepada masyarakat, baik langsung maupun bermitra dengan Koperasi serta dilibatkan dalam penyusunan perencanaan program pemerintah kepada masyarakat miskin. Posisi LSM, Swasta, dan Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang berperan penting dalam membangun perubahan sosial, wahana belajar dalam meningkatkan wacana pemberdayaan melalui kegiatan riset dan pendampingan, serta upaya memperoleh akses permodalan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan Koperasi BAIK sebagai salah satu lembaga kesejahteraan sosial-ekonomi memiliki tujuan yang sejalan dengan pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan hak dasar masyarakat miskin melalui program pembiayaan mikro sebagai instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan, membantu masyarakat miskin bukan sekedar pada kegiatan santunan (*philantrophy*) melainkan melalui proses belajar bersama-sama untuk memperoleh kehidupan yang layak dan mandiri. Pemberdayaan ditujukan untuk menguatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat miskin melalui proses pendampingan yang melibatkan partisipasi dan interaksi kelompok sasaran dan tenaga pendamping, serta akses permodalan sebagai stimulan untuk membangun ekonomi keluarga. Pada akhirnya, pemberdayaan ini mampu meningkatkan penghasilan keluarga, pendidikan, dan memajukan usaha yang lebih produktif sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat.

1.2. Rumusan Permasalahan

Proses pemberdayaan masyarakat melalui program pembiayaan mikro yang dilaksanakan oleh Koperasi BAIK ditemukan beberapa pokok permasalahan, yaitu : *pertama*, pengguliran pembiayaan banyak diberikan kepada usaha non-produktif bagi peningkatan usaha ekonomi anggotanya; *kedua*, Tingkat keaktifan anggota menurun dalam proses pelaksanaan program karena lebih banyak pada persoalan tidak bisa membayar angsuran, sehingga membuat dirinya kurang aktif dalam pertemuan kelompok, bahkan tidak sedikit ada anggota yang memutuskan keluar dari dari kelompok.

Pengguliran pembiayaan yang disalurkan kepada anggota Koperasi BAIK belum banyak menyentuh pada usaha produktif. Dari total pembiayaan yang disalurkan per Desember 2010 yang nilainya mencapai Rp. 6.1 Milyar, tercatat jumlah penyaluran pembiayaan yang disalurkan untuk usaha produktif pada sektor Perdagangan, Pertanian, *Home Industry*, dan Jasa sebagai sektor yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi keluarga masih relatif kecil yang nilainya masing-masing 27.39%, 6.77%, 2.44%, 2.32%. Sedangkan pembiayaan untuk usaha non produktif paling tinggi disalurkan untuk sektor infrastruktur

(Bangunan Rumah) yang mencapai 33,51%, dan yang relatif kecil untuk sektor pendidikan, kesehatan, aset, dan lainnya yang masing-masing nilainya 15.86%, 4.49%, 6.24%, 0.99%. Seperti yang diperlihatkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.3. Sektor Usaha Anggota yang Memperoleh Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2010			
No	Sektor usaha	Nominal (Rp.)	Persentase
1.	Perdagangan	1,688,300,000	27.39%
2.	Pertanian	417,550,000	6.77%
3.	Home Industri	150,400,000	2.44%
4.	Jasa	142,850,000	2.32%
5.	Bangunan Rumah	2,065,450,000	33.51%
6.	Pendidikan	977,550,000	15.86%
7.	Kesehatan	276,950,000	4.49%
8.	Asset	384,450,000	6.24%
9.	Lain-lain	60,850,000	0.99%
	TOTAL	6,164,350,000	100%

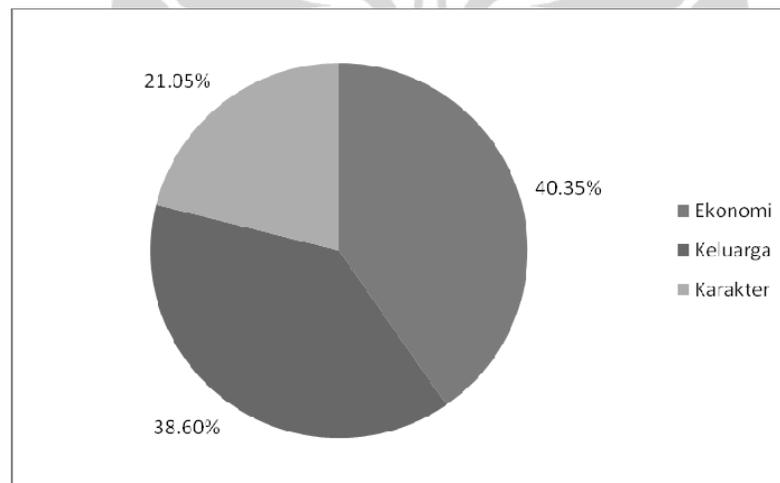
Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2010)

Penyaluran pembiayaan yang diperuntukkan pada usaha non-produktif berdampak pada rendahnya manfaat pembiayaan sebagai nilai tambah ekonomi keluarga. Pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumtif menimbulkan berbagai persoalan di tingkat kelompok, yaitu munculnya anggota yang tidak aktif dikarenakan karena alasan ekonomi, bahkan tidak sedikit ada anggota yang memutuskan keluar dari dari kelompok sehingga mengganggu kinerja sosial ekonomi kelompok. Dari data yang telah dihimpun per Desember tahun 2010 jumlah anggota yang keluar sebanyak 65 orang atau sekitar 1,31 persen dari jumlah total anggota yang diikuti oleh beberapa majelis yang bubar yang nilainya mencapai 3,9 persen dari total majelis yang aktif (Tabel 1.4). Alasan utama bagi anggota yang keluar dikarenakan alasan ekonomi, keluarga, dan karakter anggota tersebut. Alasan ekonomi dan keluarga mayoritas penyebab anggota keluar yang masing-masing nilainya 40 persen, 38 persen. Sedangkan 12 persen karena alasan karakter anggota, baik dikeluarkan atas dasar kesepakatan kelompok maupun atas inisiatif sendiri yang cenderung tidak memiliki rasa solidaritas, kebersamaan, dan kekeluargaan dalam berkoperasi. Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.4. Perkembangan Jumlah Keluar-Masuk Anggota (Desember 2010)

KECAMATAN	DESA	MAJELIS			ANGGOTA			
		JML	BUBAR	AKTIF	JML	MASUK	KELUAR	AKTIF
Ciomas	3	23	2	21	296	0	8	288
Ciampea	3	29	1	28	411	0	8	403
Cibungbulang	2	47	1	46	671	0	8	663
Rumpin	1	32	1	31	518	0	9	509
Rancabungur	2	20	0	20	327	0	1	326
Tamansari	6	140	8	132	1815	6	16	1805
Ciomas	1	15	1	14	198	0	2	196
Tenjolaya	1	38	0	38	540	0	9	531
Dramaga	2	15	0	15	181	0	4	177
TOTAL		359	14	345	4.957	6	65	4.898
PERSENTASE		100.00%	3.90%	96.10%	100.00%	0.12%	1.31%	98.81%

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2010)



Gambar 1.1. Persentase Alasan Anggota Keluar dari Koperasi

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2010)

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka usulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi BAIK dalam melaksanakan Program Pembiayaan Mikro di Kabupaten Bogor?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Koperasi BAIK dalam melaksanakan program Pembiayaan Mikro di Kabupaten Bogor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan dari usulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi BAIK dalam melaksanakan Program Pembiayaan Mikro di Kabupaten Bogor;
2. Menggambarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat Koperasi BAIK dalam melaksanakan program Pembiayaan Mikro di Kabupaten Bogor.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, pasti memberikan manfaat walaupun hanya sekedar berupa gambaran informasi mengenai topik tertentu, begitu pun juga dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis, seperti diuraikan berikut ini:

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menambah informasi dan pemahaman konsep tentang pengelolaan pembiayaan mikro sistem *Grameen Bank*, khususnya yang dikelola oleh Koperasi BAIK;
2. Menambah pemahaman tentang bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan mikro;
3. Menjadi bahan/acuan dan masukan bagi mereka yang tertarik untuk meneliti mengenai pengelolaan pembiayaan mikro.
4. Memperkaya kajian pembangunan sosial dan strategi mengurangi kemiskinan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan agar penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Masukan untuk proses pemberdayaan perempuan melalui pengelolaan pembiayaan mikro oleh Koperasi BAIK;

Universitas Indonesia

2. Masukan bagi penanggung jawab program Koperasi BAIK agar dapat mendorong pengelola program dan stafnya untuk lebih memperbaiki masyarakat miskin berpartisipasi di dalam mengelola program bersama.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha mempelajari dan mengamati bagaimana proses terbentuknya pemberdayaan perempuan melalui pengelolaan pembiayaan mikro yang dilakukan di desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor yang dikelola oleh Koperasi BAIK, sehingga menghasilkan input untuk pengembangan program pemberdayaan perempuan pada khususnya agar mereka menjadi lebih terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang akan meningkatkan kemampuan dan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan sosial.

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Arikunto (2002) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bisa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya (h. 10). Namun, penggunaan angka-angka bukannya mutlak tidak boleh, tetapi bisa digunakan untuk hal-hal tertentu seperti jumlah penduduk di suatu wilayah, banyaknya keuntungan yang didapat dari industri rumah tangga, dan lain-lain.

Arikunto (2002) membahas tentang kualitatif naturalistik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami dan peneliti terlibat secara langsung di lapangan (h. 11). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena, pertama, penelitian ini bersandar pada kekuatan naratif atau penjelasan verbal mengenai proses pemberdayaan perempuan serta faktor-faktor penghambat dan pendukung proses tersebut terhadap anggota di Koperasi BAIK. Kedua, peneliti berusaha melakukan penelitian apa adanya.

Artinya, unsur manipulasi sebisa mungkin dihindari dan fokus penelitian berupa perempuan miskin yang memiliki usaha yang tergabung dalam Koperasi BAIK dilihat dalam konteks alamiah. Ketiga, analisis induktif digunakan karena metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan pertanyaan yang diajukan sifatnya terbuka, dimana interview bebas menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pemaknaan yang dipahaminya. Ketiga alasan di atas diperkuat oleh Patton (1990) bahwa, strategi metode ideal yang khas dari kualitatif terdiri dari tiga bagian: (1) *Qualitative Data*, (2) *Naturalistic Inquiry*, dan (3) *Inductive Content Analysis or By The Case* (h. 105).

Pemberdayaan sebagai suatu proses perubahan perilaku yang sangat kompleks, sehingga tidak ada pembatasan pada produk akhir. Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mencari jawaban tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan pembiayaan mikro di Koperasi BAIK sehingga untuk memaknai kegiatan ini, meskipun dilaksanakan melalui wawancara dan mengamati secara mendalam latar alamiah agar memperoleh pemahaman emik menurut persepsi mereka mengenai pemahaman mereka terhadap pembiayaan mikro, tujuan, dan bagaimana memperoleh pembiayaan dari koperasi tersebut. Jadi, diharapkan data yang diperoleh nantinya akan selalu responsif terhadap konteks, dimana terdapat saling pengaruh antara peneliti dengan informan.

1.5.2. Jenis Penelitian

Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik yang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Menurut Sugiyono (2008) penelitian deskriptif-analitik didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (h. 105).

Definisi di atas menjelaskan bahwa jenis penelitian ini tidak dapat dilepaskan dan sangat terkait dengan proses penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada dalam kondisi

yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Mengutip penjelasan dari Neuman (2000) bahwa “*Descriptive research presents a picture of the specific details of the situation, social setting, or relationship*” (h. 21). (Penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran detail yang spesifik dari situasi, setting sosial, atau hubungan). Kemudian data dan informasi tersebut disusun, diolah serta dianalisa secara mendalam yang bertujuan memberikan gambaran lengkap mengenai gejala atau fenomena yang terjadi apa adanya. Jadi, proses yang dilakukan dalam jenis penelitian ini yaitu proses deskripsi dan analisa.

Dalam penelitian deskriptif-analitik, peneliti memulai suatu penelitian dengan subyek yang sudah terjadi sebelumnya (*ex post facto*) tanpa diintervensi ada intervensi dari peneliti, kemudian dilakukan penelitian untuk menguraikannya melalui analisa secara akurat dan mendalam. Alasan pemilihan jenis penelitian deskriptif-analitik karena hasilnya berupa gambaran yang detail tentang subyek penelitian atau proses pemberdayaan Koperasi BAIK pada program pembiayaan mikro serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut serta menguraikan pengaruhnya dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pengembangan Koperasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bukan hanya menguraikan fenomena atau masalahnya saja yang diteliti, tetapi diteliti lebih lanjut melalui analisa mendalam yang berhubungan dengan temuan-temuan yang terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro sehingga tujuan penelitian ini bukan sekedar untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang, namun berguna bagi kemajuan dan keberlanjutan program.

1.5.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Program pembiayaan mikro yang dikelola oleh Koperasi BAIK dimulai dari Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Jawa Barat, kemudian melakukan ekspansi ke desa-desa lain di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan terakhir Kabupaten Sukabumi.

Namun, penelitian tidak dilakukan di tiga (3) kabupaten di atas, tetapi memilih lokasi penelitian di kabupaten Bogor. Dengan alasan yang sudah cukup lama melaksanakan program tersebut dan telah berhasil dimana laporan jejak

Universitas Indonesia

rekam tingkat pengembalian pembiayaan oleh anggota sebesar 90%, artinya terdapat 10% kemacetan pengembalian dana pembiayaan oleh anggota. Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi penelitian merupakan wilayah program pertama kali dilaksanakan dan pada umumnya banyak usaha produktif di sektor industri kecil termasuk industri rumah tangga (usaha mikro, kecil dan menengah), seperti : industri sepatu, sandal, tas. Disamping itu, terdapat keterwakilan karakteristik para anggota yang beragam, yaitu : rajin, malas atau sering absen dalam kegiatan kelompok, dan menunggak cicilan mingguan.

Waktu penelitian ini berdasarkan dimensi waktu dapat dikategorikan sebagai *cross sectional*. Penelitian *cross-sectional* menurut Neuman (2003) adalah “*in cross-sectional research, researcher observe at one time*” (h. 31). Studi pendahuluan dilakukan di Kantor Koperasi BAIK, Komplek Pertanian Jl. Siaga No. 25 Rt 2 / Rw.10 Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat – Kota Bogor. Adapun rincian waktu penelitian diperlihatkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.5 Distribusi Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Tahun 2012		
		April	Mei	Juni
1	Studi Literatur			
2	Merumuskan Pertanyaan			
3	Membuat Rancangan			
4	Seminar Proposal			
5	<i>Preliminary Study</i>			
6	Mengumpulkan Data			
7	Menganalisis Data			
8	Menginterpretasi Data			
9	Penulisan Laporan			

1.5.4. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penentuan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan selektif. Informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif harus memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang akan diteliti sehingga peneliti dapat memahami mengenai fenomena yang terjadi berkaitan dengan objek penelitian. Neuman (2003) menjelaskan bahwa narasumber yang baik memiliki karakteristik (*The ideal informant has four characteristic*) sebagai berikut ini :

1. *The informant is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant;*
2. *The individual is currently involved in the field;*
3. *The person can spend time with the researcher, and*
4. *Non analytic individuals make better informants. A non analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*
(h. 394-395).

Artinya, seorang narasumber itu harus mengenal dengan baik kebudayaan dan merupakan saksi mata terhadap kejadian yang terjadi, narasumber merupakan pihak yang terlibat langsung di lapangan, narasumber tersebut dapat menghabiskan waktu bersama dengan peneliti, dan narasumber tidak bersifat analitis. Oleh karenanya, teknik pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling* untuk mendapatkan cakupan dan jarak data yang dicari demi mendapatkan realitas yang bermacam-macam, sehingga seluruh temuan akan berlandaskan secara lebih mantap karena prosesnya melibatkan kondisi dan situasi yang saling mempengaruhi di daerah pelaksanaan program pembiayaan mikro. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposif (*purposive sampling*), yakni menentukan sampel penelitian dengan cara memilih atau menunjuk secara sengaja untuk dijadikan informan. Informan yang dipilih karena mereka memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memiliki kapasitas serta informasi yang cukup dalam menjawab seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan.

Subjek penelitian yaitu anggota Koperasi BAIK yang homogen memudahkan peneliti dalam memilih informan yang berasal dari ketua kelompok dan anggota Koperasi BAIK. Subjek sengaja dipilih dengan beberapa kriteria bahwa; (1) dia telah memasuki pinjaman tahun kelima untuk ketua kelompok dan menjadi anggota lebih dari 1 tahun bagi anggota kelompok. Alasan pemilihan kriteria lamanya masa keanggotaan untuk ketua kelompok adalah karena untuk dapat meningkatkan usaha yang dijalankan sampai mampu mendekati kemandirian dan pinjaman yang dibutuhkan lebih besar lagi sampai mencapai

Rp. 3-5 juta minimal 5 tahun, sementara untuk anggota dipilih yang masa keanggotaannya lebih dari 1 tahun karena umumnya manfaat dan peningkatan pendapatan dapat dirasakan setelah 12 bulan sejak pinjaman pertama diajukan, (2) memiliki rekam jejak pengembalian dana pembiayaan yang baik, dalam artian tidak pernah menunggak cicilan dan selalu dibayar tepat waktu, dan (3) usaha produktif yang dijalankan terus meningkat sejak ia menjadi anggota Koperasi BAIK dalam hal kemajuan dan jenis usahanya.

Data dan informasi apa saja yang dibutuhkan dari informan akan digambarkan dengan ringkas dalam tabel berikut:

Tabel. 1.6 Informan yang Diwawancarai di Lapangan

No	Jenis Data yang Dibutuhkan	Informan	Jumlah (Orang)
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan pemerintah daerah terhadap perkembangan Koperasi di Kabupaten Bogor; ➤ Kebijakan pemerintah daerah terhadap program pembiayaan mikro; ➤ Bagaimana strategi pemerintah dalam mengembangkan Koperasi dan pembiayaan mikro. 	Ketua Bidang Koperasi Dinas KUKM Kab. Bogor	1
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Latar belakang Program Pembiayaan Mikro & didirikannya Koperasi BAIK; ➤ Visi, misi dan tujuan Koperasi BAIK; ➤ Struktur organisasi Koperasi BAIK ➤ Sosialisasi program; ➤ Sasaran program dan apa manfaat program bagi target; ➤ Pengaruh program terhadap pemberdayaan masyarakat; ➤ Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan; ➤ Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pemberdayaan. 	Pengurus Koperasi	3
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi program; ➤ Pengaruh program terhadap anggota; ➤ Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan selama kegiatan kelompok berlangsung dan kegiatan pendampingan seperti apa yang diberikan; ➤ Faktor pendukung serta penghambat proses pendampingan. 	Tenaga Pendamping Lapang (TPL)	8

(Lanjutan)			
4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Latar belakang menjadi Ketua Kelompok; ➤ Manfaat menjadi anggota; ➤ Manfaat terhadap usaha yang dijalankan; ➤ Peran ketua kelompok; ➤ Bagaimana proses kegiatan kelompok berlangsung; ➤ Bagaimana peran ketua kelompok; ➤ faktor pendukung dan penghambat selama ketua. 	Ketua Kelompok	2
5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Latar belakang menjadi anggota; ➤ Manfaat menjadi anggota; ➤ Manfaat terhadap usaha yang dijalankan; ➤ Peran kelompok dalam mengatasi konflik dan permasalahan; ➤ Bagaimana kegiatan kelompok dilakukan; ➤ Peran anggota; ➤ Faktor pendukung dan penghambat selama menjadi anggota. 	Anggota	3

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan karakteristik sumber data dan informasi, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi literatur, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah bahan-bahan tertulis baik berupa : beberapa buku yang terkait dengan topik penelitian, hasil penelitian, artikel di jurnal tercetak dan elektronik, dan sebagainya yang berasal dari pendapat para ahli maupun literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh kerangka konsep atau kerangka pemikiran penelitian ini. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa dokumen yang terkait dengan masalah penelitian akan sangat diperlukan, yaitu : dokumen pemerintah terkait pengembangan koperasi dan pembiayaan mikro, serta beberapa dokumen yang dimiliki oleh Koperasi BAIK selama proses pelaksanaan program pembiayaan mikro.

2. Wawancara, yaitu serangkaian pertanyaan yang diajukan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, yaitu melalui : **Wawancara Mendalam dan Wawancara Kelompok**. **Wawancara mendalam** merupakan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada sumber informasi guna memperoleh data dan informasi yang serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada sumber informasi guna memperoleh data dan informasi yang bersifat mendalam. Sedangkan **Wawancara Kelompok** merupakan proses wawancara yang berlangsung sekaligus menghadapi dua orang atau lebih yang diwawancarai, proses ini sangat berguna sebagai alat pengumpulan data yang sekaligus difungsikan sebagai *check cross check* guna memperoleh data dan informasi yang luas dan lengkap tentang hubungan sosial dan aksi reaksi pribadi dalam hubungan sosial. Wawancara yang digunakan disini adalah wawancara semi terstruktur karena dalam riset kualitatif sering dipakai sebagai metode pokok dengan maksud untuk menggali jawaban, pedoman pertanyaan digunakan pada saat proses penggalan informasi dilakukan. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terbuka dengan maksud agar *interview* dapat dengan bebas memahami dan memaknai setiap pertanyaan yang diajukan dan menjawab sesuai dengan pemahamannya. Karena dalam wawancara sumber datanya adalah manusia, maka digunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Kosasih (1998) mengatakan bahwa wawancara informasi, pandangan, filosofi informasi, tentang hal-hal yang dipelajari informan. (h. 18) Dengan demikian wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan data atau keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap, berhadapan muka di lokasi penelitian. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Neuman (2006) mengenai pelaksanaan wawancara, yakni sebagai berikut : *“In field research, the individual researcher directly talks with and observes the people being studied. Through interaction over months or years, the researcher learns about them, include their environment.”*(h. 364)

Pada penelitian ini, informan yang akan diwawancarai secara mendalam yaitu : Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bogor, Pengurus Koperasi BAIK, TPL, Ketua Kelompok, dan Anggota Koperasi BAIK. Pertanyaan yang diajukan tidak disusun terlebih dahulu, pertanyaan yang diajukan mengacu pada pedoman wawancara yang telah dirancang untuk setiap informan. Pengajuan pertanyaan disesuaikan dengan karakteristik setiap informan.

3. Pengambilan foto, dilakukan untuk memperkaya data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Pengambilan foto-foto dilakukan pada saat wawancara dilakukan untuk memperkaya data yang didapat.

1.5.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data akan dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi realitas yang bermacam-macam di lapangan sehingga analisis menjadi lebih eksplisit, lebih nampak dan mudah dilakukan. Selain itu, analisis kualitatif secara operasional akan dilakukan melalui tiga (3) cara, yaitu:

1. *Reduksi data* yaitu proses pereduksian data ke dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan ke dalam hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan arahan penelitian. Dari data tersebut diharapkan diperoleh gambaran dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam.
2. *Display data* yakni upaya pembuatan dan penyajian data melalui tabel sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detilnya dapat dipetakan dengan jelas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh merupakan kumpulan informasi yang sangat banyak sehingga menimbulkan kesulitan untuk menggambarkannya secara detil.
3. Kesimpulan dan verifikasi, yakni penyusunan secara sistematis data yang sudah terkumpul, baik melalui penentuan tema maupun tabel. Selanjutnya disimpulkan sehingga dapat diperoleh makna data yang sesungguhnya. Karena kesimpulan pada tahap ini masih bersifat tentatif dan sangat umum, maka masih perlu diuji melalui data yang baru diperoleh.

Mengacu kepada strategi analisa data kualitatif, Peneliti menggunakan strategi *illustrative method* dalam melakukan analisa data. Seperti yang dijelaskan oleh Neuman (2003) mengenai *illustrative method*, yaitu : “*a method of qualitative data analysis in which a researcher takes the theoretical concepts and treats them as empty boxes to be filled with specific empirical examples and description.*” (h. 469) Artinya, peneliti mengambil beberapa konsep teoritis dan memperlakukannya dalam suatu kotak kosong yang akan diisi dengan contoh-contoh empiris. Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa konsep yang terkait dengan topik penelitian untuk membantu memahami realitas yang ada di lapangan. Dalam bagian analisis konsep tersebut akan dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan.

1.5.7. Teknik Meningkatkan Kualitas Penelitian

Untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, dibutuhkan beberapa kaidah yang dapat menguji keabsahan data terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat pada program pembiayaan mikro yang dilaksanakan oleh Koperasi BAIK, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya. Data yang baru diperoleh tersebut masih perlu diuji keabsahannya. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini mengacu pada Moleong (2004) yang mengemukakan bahwa ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Untuk memeriksa keabsahan data hasil penelitian ini, akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*) berfungsi untuk melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Selain itu berfungsi untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kegiatan yang akan dilakukan untuk memeriksa kredibilitas hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memperpanjang masa observasi. Dalam hal ini peneliti tidak ingin memperpanjang masa observasi dengan harapan data yang diperoleh sudah dirasa benar pada akhir waktu yang telah dijadwalkan.
 - b. Melakukan *peer debriefing* Hasil kajian dari peneliti didiskusikan dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok penelitian dan juga tentang metode penelitian yang diterapkan. Pembicaraan ini bertujuan antara lain untuk memperoleh kritik, saran dan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan yang menantang tingkat kepercayaan akan kebenaran hasil penelitian.
 - c. Triangulasi Triangulasi ini dilakukan peneliti dengan maksud untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Triangulasi akan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan data dan sumber data.
 - d. Mengadakan *member check*. "*Member check*" akan dilakukan pada setiap akhir wawancara. Cara yang digunakan adalah dengan mengecek ulang garis besar berbagai hal yang telah disampaikan informan berdasarkan catatan lapangan. Maksud dari kegiatan ini agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan penelitian sesuai dengan informasi.
2. Keteralihan (*transferability*) sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama.
 3. Kebergantungan (*Dependability*) digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Peneliti akan mendiskusikannya dengan pembimbing dan penguji, secara setahap demi setahap, mengenai konsep-konsep yang dihasilkan di lapangan.

4. Kepastian (*confirmability*) untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada agar hasil penelitian ini objektif dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan kebenarannya.

(h. 173 -175)

1.6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penentuan informan yang berasal dari Dinas KUKM Perindag Kab. Bogor dengan jumlah hanya 1 (satu) orang. Keterbatasan ini disebabkan oleh prosedur birokrasi yang ditetapkan dinas dengan memilih 1 (satu) orang aparaturnya sebagai informan yang memiliki kapasitas dan pemahamannya terhadap topik penelitian yang diangkat, serta mampu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan karena pengalaman dan pengabdianya terhadap pengembangan koperasi dan pembiayaan mikro.

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk tesis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang pemilihan permasalahan, rumusan masalah, pertanyaan dan tujuan penelitian. Metode penelitian, yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pemilihan informan, teknik dan waktu pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan.

Bab 2 Koperasi, Pembiayaan Mikro, dan Pemberdayaan Masyarakat

Bab ini menjelaskan tentang teori dan definisi-definisi. Di mana di dalam kerangka teori ini berguna untuk menganalisis data temuan lapangan. Adapun konsep-konsep yang dibahas dalam bab ini di antaranya adalah konsep mengenai pembangunan masyarakat, koperasi, pembiayaan

mikro, pemberdayaan masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan masyarakat.

Bab 3 Gambaran Umum dan Koperasi BAIK

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi ekonomi, masyarakat di Kabupaten Bogor. Serta menjelaskan profil lembaga dan anggota Koperasi BAIK

Bab 4 Temuan Lapangan

Bab ini membahas temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan kelompok, studi kepustakaan dan dilengkapi dengan foto-foto yang terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat pada program pembiayaan mikro serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Bab 5 Anlisa Temuan Lapangan

Bab ini membahas dan menganalisis temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan dan dilengkapi dengan foto-foto dianalisis dengan menghubungkan teori-teori yang terdapat dalam bab 2, tinjauan pustaka terutama dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, bagaimana proses pemberdayaan perempuan itu terjadi dikaitkan dengan teori kemiskinan dan pemberdayaan yang diungkapkan oleh para ahli. Setelah itu, data diinterpretasi menurut pemahaman penulis.

Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini menjelaskan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian berdasarkan hasil dari kesimpulan dan temuan lapangan, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian dan rekomendasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB 2

KOPERASI, PEMBIAYAAN MIKRO DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Guna mencapai tujuan yang diinginkan, maka usulan penelitian ini menggunakan beberapa konsep ataupun teori untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mempermudah proses analisis data yang dilakukan. Adapun konsep-konsep yang dibahas dalam bab ini di antaranya adalah konsep mengenai kemiskinan, koperasi, pembiayaan mikro, pembangunan yang berpusat pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta faktor-faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan program pembiayaan mikro. Berikut merupakan beberapa konsep yang dibahas.

2.1. Kemiskinan

Menurut BPS (2008) kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu *pertama*, Kemiskinan Relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan dimana ukurannya sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk; *kedua*, Kemiskinan Absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja dimana ukurannya finansial dalam bentuk uang sebagai nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar yang dikenal dengan istilah garis kemiskinan (h. 6). Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non-makanan yang bersifat mendasar.

Sedangkan Sajogyo (1977) membagi tingkat kemiskinan berdasarkan tingkat penghasilan yang disetarakan dengan jumlah konsumsi beras yang dikonsumsi per orang per tahun. Ada pun tingkat kemiskinan di pedesaan menurut Sayogyo sebagai berikut: Pertama, untuk penduduk di pedesaan yang dikategorikan *miskin* dengan pengeluaran rumah tangga dibawah 320 Kg nilai tukar beras/orang-tahun, *miskin sekali* pangan tak cukup dengan pengeluaran rumah tangga dibawah 240 Kg nilai tukar beras/orang-tahun, *paling miskin* rumah tangga dibawah 180 Kg nilai tukar beras/orang tahun; Kedua, untuk penduduk di pedesaan yang dikategorikan *miskin* dengan pengeluaran rumah tangga dibawah 480 Kg nilai tukar beras/orang-tahun, *miskin sekali* dengan pengeluaran rumah tangga dibawah 360 Kg nilai tukar beras/orang-tahun, *paling miskin* rumah tangga dibawah 270 Kg nilai tukar beras/orang tahun (h. 2)

Pada kenyataan empirik, banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat. Kartasasmita (1993) dilihat dari segi penyebabnya kemiskinan dapat dibagi ke dalam tiga pengertian, yaitu : *Pertama*, kemiskinan natural (alamiah), yaitu keadaan kemiskinan karena dari asalnya memang miskin. Kelompok ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya; *Kedua*, kemiskinan struktural, kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan perolehan pendapatan dalam masyarakat yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan struktur masyarakat yang timpang; dan *Ketiga*, kemiskinan kultural ini mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan kebudayaannya, mereka sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan (h. 3). Kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam melakukan perubahan, ataupun untuk diajak memperbaiki tingkat kehidupannya, sehingga dengan kondisi ini menyebabkan pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang umum dipakai.

Chambers (1987) menggunakan istilah jebakan kemiskinan (*deprivation trap*) untuk memahami inti masalah kemiskinan di negara-negara dunia ketiga, di mana unsur-unsur kemiskinan terjalin erat dalam suatu mata rantai yang saling mempengaruhi yang melihat bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di

dunia ketiga, khususnya rakyat pedesaan yang disebabkan oleh saling kait-mengkaitnya faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut seperti lingkaran setan sehingga mereka terperangkap dalam kemiskinan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kemiskinan (*poverty*), merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan faktor-faktor lainnya, hal ini ditandai dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang kurang memadai, diakibatkan oleh pendapatan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga dari kemiskinan ini menyebabkan kelemahan pada perangkap kemiskinan yang lainnya;
2. Fisik yang lemah (*physical weakness*), yaitu adanya rasio ketergantungan yang tinggi antara anggota keluarga dalam hal mencari nafkah, karena adanya tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah;
3. Keterasingan (*isolation*), karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau di luar jangkauan komunikasi, sehingga menopang kemiskinan, dimana pelayanan atau bantuan pemerintah tidak sampai kepada mereka;
4. Kerentanan (*vulnerability*), biasanya keluarga miskin tidak mempunyai cadangan baik berupa uang ataupun makanan untuk menghadapi keadaan darurat; dan
5. Ketidakberdayaan (*powerless*), orang miskin tidak memiliki daya atau kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang lebih kuat (*powerfull*) yang sering kali mengeksploitasi mereka. (h. 145)

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, dimana kemiskinan tidak terbatas pada ketidakmampuan secara ekonomi, melainkan tidak terpenuhinya hak-hak sosial dasar warga negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Untuk itu, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui implementasi kebijakan yang bertumpu pada pembangunan berbasis masyarakat.

2.2. Kebijakan Sosial

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* (hanya menyangkut aparatur Negara), melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan baik swasta maupun masyarakat madani (*civil society*). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, dan masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Suharto (2006) menjelaskan bahwa kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (h. 1). Kebijakan sosial begitu kompleks dan dan rumit dalam mencapai sebuah strategi kemajuan sosial yang ideal. Berbeda dengan kebijakan ekonomi, kebijakan sosial dapat dikatakan kompleks disebabkan oleh banyaknya sudut pandang yang menjadi perhatian dalam menganalisa dan membuat perencanaan sosial, ukurannya yang begitu luas dan cenderung dinamis memungkinkan kebijakan tersebut sulit diukur.

Kebijakan sosial dan ekonomi bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya memiliki keterkaitan dalam proses pembangunan, sebab kebijakan ekonomi tidak akan tercapai tanpa keikutsertaan kebijakan sosial, begitu juga sebaliknya. Menurut *Mkandawire* (2004) mendefinisikan kebijakan sosial “*is collective interventions in the economy to influence the access to and the incidence of adequate and secure livelihoods and income. As such, social policy has always played redistributive, protective and transformative or developmental roles*” (h. 1). Dalam pengertian ini, kebijakan sosial merupakan suatu intervensi kolektif dalam perekonomian untuk memberikan akses, kondisi hidup, jaminan kehidupan, dan pendapatan. Bentuk kebijakan sosial seperti, redistribusi, jaminan sosial, pelayanan sosial, dan program-program kesejahteraan sosial lainnya.

Kebijakan sosial merupakan pedoman, acuan, strategi, dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar atau *roadmap* pengambil kebijakan dalam melakukan kegiatan pembangunan sosial. Kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (Midgley, 2000 : xi-xv). Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial.

Untuk itu, kebijakan sosial tidak bisa dipisahkan dan diupayakan sejalan dengan agenda bangsa, seperti apa yang sudah tertulis dalam strategi pembangunan internasional di PBB bahwa “apabila tetap berlangsung adanya hak-hak istimewa yang tidak semestinya, kekayaan yang melimpah dan ketidakadilan sosial, maka perkembangan gagal dalam tujuannya yang esentiil...” Jadi esensi kemajuan dalam kebijakan sosial adalah perubahan kualitatif dan struktural dalam masyarakat harus bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, sebagai faktor yang sangat menentukan serta hasil akhir perkembangan, keduanya ini akan dipandang sebagai bagian yang berkaitan dari proses dinamis yang sama dan menghendaki pendekatan yang mempersatukan dari kebijakan suatu negara, dalam mencapai upaya peningkatan kesejahteraan sosial suatu masyarakat.

Kondisi di atas telah dirumuskan oleh pemerintah sebagaimana termaktub dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional yaitu pembangunan bidang sosial-ekonomi yang menjelaskan bahwa pembangunan sosial-ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yang salah satu kebijakannya adalah mengembangkan dan memberdayakan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

2.3. Konsep Koperasi

Para ahli mendefinisikan koperasi berbeda-beda, namun secara etimologi koperasi berasal dari kata “*coopere*” (bahasa latin), atau dalam bahasa Inggris *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Hudiyanto (2002)

Universitas Indonesia

kemudian mendefinisikan koperasi dengan makna khusus sebagai sebagai kumpulan yang memberi kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan bertujuan untuk dapat meningkatkan kebutuhan materi anggotanya dengan menjalankan usaha secara bersama (h. 12)

Sedangkan definisi koperasi menurut UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha dimana orang-orang berkumpul bukan untuk menyatukan uang atau modal melainkan mereka menyatukan modal sebagai akibat dari adanya kesamaan kepentingan. Oleh karena itu, persyaratan utama bagi masuknya anggota bukan berdasarkan atas kesanggupan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela melainkan atas dasar dorongan kepentingan ekonomi anggota.

Koperasi merupakan lembaga usaha yang dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat lingkungannya. Dalam kegiatannya koperasi selalu akan mementingkan pelayanan kepada anggota dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, orientasi pelayanan adalah kepada anggota maka koperasi tidak bisa (tidak boleh) melakukan hubungan (pelayanan) kepada non anggota hanya karena cara itu dianggap lebih mudah dan menguntungkan ketimbang melayani anggota. Untuk menghindari kecenderungan memilih yang lebih menguntungkan (tetapi meninggalkan anggota) maka pengambilan keputusan tidak berdasarkan modal. Pengambilan keputusan atas dasar modal jelas akan mengakibatkan kecenderungan mengutamakan keuntungan daripada kepentingan anggota. *Hanel* (1989) memberikan definisi tentang organisasi koperasi, menurutnya organisasi koperasi adalah suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik, yang terbuka dan berorientasi pada tujuan (Sukamdiyo, 1996 : 4).

Dipandang dari sudut organisasi ekonomi, pengertian koperasi dapat dinyatakan dalam kriteria identitas yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. *Ropke* (1985) mendefinisikan koperasi sebagai "Suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama

perusahaan tersebut (Hendar dan Kusnadi 1999 : 12). Kriteria identitas suatu koperasi merupakan dalil/prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha yang lainnya.” Sejalan dengan pengertian tersebut, Munkner (1989) menyatakan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut :

1. Adanya sekelompok orang yang menjalin hubungan antar sesamanya atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan yang sama (kelompok koperasi)
2. Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong (motivasi swadaya)
3. Adanya perusahaan yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama (perusahaan koperasi)
4. Tugas perusahaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya. (Kusnadi dan Hendar, 1999 : 40)

Pendapat lain dinyatakan oleh *Korten* (2001) yang menggolongkan organisasi koperasi sebagai organisasi rakyat atau sektor keempat setelah organisasi pemerintah, organisasi bisnis dan organisasi sukarela. Dimana masing-masing organisasi itu memiliki kemampuan yang khas -seperti pemerintah dengan kekuatan ‘ancaman’nya, bisnis dengan kekuatannya ekonominya, dan organisasi sukarela dengan kekuatan ‘integratif’nya yang harus bekerja sama secara sinergi supaya proses pembangunan dapat berjalan secara dinamis dan berlanjut dimana ciri-ciri organisasi rakyat adalah sebagai berikut:

1. Organisasi itu merupakan asosiasi saling menguntungkan yang mendasarkan keabsahannya pada kemampuan melayani kepentingan para anggota;
2. Memiliki struktur demokratis yang memberikan kepada para anggotanya wewenang di atas para pemimpinnya; dan
3. Swasembada, dalam arti bahwa kelangsungan keberadaannya tidak tergantung pada inisiatif atau dana dari luar. (h. 158-166)

Dari uraian di atas, jelas bahwa organisasi koperasi merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu untuk mencapai suatu tujuan bersama yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Organisasi koperasi memiliki kekhasan, dan oleh karenanya memerlukan keterampilan yang khas pula. Adapun yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan usaha lainnya, yaitu koperasi mempunyai watak ekonomi sekaligus sosial yang bergandengan (*conjoined*).

2.4. Pembiayaan Mikro

Banyak strategi pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan persoalan kemiskinan. Salah satu dari strategi yang penting adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin produktif (oleh *World Bank* disebut *economically active poor*) melalui program penyaluran pembiayaan mikro. Istilah pembiayaan mikro seperti yang dikemukakan oleh *Robinson* (2001) mendefinisikan *microfinance* sebagai “*Microfinance refers to small-scale financial services – primarily credit and savings – provided to people who farm or fish or herd; who operate small enterprises or microenterprises where goods are produced, recycled, repaired, or sold; who provide services; who work for wages or commissions; who gain income from renting out small amounts of land, vehicle, draft animal, or machinery and tools; and to other individuals and groups at the local level of developing countries, both rural and urban*” (*Skarlatos*, 2004: 15). Besarnya keyakinan bahwa pembiayaan mikro merupakan salah satu strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan membuat banyak pihak berusaha membuka pelayanan pembiayaan mikro.

Microfinance dapat meningkatkan akses terhadap aset produktif (seperti tanah, modal, dan kredit), proses, dan pemasaran bagi perempuan. Dengan memberikan akses terhadap modal dan pelatihan, *microfinance* membantu perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk melawan kemiskinan dan memaksimalkan output ekonomi mereka. *Smith* (2002) mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga keuangan di pedesaan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan sebagai intermediasor antara individu yang ingin menabung dan yang ingin meminjam. Dalam perekonomian modern, modal berperan besar dalam pembangunan ekonomi sehingga akses kepada lembaga keuangan sangat

dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan penelitiannya di Amerika, Bank cenderung mengurangi perannya di wilayah pedesaan, namun lembaga keuangan non Bank justru meningkatkan penetrasinya. Hal ini dapat terjadi karena tiga hal, yaitu:

1. Biaya yang terlalu mahal.

Kombinasi antara kondisi di pedesaan yang kepadatan penduduknya rendah, jumlah pinjaman yang kecil dan resiko kredit yang tinggi, menyebabkan biaya yang besar bagi Bank untuk menyalurkan kredit di pedesaan. Sebaliknya lembaga keuangan non-Bank di pedesaan memiliki struktur biaya yang lebih rendah.

2. Regulasi

Dengan biaya yang tinggi, seharusnya bank dapat menaikkan suku bunga di pedesaan, namun seringkali regulasi dari pemerintah melarang bank mengenakan bunga tinggi bagi usaha mikro di pedesaan. Sementara lembaga keuangan non Bank tidak ada batasan suku bunga.

3. Kultur masyarakat desa

Kultur masyarakat di pedesaan yang cenderung menolak modernisasi menyebabkan masyarakatnya tetap bertahan dengan kredit kecil, baik di pertanian, industri kecil dan jasa pendukungnya. (h. 20)

Pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, menyalurkan berbagai program dana bergulir kepada kelompok masyarakat, seperti Kredit Canda Kulak (KCK), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Raksa Desa dan lain-lain. Sebagai akibat proyek-proyek tersebut maka terbentuklah berbagai macam Lembaga Pembiayaan mikro (LKM) di masyarakat. Langkah ini juga banyak ditempuh oleh banyak lembaga donor dan LSM. Mereka membentuk LKM dengan mereplikasi bermacam-macam model yang telah berhasil diterapkan seperti model *credit union* atau model *Grameen Bank* dengan berbagai variasinya.

Dalam lingkup dunia, pendekatan pembiayaan mikro mendapatkan momentumnya dalam *Microcredit Summit* (MS) yang diselenggarakan di Kota Washington pada tanggal 2-4 Februari 1997 (Ismawan 2003). Dalam pertemuan tingkat dunia tersebut berhasil dirumuskan empat prinsip utama pengembangan pembiayaan mikro, yaitu:

1. *Reaching the poorest* (menjangkau orang yang paling miskin). *The poorest* yang dimaksud adalah masyarakat paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (*economically active*). Secara internasional mereka dipahami merupakan separuh bagian bawah dari garis kemiskinan nasional.
2. *Reaching and empowering women* (menjangkau dan memberdayakan perempuan). Perempuan merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu mereka harus menjadi fokus utama. Dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan bahwa perempuan merupakan peminjam, pemakai dan pengembali kredit yang baik.
3. *Building financially sustainable institution* (membangun lembaga yang berkelanjutan secara finansial). Lembaga Pembiayaan mikro diharapkan dapat secara terus-menerus dapat melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak yang terlayani, maka secara finansial kelembagaan tersebut harus terjamin keberlanjutannya.
4. *Measurable impact* (mempunyai dampak yang terukur). Dampak dari kehadiran kelembagaan harus dapat diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan. (h. 9)

MS merupakan tanda dimulainya gerakan global pemberdayaan masyarakat dengan penyaluran pembiayaan mikro kepada masyarakat dengan berdasarkan pengalaman dari banyak negara. MS juga memberi semangat baru karena MS tidak hanya menampilkan keragaan keberhasilan kegiatan pembiayaan mikro dalam memberdayakan masyarakat (perekonomian masyarakat), tetapi juga mematrikan suatu janji bersama untuk menanggulangi kemiskinan global sebanyak 100 juta keluarga (atau sekitar 600 juta jiwa).

Dalam mengembangkan pembiayaan mikro untuk memberdayakan masyarakat miskin produktif (*economically active poor*) tersebut, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan (Ismawan, 2003), sebagai berikut:

1. Model pembiayaan oleh rakyat (*financing of the poor*)
Bentuk ini mendasarkan diri pada *saving led microfinance*, dimana mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas *membership base*, dimana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat antara lain : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Usaha Bersama, *Credit Union* (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan lain-lain.
2. Model pembiayaan dengan rakyat (*financing with the poor*)
Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang *nature*-nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisir dan dihubungkan atas dasar semangat simbiose mutualisme, atau saling menguntungkan. Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin banyak (*outreaching*), sementara pihak masyarakat miskin mendapat akses untuk mendapatkan dukungan finansial.
3. Model pembiayaan untuk rakyat (*financing for the poor*)
Bentuk ini mendasarkan diri atas *credit led institution* dimana sumber dari dukungan finansial terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun memperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit. Contoh bentuk ini adalah: Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), *Grameen Bank*, *ASA*, dll. (h. 4)

Fenomena *Grameen Bank* di Bangladesh menurut Tjondronegoro (1997) merupakan contoh gerakan kredit rakyat yang sangat monumental (h. v). Tjondronegoro menyebutkan gerakan kredit rakyat seperti ini kini telah menjadi gerakan dunia, terutama dalam proses penghapusan kemiskinan yang sekaligus menjadi wahana pemberdayaan kaum perempuan. Saat ini, lebih dari 250 lembaga di 100 negara menjalankan program pembiayaan mikro yang didasarkan pada metode dengan *Grameen Bank* yang direplikasi tidak saja di negara-negara berkembang tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa.

Dalam proses pengembangan masyarakat, Koperasi BAIK melibatkan berbagai pihak dalam membangun kemitraan dan jejaring kelembagaan, baik pemerintah, LSM, Swasta, dan Perguruan Tinggi. Koperasi BAIK memposisikan diri sebagai lembaga mitra dengan pemerintah yang dapat membantu program-program pemerintah yang belum menyentuh masyarakat miskin di pedesaan Kabupaten Bogor. Sebagai timbal-baliknya, pemerintah juga mengakses data-data masyarakat miskin yang dimiliki Koperasi sebagai bahan kebijakan dalam menyalurkan bantuan modal kepada masyarakat, baik langsung maupun bermitra dengan Koperasi serta dilibatkan dalam penyusunan perencanaan program pemerintah kepada masyarakat miskin. Posisi LSM, Swasta, dan Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang berperan penting dalam membangun perubahan sosial, wahana belajar dalam meningkatkan wacana-wacana pemberdayaan melalui kegiatan riset dan pendampingan, serta upaya memperoleh akses permodalan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program.

Pembiayaan mikro bukanlah sebuah solusi yang bersifat *top-down* bagi upaya pengentasan kemiskinan, namun merupakan pendekatan yang bersifat *bottom-up* yang bertujuan untuk memberdayakan kaum miskin, meningkatkan aspirasi individual dan kemampuan mereka, serta menciptakan sebuah lingkungan yang mana mereka dapat menyadari keuntungan sebenarnya dari pasar ekonomi. Dengan demikian, pembiayaan mikro merupakan sebagai instrumen pembangunan yang betumpu pada pengembangan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

2.5. Pembangunan Berpusat pada Manusia (*People-Centred Development*)

Dalam kajian Manajemen Pembangunan, strategi pembangunan dengan melibatkan rakyat secara aktif demikian disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia/rakyat (*people-centred development*). Fokus perhatian dari pembangunan yang berpusat pada manusia menurut Korten (1984) adalah perkembangan manusia (*human-growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainability*). Dominasi pemikiran dalam pembangunan ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari potensi manusia (Tjokrowinoto, 1999 : 218).

Prayitno (2009) menjelaskan bahwa konsep utama *people-centred development* adalah suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumberdaya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan, sehingga terkesan pembangunan berdimensi rakyat ini bersifat sangat normatif (h. 13). Manusia dengan seluruh potensi fisik dan spiritual diapandang sebagai modal utama pembangunan. Kemunculan *people-centred development* merupakan reaksi dari pola pembangunan konvensional yang dinilai terlalu berpusat pada produksi, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Selain itu pola pembangunan konvensional dinilai banyak berakibat terhadap martabat manusia, dan lingkungan. Alternatif teori pembangunan yang diperlukan yaitu memberikan perhatian terhadap potensi manusiawi dan prinsip pembangunan swadaya.

Menurut Suryono (2001) menyatakan bahwa perhatian utama *people-centred development* dalam proses pembangunan yaitu : Pelayanan sosial (*social service*); Pembelajaran sosial (*social learning*); Pemberdayaan (*empowerment*); Kemampuan (*capacity*); dan Kelembagaan (*institutional building*) (h. 58). Perhatian utama tersebut berjalan secara terpadu dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas manusia secara utuh sebagai upaya menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki peranan penting dalam proses pembangunan.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan sebaiknya lebih diarahkan pada masyarakat dengan mengutamakan aspek kehidupan dan penghidupan. Maskun (1995) mengatakan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah proses pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat (*people-centered*), mengutamakan segi kehidupan manusia dan mementingkan aspek humanism (h. 21). Dengan kata lain lebih mengutamakan sumebrdaya insani dan menghargai segi pandang masyarakat dalam menangani dan memecahkan masalahnya. Inisiatif masyarakat akan lebih dihargai dalam usaha perencanaan dan strategi pembangunan yaitu strategi menggalakkan inisiatif pembangunan dari bawah (*Bottom-up*) sebagai pembangunan yang mengutamakan segi kehidupan manusia dan mementingkan aspek-aspek humanistis pada tingkat lokal/masyarakat yang selanjutnya lebih dikenal dengan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Program Pembiayaan mikro melalui pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Koperasi BAIK merupakan bagian dari proses pembangunan yang pelaksanaannya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan pemerintah nasional dan kabupaten Bogor. Pemerintah kabupaten Bogor secara nyata telah menyusun Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) yang salah satunya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program pembiayaan mikro dirancang untuk memberikan akses permodalan kepada ibu-ibu rumah tangga miskin dalam meningkatkan usaha rumah tangga di pedesaan dengan mengedepankan nilai-nilai kolektifitas yang sesuai dengan budaya masyarakat pedesaan. Namun selama ini program pembiayaan mikro lebih diorientasikan untuk mencapai tujuan daripada proses, sehingga kurang memperhatikan upaya-upaya untuk melibatkan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan banyak permasalahan dalam proses pelaksanaan program pembiayaan mikro yang banyak mengangkat keberhasilannya dari sisi tujuan program, namun hanya sedikit yang mencoba melakukan pendekatan dari sisi prosesnya. Sehingga dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan masyarakat dengan mengedepankan partisipasi melalui instrumen pemberdayaan masyarakat.

2.6. Pemberdayaan Masyarakat

Dewasa ini banyak nuansa pemahaman terhadap konsep pemberdayaan dalam pembangunan. Konsep pemberdayaan merupakan upaya mencari bentuk konsep pembangunan yang ideal setelah berbagai paradigma pembangunan sebelumnya gagal memenuhi harapan sebagian besar umat manusia. Friedman (1992) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan merupakan paradigma terakhir dari konsep pembangunan manusia yang kemunculannya disebabkan oleh karena adanya dua permasalahan, yakni : kegagalan dan harapan, yaitu gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dengan harapan-harapan adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi dan pertumbuhan ekonomi (h. 167).

Pandangan lain konsep pemberdayaan dikemukakan oleh *Narayan* (2002) menjelaskan “*Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives*” (h. 14). Pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah intervensi yang merupakan suatu upaya untuk memperkuat sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan sendiri masa depannya. Definisi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk melakukan proses perubahan agar masyarakat memahami manfaat dan peranannya dalam program pembangunan, mampu merumuskan kebutuhan dengan potensi/sumberdaya yang dimiliki, mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, serta mampu menyusun rencana kegiatan untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Mengingat pemberdayaan sebagai suatu proses, maka implementasi pemberdayaan mengedepankan proses daripada hasil (output). Menurut *Ife* (1995) bahwa terdapat tiga strategi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, pendidikan dan penyadaran (h. 63). Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan diterima dalam pengembangan atau perubahan struktur dan kelembagaan untuk akses yang lebih merata terhadap sumber daya atau pelayanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi

dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi sosial menitikberatkan pada pentingnya perjuangan politik dan perubahan dalam mengembangkan kekuatan efektif. Sedangkan pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran mengembangkan pentingnya proses pendidikan yang dapat melengkapi warga masyarakat untuk meningkatkan kekuasaanya.

Sumodiningrat (2009) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan umum (universal) dan pendekatan khusus (ideal). Dengan pendekatan umum, bantuan baik berupa dana, prasarana, dan sarana diberikan kepada semua daerah dan semua penduduk secara merata. Pendekatan ini keuntungannya adalah mudah diterapkan. Namun, pendekatan ini sangat mahal dan mempunyai resiko kebocoran yang cukup tinggi. Sedangkan dengan pendekatan khusus, bantuan diberikan kepada penduduk atau daerah yang benar-benar memerlukan, dan kebocoran dapat ditekan sekecil mungkin. Berdasarkan pendekatan ini, perencanaan dalam penggunaan bantuan ditentukan sendiri oleh masyarakat (h. 193-194).

Berdasarkan beberapa konsep pemberdayaan di atas, maka dalam usulan penelitian ini pemberdayaan dibatasi pada upaya keberdayaan anggota Koperasi BAIK dalam program pembiayaan mikro untuk menumbuhkan kapasitas sosial ekonomi kelompok serta meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Upaya yang dilakukan dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam memahami pemberdayaan sebagai aktivitas yang meletakkan proses yang tidak menafikan hasil, sebagai basis pelaksanaan program, serta tidak bisa dipisahkan dari peran pendampingan kepada kelompok sasaran.

1.6.1. Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, *Narayan* (2002) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu komunitas didukung oleh beberapa elemen berikut :

1. Akses terhadap informasi

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Kekuasaan di sini tidak didefinisikan secara harfiah begitu saja, melainkan pengertian kekuasaan ini merupakan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya. Informasi memberikan kasanah dan wawasan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Informasi ini tidak hanya berupa kata-kata yang tertulis, namun dapat pula diperoleh melalui diskusi kelompok, puisi, cerita, debat, teater jalanan, dan opera jalanan – dalam bentuk yang berbeda-beda secara kultural- dan biasanya menggunakan media seperti radio, televisi, dan internet.

2. Partisipasi

Pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan “dari bawah” dan melibatkan lembaga seperti individu dan kelompok. Sementara inklusi sosial membutuhkan perubahan sistemik yang dimulai “dari atas.” Sementara partisipasi secara sederhana diartikan bagaimana komunitas miskin terlibat dan peran apa yang dimainkan.

3. Akuntabilitas

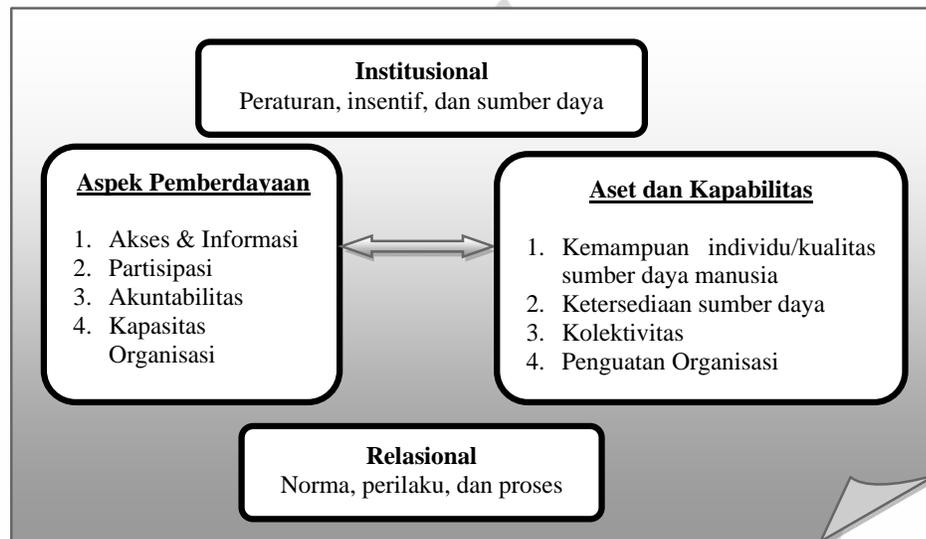
Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan swasta, atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, tindakan, serta penggunaan dana yang mendukung pelaksanaan tindakan tersebut. Terdapat tiga tipe mekanisme akuntabilitas yaitu mekanisme politik, administratif, dan publik. Akuntabilitas politik terjadi melalui partai politik dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Akuntabilitas administratif dapat terjadi melalui mekanisme akuntabilitas internal lembaga pemerintah. Akuntabilitas publik diperuntukkan bagi khalayak publik.

4. Kapasitas organisasi lokal

Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka, dan memobilisasi sumber

daya untuk memecahkan masalah. Seringkali, di luar jangkauan sistem formal, perempuan miskin saling mendukung satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kapasitas organisasi lokal merupakan kunci dari efektifnya sebuah pemberdayaan. (h. 18)

Keempat aspek pemberdayaan di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kerangka pemberdayaan. Seperti pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemberdayaan
Sumber : Telah diolah kembali dari *Narayan (2002)*

Berdasarkan diagram di atas, aspek pemberdayaan serta aset dan kapabilitas saling berkaitan dalam upaya mewujudkan tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Di sini dapat terlihat bahwa suatu pemberdayaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya, kolektivitas, dan organisasi. Aset dan kapabilitas ini saling bersinergi dengan aspek pemberdayaan (informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal). Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan memiliki peranan yang vital untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai tahap pemberdayaan akan mendukung mereka menjadi lebih berdaya dan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. *Conyers (1994)* mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, di

antaranya adalah masyarakat akan merasa lebih dihargai apabila keterlibatan (partisipasi) mereka berpengaruh terhadap suatu kebijakan tertentu dan berpengaruh langsung terhadap apa yang mereka rasakan. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah penyesuaian diri perencana sosial atau pemangku kepentingan atas apa yang penting dan apa yang tidak penting oleh suatu komunitas. Kaum miskin tidak akan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan apabila partisipasi mereka tidak dihargai dan tidak menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan bagi kesejahteraan mereka dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun terdapat organisasi lokal yang kuat, hal ini tetaplah menyebabkan kaum miskin tidak memiliki akses terhadap pemerintahan lokal, sektor ekonomi swasta, dan kurangnya akses terhadap informasi (h. 86-87).

Dalam pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat khususnya masyarakat miskin. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat ini disebut juga dengan penguatan kapasitas (*capacity building*). Penguatan kapasitas ini merupakan suatu proses dalam pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan atau merubah pola perilaku individu, organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Melalui penguatan kapasitas ini, maka masyarakat dapat memahami dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat. Strategi yang digunakan dalam penguatan kapasitas ini adalah melalui pendampingan. Jadi, strategi pendampingan sangat efektif dan efisien dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pendampingan maka kapasitas masyarakat dapat dikembangkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

1.6.2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kaitannya dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Sebagaimana

yang diungkapkan oleh Adi (2003) bahwa pemberdayaan menekankan pada *process goal*, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai prinsip demokratis (h. 70)

Dengan menekankan pada proses, tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) sebagai berikut :

1. *Penyadaran*, pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dilakukan secara mandiri (*self help*).
2. *Pengkapasitasan*, pada tahap ini komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya sebelum diberdayakan. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity building*, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.
3. *Pendayaan*, pada tahap ini merupakan target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. (h. 1)

Keteraturan dan kesinambungan melakukan tahapan dalam proses pemberdayaan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan aktivitas pemberdayaan. Adi (2003) menjelaskan bahwa secara umum tahapan yang dilakukan tenaga pendamping dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan.

Tahap ini mencakup tahap persiapan petugas dan tahap persiapan lapangan. Persiapan petugas dalam hal ini (*community worker*) merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat.

2. Tahap Pengkajian (*assessment*).

Proses *assessment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*)) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh kelompok sasaran.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan dan Tahap Pemformulasian Rencana Aksi.

Pada tahap ini, agen perubah (community worker) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap capacity building dan networking.

Tahapan ini mencakup :

- a. Melakukan pelatihan, workshop, atau sejenisnya untuk membangun kapasitas setiap individu masyarakat sasaran agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka;
- b. Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurnya; dan
- c. Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang dapat mendukung kelembagaan lokal.

5. Tahap pelaksanaan dan pendampingan

Pada tahapan ini melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan bersama masyarakat sasaran.

6. Tahap evaluasi

Tahapan ini mencakup :

- a. Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
- b. Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
- c. Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan.

Tahap evaluasi akhir dilakukan setelah semua tahap di atas dijalankan. Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi (phasing out strategy).

7. Tahap terminasi.

Tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan berakhirnya tahap terminasi ini, maka fasilitator menyerahkan kontinuitas program kepada masyarakat sasaran sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka. (h. 250-258)

Dalam tahapan di atas, dibutuhkan kesiapan dari pelaksana program pemberdayaan agar kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengelola program membutuhkan *Community Worker* (tenaga pendamping) yang memiliki peran dalam mengawal semua proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

1.6.3. Peran *Community Worker* (Tenaga Pendamping)

Peran *Community Worker* (tenaga pendamping) dalam program bertujuan untuk merangsang prakarsa dan swadaya masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program pembangunan yang dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh O'Connor (1999) menjelaskan bahwa *“The welfare and community worker is a person who, through professional training and field education, has the requisite values, attitudes, knowledge and skills to work autonomously, or with a team, in a social welfare agency or program intended to promote, relieve or restore the social functioning of individuals, families, social groups or larger communities”* (Adi, 2005 : 21). Tenaga pendamping merupakan orang yang terampil dan berperan penting dalam merangsang partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan berjalan secara maksimal jika masyarakat diberi kebebasan untuk mengembangkan inisiatif atau prakarsanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat diperlukan suatu keyakinan bahwa pada hakekatnya masyarakat cukup potensial atau memiliki kemampuan untuk menanggulangi permasalahannya. Disinilah peranan tenaga pendamping dibutuhkan untuk mendorong pengembangan kreatifitas/inisiatif dan peningkatan kemampuan masyarakat.

Selanjutnya Suharto (2005) mengatakan peran tenaga pendamping proses pendampingan berpusat pada empat bidang tugas, yaitu :

1. Pemungkinan (*enabling*) atau Fasilitasi

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

2. Penguatan (*empowering*)

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya, membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan fungsi penguatan.

3. Perlindungan (*Protecting*)

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Dalam kaitan dengan fungsi ini seorang pendamping bertugas mencari sumber-sumber melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja, sebagai konsultasi.

4. Mendukung (*supporting*)

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Dalam hal ini pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-

tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi dan mencari serta mengatur sumber dana. (h. 95)

Sumodiningrat (2009) menambahkan lebih dalam menjelaskan bahwa bagi para pekerja sosial dilapangan, kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendampingan sosial. terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu:

1. Motivasi

Masyarakat khususnya keluarga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.

2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Disini peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri.

3. Manajemen Diri

Setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan. Disini pada tahap awal, pendamping membantu mereka untuk mengembangkan sebuah sistem. Kemudian memberikan wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

4. Mobilisasi Sumber

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap sumber-sumber yang dimiliki oleh individu-individu yang dalam masyarakat melalui tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumber-sumber ini perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

5. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin. (h. 104-106)

Peran *Community Worker* bertujuan untuk merangsang partisipasi kelompok sasaran dan mengikutsertakan keterlibatan mereka dalam proses pelaksanaan program. Sebab masyarakat akan merasa lebih dihargai apabila keterlibatan (partisipasi) mereka berpengaruh terhadap suatu kebijakan tertentu dan berpengaruh langsung terhadap apa yang mereka rasakan. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah penyesuaian diri perencana sosial atau pemangku kepentingan atas apa yang penting dan apa yang tidak penting oleh suatu komunitas.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, fokus usulan penelitian ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan secara partisipatif menekankan pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama yang tumbuh dari kepentingan

masyarakat. Proses pemberdayaan program pembiayaan mikro membutuhkan peran *Comunity Worker* (Istilah Koperasi BAIK : Tenaga Pendamping) yang bertugas membantu anggota Koperasi BAIK untuk mengetahui kondisinya dan berupaya bersama-sama mengubah kondisi tersebut ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi/sumberdaya yang dimilikinya. Partisipasi anggota akan tumbuh sebagai hasil dari kesepakatan antar anggota akan perubahan sosial yang diharapkan. Partisipasi akan muncul ketika kelompok sasaran merasakan manfaat program yang dijalankan tersebut, sehingga akan muncul pula kesadaran kelompok untuk menumbuhkan program menuju kemandirian.

2.7. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Koperasi dan Pembiayaan Mikro

Berkaitan penjelasan di atas, dalam usulan penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pengelolaan dan keberlanjutan Koperasi BAIK. Dalam memahami pemberdayaan sebagai proses, keberhasilan maupun kegagalan program bukan sebagai tujuan, namun dimaknai sebagai proses. Jika dalam pelaksanaan program tersebut ada unsur kegagalan, maka kegagalan tersebut sebagai masalah yang perlu diselesaikan secara bersama-sama.

Berkaitan dengan hasil studi di atas, *Esman dan Uphoff* (1984) menjelaskan faktor-faktor yang menjadi hambatan dan rentan terhadap organisasi lokal termasuk koperasi adalah sebagai berikut:

1. Resistensi (*resistance*)

Koperasi di wilayah miskin (pedesaan), dapat menghadapi resistensi aktif maupun pasif yang berasal dari kaum elit di tingkat lokal dan regional, pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, kaum miskin di wilayah pinggiran kota dan organisasi-organisasi lainnya dengan berbagai konflik kepentingan. Resistensi oleh elit lokal terdiri dari beberapa bentuk, dapat melalui tekanan-tekanan, sanksi ekonomi, sosial, budaya dan sampai pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Di sisi lain, Pemerintah juga dapat menjadi sumber resistensi secara legal, indikasi yang paling jelas adalah alokasi sumberdaya yang tidak selalu berpihak pada orang miskin.

2. Subordinasi (*subordination*)

Organisasi lokal berada dalam bahaya kehancuran yang besar ketika kehilangan kebebasan dalam bertindak dan berada di bawah kendali pihak luar yang lebih kuat, secara umum ada empat jenis subordinasi seperti: pemerintah, kaum elit dan pemimpin di tingkat lokal, serta pihak luar yang mendampingi organisasi lokal. Kondisi ini karena masyarakat lokal akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki kewenangan dan otonomi sendiri, sehingga sulit menentukan kegiatan apa yang harus mereka lakukan dan kearah mana perkembangan dari organisasi lokal ini dapat dijalankan.

3. Perpecahan internal (*internal division*)

Pada organisasi yang lebih besar perpecahan mudah timbul dalam hal perebutan kekuasaan yang akan membawa orang ataupun lembaga pada perpecahan. Dinamika politik yang berlangsung di tengah masyarakat bisa juga menjadi faktor perpecahan di dalam organisasi lokal.

4. Ketidakefektifan (*ineffectiveness*)

Kelemahan masyarakat miskin adalah ketidaksiapan sumber daya manusia dalam hal berpolitik, berorganisasi, keahlian dalam hal teknis. Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan mereka dan minimnya pengalaman mereka dalam berhubungan dengan pihak luar yang bersifat formal, sehingga menyebabkan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri.

Adanya kurang percaya diri, juga bisa disebabkan oleh keadaan organisasi lokal yang cenderung kecil dan bersifat informal, sehingga bila berhadapan dengan kaum elit lokal dan pemerintah setempat menjadi kurang percaya diri sehingga akan mengganggu kinerja mereka. Selain masalah sumber daya manusia, masalah lain adalah kurangnya otoritas yang dimiliki oleh organisasi lokal dalam membuat suatu keputusan yang mengikat semua anggota, sehingga berakibat berkurangnya kredibilitas organisasi lokal oleh pihak luar.

5. Malpraktek (*malpractices*)

Organisasi sering digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan individu dengan mengenyampingkan tujuan organisasi dan tujuan bersama dari anggotanya. Para pemimpin mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi atau keuntungan teman, keluarga atau faksinya. Mereka dapat bersekongkol dengan para politikus, pemerintah atau elit lokal, sehingga dana yang ada dapat dialihkan dari kepentingan organisasi kepada kepentingan kelompok tadi. Praktek-praktek korupsi dapat menghilangkan kepercayaan terhadap organisasi dan dapat menghancurkan moral para anggota organisasi tersebut. (h. 182-202)

Sedangkan menurut Alma (2002) keberhasilan berbagai koperasi baik di dalam maupun di luar negeri, diperoleh pokok-pokok tentang keberhasilan dan kendala yang dihadapi koperasi sebagai berikut:

- 1 Pengelolaan yang dilakukan koperasi dianggap berhasil:
 - a. Memberikan kemudahan pinjaman terhadap permodalan;
 - b. Memberikan bantuan berupa peralatan atau sarana bagi usaha masyarakat / anggota;
 - c. Meningkatkan partisipasi anggota untuk menabung dalam upaya menghimpun dana;
 - d. Memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya kepada anggota, umumnya bagi yang berpenghasilan rendah;
 - e. Membantu anggota / masyarakat dalam memasarkan hasil dari usaha mereka;
 - f. Mengembangkan usaha-usaha koperasi yang lebih luas; dan
 - g. Memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi anggota dalam usaha memberdayakan mereka.
- 2 Kendala-kendala yang dihadapi koperasi:
 - a. Adanya kebijakan pimpinan yang merugikan anggota;

- b. Adanya kepentingan-kepentingan kelompok yang berdampak pada terjadinya KKN;
 - c. Tingkat pemahaman anggota yang berbeda-beda dan adanya suasana kurang terbuka;
 - d. Monopolistik oleh perusahaan besar yang bermodal besar serta menguasai produk-produk sejenis; dan
 - e. Adanya fluktuasi harga pasar yang menyebabkan rendahnya harga jual.
- (h. 39)

Namun menurut *Daley-Haris* (2005) ada beberapa mitos yang merupakan penghambat keberhasilan pembiayaan mikro, yaitu: *Pertama*, Lembaga-lembaga pembiayaan mikro tidak dapat menjangkau masyarakat yang paling miskin karena membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk mengidentifikasi dan memotivasi mereka; *Kedua*, Jika sebuah lembaga mengalami keberhasilan dalam menjangkau masyarakat miskin, lembaga tersebut tidak dapat membiayai kebutuhan mereka sendiri secara finansial; *Ketiga*, Sebuah lembaga yang entah bagaimana mengelola keuangan untuk menjangkau masyarakat yang sangat miskin dan menjadi bias mencukupi kebutuhannya sendiri secara finansial hanya akan menambah beban hutang terhadap keluarga-keluarga yang melakukan pinjaman. (h. 11)

Sedangkan *Watson* (1984) menggambarkan beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi proses pemberdayaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan, antara lain:

- 1 Faktor Internal (hambatan yang berasal dari kepribadian individu)
 - a. Kestabilan (*Homeostatis*). Homeostatis merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan (stabilizing forces) dorongan-dorongan dari luar. Tubuh manusia memiliki mekanisme untuk mengatur perubahan fisiologis, seperti temperatur, kadar gula, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat membuat perubahan yang permanen pada diri individu jika tidak diikuti dengan penguatan

- yang relatif terus menerus dari sistem yang melingkupinya (tidak diikuti program lanjutan untuk menstabilkan hasil latihan).
- b. Kebiasaan (*Habit*). Sebagian pakar dari teori belajar (*learning theory*) berasumsi bahwa jika tidak ada perubahan situasi yang tak terduga, setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaannya.
 - c. Hal yang utama (*Primacy*). Merupakan hal-hal yang berhasil mendatangkan hasil yang memuaskan. Jika tindakan yang pertama dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi suatu situasi tertentu, ia cenderung mengulangnya pada saat yang lain (ketika menghadapi situasi yang sama).
 - d. Seleksi ingatan dan persepsi (*Selective perception and retention*). Jika seseorang terhadap “obyek sikap” telah terbentuk, tindakan yang dilakukannya di saat-saat yang berikutnya akan disesuaikan dengan “obyek sikap” yang ia jumpai.
 - e. Ketergantungan (*Dependence*). Ketergantungan seseorang terhadap orang yang lebih dewasa dapat pula menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Jika dalam suatu kelompok masyarakat terlalu banyak orang yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain, proses “pemandirian” masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan.
 - f. *Superego*. *Superego* yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaruan, dan kadangkala menganggap pembaruan sebagai suatu yang tabu. Dorongan *superego* yang berlebihan ini menimbulkan kepatuhan yang berlebihan pula karena dorongan dari *Id* lebih sering teredam dan tak tersalurkan. Keadaan seperti inilah yang menghambat suatu inovasi yang diperkenalkan oleh *community worker* kepada masyarakat tersebut.
 - g. Rasa tidak percaya diri (*Self-distrust*). Rasa tidak percaya diri dapat merupakan konsekuensi dari ketergantungan sejak masa kanak-kanak yang berlebihan, serta dorongan dari *superego* yang kuat sehingga ia

merasa perlu menghindari dorongan yang datang dari dirinya sendiri. Rasa tidak percaya diri ini bila terus berlanjut pada akhirnya dapat membuat seseorang tidak yakin akan kemampuannya sehingga berbagai potensi yang dimilikinya sulit untuk muncul ke permukaan.

- h. Rasa tidak “aman” dan regresi (*Insecurity and regression*). Merupakan kecenderungan untuk mencari “rasa aman” yang ia peroleh di masa lalu. Mereka merasa bahwa perubahan yang akan terjadi justru akan dapat meningkatkan “kecemasan dan ketakutan” (*anxiety*) mereka. Sehingga, mereka menjadi pihak yang cenderung untuk menolak pembaruan.
 - i. Faktor predisposisi (*Predisposing factors*). Merupakan sesuatu yang muncul sebelum (*antecedents*) perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang (*those antecedents to behaviour that provide the rationale or motivation for the behaviour*), seperti pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan persepsi dari komunitas sasaran. Pada intinya, faktor predisposisi ini mengarah pada perilaku yang belum nyata (*covert behaviour*) dari komunitas sasaran.
- 2 Faktor Eksternal (hambatan yang berasal dari sistem sosial)
- a. Kesepakatan terhadap norma tertentu (*Conformity to norms*). Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis ‘mengikat’ sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Pada titik tertentu, norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaruan) yang ingin diwujudkan.
 - b. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*Systemic and cultural coherence*). Seperti apa yang dipahami sebagai prinsip dasar dalam Gestalt dimana “setiap bagian dari suatu bentuk tertentu mempunyai karakteristik dari bentuk tersebut sebagai hasil dari interaksi dengan totalitas bentuk tersebut”. Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain. Hal ini terjadi karena dalam suatu

komunitas tidak hanya berlaku satu sistem, tetapi berbagai sistem yang saling kait-mengait, menyatu, dan terpadu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan yang mantap (*steady state*).

- c. Kelompok kepentingan (*Vested interests*). Adanya berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat karena mereka cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan, dan memperluas aset yang mereka miliki tanpa memperhatikan kepentingan kelompok lainnya.
- d. Hal yang bersifat sakral (*The Sacrosanct*). Berdasarkan penelitian beberapa antropolog, Watson, melihat bahwa pada berbagai budaya, beberapa kegiatan tertentu tampak lebih mudah berubah dibandingkan beberapa kegiatan yang lain. Salah satu yang memiliki nilai kesulitan untuk berubah yang tinggi adalah ketika suatu teknologi ataupun program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap “sakral”.
- e. Penolakan terhadap “orang luar” (*Rejection of “outsiders”*). Dari sudut pandang psikologi dikatakan bahwa manusia memiliki sifat universal, salah satunya adalah ia memiliki rasa curiga dan rasa terganggu (*hostility*) terhadap orang asing. Oleh karena itu, *community worker* harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik agar ia tidak menjadi “orang luar” dalam masyarakat tersebut.
- f. Faktor penguat perubahan (*Reinforcing factors*). Merupakan sesuatu yang muncul sebelum (*antecedents*) perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud (*those antecedents to behaviour that facilitate a motivation to be realized*). Jika faktor predisposisi mengarah pada faktor *covert behaviour* dari komunitas sasaran, faktor penguat perubahan lebih mengarah pada *covert behaviour* dan *overt behaviour* (perilaku nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain) dari pihak-pihak terkait dengan komunitas sasaran.

g. Faktor pemungkin perubahan (*Enabling factors*). Merupakan faktor yang mengikuti (*subsequent*) suatu perilaku dan menyediakan “imbalan” (*reward or incentive*) yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut. Faktor ini seringkali merupakan kondisi yang ada di lingkungan komunitas sasaran yang memfasilitasi meningkatnya ataupun dapat menghambat kinerja individual ataupun organisasi.

Untuk mengurangi hambatan-hambatan diatas, beberapa rekomendasi yang dapat pula menjadi faktor pendukung proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- 1 Hambatan yang ada dapat dikurangi jika komunitas dapat merasakan bahwa perubahan yang mereka lakukan bukanlah perubahan yang dilakukan oleh “orang luar”;
- 2 Hambatan dapat dikurangi jika proyek pengembangan masyarakat didukung baik oleh masyarakat dan para pemimpin puncak yang terkait;
- 3 Hambatan dapat dikurangi jika partisipan (warga komunitas) dapat melihat bahwa perubahan yang dilakukan dapat mengurangi beban yang mereka rasakan dan bukan sebaliknya;
- 4 Hambatan dapat dikurangi jika proyek atau program pengembangan masyarakat yang dijalankan sesuai (tidak bertentangan) dengan norma dan nilai dalam masyarakat;
- 5 Hambatan dapat dikurangi jika program pengembangan dapat menampilkan hal yang baru dan menarik minat warga masyarakat; dan
- 6 Hambatan dapat dikurangi jika warga masyarakat merasa bahwa otonomi dan “keamanan” mereka tidak terancam. (Adi, 2003 : 306-321)

BAB 3

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOGOR, KEBIJAKAN KOPERASI DAN PEMBIAYAAN MIKRO SERTA PROFIL KOPERASI BAIK

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Bogor

3.1.1. Kondisi Letak dan Batas Administratif

Kabupaten Bogor terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Bogor terletak antara 6° 18'0" - 6° 47'10" Lintang Selatan dan 106° 23'45" - 107° 13'30" Bujur Timur, yang berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan dengan aktifitas pembangunan yang cukup tinggi, serta memiliki luas ± 298.838,304 Ha, dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Depok/DKI Jakarta
- Barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak Propinsi Banten
- Timur : Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat
- Selatan : Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat

Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri dari 411 desa dan 17 kelurahan (428 desa/kelurahan), 3.639 RW dan 14.403 RT yang tercakup dalam 40 kecamatan. Jumlah kecamatan tersebut merupakan jumlah kumulatif setelah adanya hasil pemekaran 5 (lima) Kecamatan di tahun 2005, yaitu Kecamatan Leuwisadeng (pemekaran dari Kecamatan Leuwiliang), Kecamatan Tanjungsari (pemekaran dari Kecamatan Cariu), Kecamatan Cigombong (pemekaran dari Kecamatan Cijeruk), Kecamatan Tajurhalang (pemekaran dari Kecamatan Bojonggede) dan Kecamatan Tenjolaya (pemekaran dari Kecamatan Ciampea). Selain itu, pada akhir tahun 2006 telah dibentuk pula sebuah desa baru, yaitu Desa Wirajaya, sebagai hasil pemekaran dari Desa Curug Kecamatan Jasinga.

Iklim wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500 - 5.000 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20° - 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Selain itu, kondisi Topografi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan mayoritas pemukiman penduduk 72.66 persen berada di wilayah hamparan, 21.73 persen di lereng, dan 5.16 persen di lembah.

3.1.2. Kondisi Penduduk & Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor bertambah dari waktu ke waktu. Pada tahun 1961, ketika sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka, jumlah penduduk kabupaten Bogor sebanyak 1,314,156 jiwa. Pada Tahun 1971 penduduk kabupaten Bogor sebanyak 1,668.778 jiwa, tahun 1980 sebanyak 2,493,843 jiwa, tahun 1990 sebanyak 3,736,870, tahun 2000 sebanyak 3,508,826 jiwa, dan pada tahun 2010 berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk adalah 4.770.744 jiwa, yang terdiri atas 2.450.426 laki-laki dan 2.320.318 perempuan. Kecamatan Cibinong, Gunung Putri, dan Cileungsi adalah tiga kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 326.957 jiwa, 312.834 jiwa dan 246.041 jiwa. Sedangkan Kecamatan Cariu merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya yakni sebanyak 46.231 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Bogor sekitar 2.663,83 Km² yang didiami oleh 4.770.744 jiwa dan 1.243.072 KK (Kepala Keluarga), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebanyak 1.791 orang/ Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Ciomas (9.108 orang/ Km²), sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Tanjungsari (385 orang/Km²).

Sementara itu, data komposisi umur penduduk Kabupaten Bogor tahun 2007, yaitu usia 0-14 tahun sebanyak 1.209.386 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 2.871.380 jiwa, usia 65 tahun ke atas sebanyak 157.196 jiwa. Dari komposisi tersebut, angka beban ketergantungan 47,59 dimana dari 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 48 orang penduduk usia non produktif.

Jumlah penduduk dalam usia kerja (10-64 tahun) pada tahun 2007 berjumlah 3.334.930 orang, terdiri dari penduduk usia kerja (10-14 tahun) sebanyak 463.550 orang dan penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebanyak 2.871.380 orang. Dari penduduk usia kerja 10-14 tahun, terdapat sebanyak 6.489 orang atau 1,4 %, yang telah bekerja atau disebut sebagai pekerja anak. Sementara itu, pada penduduk usia kerja 15-64 tahun yang telah bekerja sebanyak 1.214.942 orang atau 42,31 %, yang tidak/belum bekerja, seperti mahasiswa/pelajar, ibu rumah tangga dan lainnya sebanyak 346.055 orang (12,05 %) dan yang sedang mencari kerja/pengangguran terbuka berjumlah sebanyak 459.167 orang (15,99 %). Sedang sisanya (29,65 %) merupakan pengangguran terselubung.

Sementara itu, jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, yaitu tamat SD/ sederajat sebanyak 1.810.208 orang (47,28 %), SLTP/ sederajat sebanyak 1.319.564 orang (34,47 %), SLTA/ sederajat sebanyak 549.871 orang (14,36 %), Diploma I/II sebanyak 30.618 orang (0,80 %), Diploma III/ Sarjana Muda sebanyak 31.018 orang (0,81 %), Diploma IV/ Sarjana (S-1) sebanyak 62.241 orang (1,63 %).

Menurut data Podes 2011, sumber penghasilan utama mayoritas penduduk Kabupaten Bogor bekerja di sektor pertanian (59.81%), kemudian pada sektor jasa dan industri (masing-masing 13.32%), sedangkan sektor perdagangan, angkutan, pertambangan, dan lainnya masing-masing 9,81%, 0.47%, 0.47%, dan 2.80%. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Bogor dengan komoditas padi sebagai andalan utama. Sedangkan komoditas lainnya menjadi sumber pendukung seperti yang diperlihatkan pada tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel. 3.1 Sumber Penghasilan Utama Penduduk Kabupaten Bogor

Sumber penghasilan	Jumlah	Persentase
Pertanian	256	59.81%
Pertambangan dan penggalian	2	0.47%
Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	57	13.32%
Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	42	9.81%
Angkutan, pergudangan, komunikasi	2	0.47%
Jasa	57	13.32%
Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	12	2.80%
Total	428	100.00%

Sumber : Telah diolah kembali (BPS, 2011)

Tabel. 3.2 Sumber Penghasilan Pertanian Penduduk Kabupaten Bogor

Jenis Komoditas	Jumlah	Persentase
Padi	168	39.25%
Palawija (jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian)	57	13.32%
Hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman obat-obatan)	19	4.44%
Perkebunan (cengkeh, kakao, sawit, dll)	2	0.47%
Peternakan (sapi, domba, ayam, dll)	1	0.23%
Perikanan budidaya (termasuk biota lainnya)	8	1.87%
Jasa pertanian (pembenihan, sewa traktor/mesin giling padi, dll)	1	0.23%
Lainnya	172	40.19%
Total	428	100.00%

Sumber : Telah diolah kembali (BPS, 2011)

Bila dilihat berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, maka jumlah KK yang bekerja sebagai petani sebesar 21,23 persen sedangkan jumlah buruh tani 13,36 persen.

3.1.3. Kondisi Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2007 mencapai Rp. 51,83 triliun, lebih besar dari pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 44,79 triliun. Sedangkan pendapatan per kapita menurut PDRB harga berlaku, pada tahun 2007 sebesar Rp. 12.230.072,-/kapita/tahun, sedangkan menurut PDRB harga konstan, sebesar Rp. 6.642.355,-/kapita/tahun. Kondisi struktur ekonomi Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2003-2007, bila dilihat berdasarkan nilai PDRB harga berlaku, maka kelompok sektor sekunder (industri manufaktur, listrik, gas dan air serta bangunan) memberikan kontribusi terbesar, yaitu rata-rata sebesar 70,01 %, kemudian sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa lainnya) dengan rata-rata sebesar 23,40 % dan kontribusi terkecil adalah dari sektor primer (pertanian dan pertambangan), yaitu rata-rata hanya 6,04 % dari total PDRB Kabupaten Bogor dan kontribusi dari sektor primer ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa telah terjadi perkembangan ekonomi yang relatif meningkat selama lima tahun terakhir pada sektor sekunder.

Jumlah usaha kecil menengah (UKM) yang dibina oleh Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar 276 % selama tahun 2003-2007, yaitu dari 997 usaha pada tahun 2003 menjadi 3.751 pada tahun 2007.

Kualitas kelembagaan UKM yang ada di Kabupaten Bogor tersebut ditunjukkan dengan hasil klasifikasi yang telah dilakukan, terhadap UKM yang ada di Kabupaten Bogor. Sampai dengan tahun 2007, berdasarkan kriteria permodalan dan omzet, dari 203 UKM yang dievaluasi, 37 UKM terklasifikasi sebagai UKM Unggul, 104 UKM Mandiri, dan 62 UKM Tangguh. Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, ditentukan langkah pembinaan yang perlu difasilitasi oleh Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor kepada UKM-UKM tersebut. Bagi UKM Mandiri, yang permodalannya di bawah 100 juta dan omzetnya di bawah 500 juta, fasilitasi dilakukan pada aspek permodalan dan teknik produksinya, sementara bagi UKM Tangguh, yang permodalannya di atas 200 juta dan omzetnya di atas 1 miliar, fasilitasi hanya dilakukan pada aspek pemasaran dan pengembangan kemitraan dengan UKM-UKM lainnya.

Perkembangan Koperasi Selama kurun waktu 2003-2007 telah terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 165 %, yaitu dari sebanyak 932 koperasi pada tahun 2003 menjadi 1.535 pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut, yang termasuk ke dalam koperasi aktif adalah sebanyak 1.183 unit pada tahun 2003, dan meningkat menjadi 1.115 pada tahun 2007. Sementara yang terdaftar sebagai anggota koperasi pada tahun 2003 adalah sebanyak 179.459 orang, dan meningkat 13 % pada tahun 2007, menjadi sebanyak 202.840 orang.

Seiring dengan peningkatan jumlahnya, telah terjadi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, yang ditunjukkan oleh pemenuhan klasifikasi dan kelas koperasi. Klasifikasi koperasi tersebut ditujukan untuk mengetahui kondisi keanggotaan (kualitas dan kuantitas), keuangan (permodalan dan sirkulasinya) serta penyelenggaraan RAT yang wajib untuk dilaksanakan setiap tahun sekali. Hal ini dilakukan sebagai upaya pembinaan dan dalam rangka mengetahui perkembangannya keaktifan koperasi tersebut.

3.2. Kebijakan Pemerintah terhadap Koperasi dan Pembiayaan Mikro

Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat telah menjadi salah satu fokus pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2002 – 2006. Di Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bogor, maka RPJM daerah tahun 2008-2013 salah satunya diorientasikan pada pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilakukan melalui optimalisasi sumber daya produktif dengan peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UKM sejalan dengan perkembangan dunia usaha, serta bangkitnya sentra industri, koperasi sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah.

Sejalan dengan amanat UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang salah satu penjabarannya diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, telah menguatkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dalam pengembangan perkoperasian. Sebagai bentuknya, pemerintah Propinsi Jawa Barat (Jabar) telah mengeluarkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM. Perda tersebut menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah se-Propinsi Jabar untuk menjalankan program-program dalam pengembangan koperasi di wilayahnya masing-masing. Seperti yang dikemukakan aparatur di Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUMKM Perindag) Kabupaten Bogor berikut ini :

Perda Jabar Nomor 10 tahun 2010 menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan program pengembangan koperasi di Kabupaten Bogor, baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha Koperasi. (JYA, 04 Jnui 2012)

Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup dalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi meliputi : kelembagaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pengawasan koperasi. Seperti yang diuraikan berikut ini :

1. Kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan sesuai amanat UU perkoperasian untuk melaksanakan pembinaan, fasilitasi pembentukan, dan pengesahan koperasi.
2. Pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan masyarakat berupaya menumbuhkan iklim usaha untuk pengembangan koperasi, salah satunya melalui pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bertujuan untuk :
 - a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi;
 - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat dan tepat; dan
 - d. membantu para pelaku usaha Koperasi untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
3. Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada setiap koperasi. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk memfasilitasi koperasi peningkatan produksi dan pemasaran, perluasan jaringan usaha dan penguatan sumberdaya manusia. Bentuk-bentuk kegiatannya melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru bagi para anggota koperasi.
4. Pengawasan, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui monitoring dan evaluasi dalam rangka untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Koperasi serta menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan yang telah dilakukan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pengembangan koperasi dan pembiayaan mikro berdasarkan aspek di atas, sangat terkait dengan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan propinsi. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah di buat sebelumnya, seperti diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Matriks Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Koperasi dan Pembiayaan Mikro

No	Aspek	UU	PP	Inpres	Perda
		Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian	Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi	Inpres nomor 18 tahun 1998 Pembinaan Koperasi (Instruksi Kepada Mentri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah	Perda Jawa Barat nomor : 10 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
1	kelembagaan koperasi : pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi	Pasal 9 Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.	-	Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh dan mandiri	Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan dan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas Kabupaten/Kota.
2	pemberdayaan Koperasi dan UMKM : penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan	Pemerintah melakukan upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi	-	Meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi di kalangan masyarakat disertai dengan pemberian kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya	Pasal 3 (2) Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM: a. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM; c. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM; dan d. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru.
3	pengembangan Koperasi dan UMKM : pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan kekuatan usaha KUKM	Pasal 60 (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim, kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.	-	Memperluas pangsa, dan memperkuat peran koperasi dalam kegiatan produksi dan distribusi nasional untuk menjamin perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha	Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah, meliputi : a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumberdaya manusia; dan d. desain dan teknologi.
4	pengawasan, monitoring dan evaluasi		Pasal 24 Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri.		Pasal 46 (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Daerah. Pasal 46 (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi berdasarkan tugas pembantuan.

Sumber : Telah diolah kembali

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) menurunkan kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam bentuk program dan kegiatan. Berdasarkan sasaran yang telah dirumuskan oleh Dinas Koperasi dan UKM, maka ditetapkan program kerja antara lain :

1. Peningkatan kelembagaan Koperasi dan UKM serta pengembangan Lembaga Gerakan Koperasi yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan kemampuan manajerial dengan teknis konsultasi manajemen Koperasi serta pengembangan jejaring kemitraan Koperasi dan UKM dengan BUMN dan dunia usaha lainnya; dan
3. Program fasilitas perkuatan permodalan Koperasi dan UKM melalui peningkatan akses kepada sumber pemodal.

Dengan melaksanakan program-program di atas, maka dinas menetapkan strategi sesuai dengan arah kebijakan yang diambilnya. Peran dinas selaku pelaksana kebijakan fokus pada memberikan pelayanan dalam mengelola dan mengkoordinasikan aktivitas perkoperasian. Aparatur mengemukakan berikut :

Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, saat ini ada tiga strategi yang dilakukan, yaitu : Pertama, memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor. Arah kebijakan yang ditetapkan yaitu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional. Kedua, peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi lokal dan daerah. Kemudian penguatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi program KUKM Arah kebijakan yang ditetapkan yakni memberdayakan industri kecil dan menengah yang ditekankan pada tiga hal, yaitu : peningkatan fasilitas dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah,

peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan perekonomian daerah. Ketiga, peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Arah kebijakan yang ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ekspor kami. (JYA, 04 Jnui 2012)

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di atas, Dinas KUKM Perindag Kabupaten Bogor menetapkan strategi yang digunakan dalam meperlancar proses pelaksanaannya di lapangan, yaitu melalui :

1. Mendayagunakan aparatur untuk mengatasi lemahnya penataan kelembagaan Koperasi dengan pendekatan penilaian klasifikasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan penyediaan informasi;
2. Mendayagunakan aparatur untuk meningkatkan sistem pengendalian internal koperasi melalui pendekatan fasilitasi bimbingan dan pembinaan;
3. Memfasilitasi Koperasi melalui penguatan permodalan dengan pendekatan dana bergulir.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja dari arah kebijakan dan strategi itu, Dinas KUKM Perindag telah menetapkan dan melaksanakan program dalam pengembangan koperasi. Seperti yang dikemukakan oleh petugas berikut ini :

Beberapa program yang telah dilakukan pada tahun 2011 kemarin di antaranya program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif melalui kegiatan fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah yang melibatkan 40 UKM, Kegiatan fasilitasi pendampingan bantuan sosial pupuk bagi petani di 30 koperasi, pembinaan dan pengawasan UKM berprestasi untuk di 35 koperasi, pelatihan manajemen dan kewirausahaan yang diikuti sekitar 100 UKM yang dilanjutkan dengan fasilitasi akses pembiayaan mikro bagi 100 UKM. (JYA, 04 Jnui 2012)

Melihat kebijakan, program dan strategi yang dijalankan, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki peranan yang cukup besar sebagai agen yang

Universitas Indonesia

memfasilitasi sekaligus katalisator dalam perkembangan koperasi. Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam hal pembiayaan mikro bagi pengembangan koperasi tergantung dari keseriusan aparaturnya Dinas KUKM Perindag yang setia mendampingi proses pelaksanaan program di masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh petugas berikut ini

Peranan kami umumnya mendampingi dalam peningkatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan. Kami memfasilitasi mereka tentang pemahaman cara pengelolaan koperasi dan mendorong peningkatan usaha, peranan ini merupakan amanat dari Kementerian Koperasi yang kami laksanakan dalam memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan mereka untuk perbaikan taraf hidupnya. (JYA, 04 Juni 2012)

Dinas KUKM Perindag Kabupaten Bogor selaku pelaksana kebijakan perkoperasian memiliki peran untuk mengaktualisasikan UU RI Nomor 25 Tahun 1992 dalam tataran empirik. Dengan mempertimbangkan kebijakan lainnya terkait implementasi pengembangan perkoperasian di wilayah Kabupaten Bogor, secara organisasional mendelegasikan kepada aparaturnya untuk melakukan operasionalisasi UU perkoperasian di wilayah kerjanya. Dengan memperhatikan Perda Jabar Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan mengacu pada UU perkoperasian, aparaturnya bekerja melakukan pemberdayaan dan pengembangan koperasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam program pembangunan daerah Kabupaten Bogor (Propeda).

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan koperasi terdiri dari aspek kelembagaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pengawasan. Keempat aspek ini menjadi dasar operasionalisasi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program pemberdayaan dan pengembangan koperasi di level kabupaten. Pada Tabel 3.3 telah diidentifikasi aturan-aturan yang terkait dengan keempat aspek yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam Tabel 3.3 dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar aturan yang terkait dengan keempat aspek telah termaktub dalam materi peraturan perundang-undangan tersebut. Hanya ada beberapa aspek yang dimuat dalam materi PP Nomor 9 Tahun 1995 dan Inpres Nomor 18 Tahun 1998, namun tidak

menghilangkan esensi dari proses pengembangan perkoperasian. Dengan demikian, mengacu pada hasil identifikasi aturan-aturan yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan perkoperasian, sebagian besar telah ditetapkan di level kebijakan sebagai pedoman dasar, acuan, strategi, dan kerangka tindakan yang dipilih aparatur dinas KUKM Perindag Kabupaten Bogor melaksanakan program perkoperasian di tingkat masyarakat. Untuk itu, Dinas KUKM Perindag Kabupaten Bogor telah menyusun program dan strateginya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan keempat aspek tersebut, masing-masing aspek memiliki program dan strategi pelaksanaannya yang bertujuan memudahkan bagi aparatur dinas menjalankan program sebagaimana diuraikan dalam matriks pada Tabel di bawah ini.

Tabel. 3.4. Matriks Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

No	Aspek	Implementasi Kebijakan	
		Program	Strategi
1	Kelembagaan	Peningkatan kelembagaan Koperasi serta pengembangan Gerakan Koperasi yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Mendayagunakan aparatur untuk mengatasi lemahnya penataan kelembagaan Koperasi dengan pendekatan penilaian klasifikasi, penilaian kinerja koperasi simpan pinjam dan penyediaan informasi
2	Pemberdayaan	Penguatan pembiayaan pada anggota koperasi melalui peningkatan akses kepada sumber-sumber pemodal.	Memfasilitasi Koperasi melalui penguatan permodalan dengan pendekatan dana bergulir.
3	Pengembangan	Fasilitasi peningkatan kemampuan manajerial Koperasi, serta pengembangan jejaring kemitraan Koperasi dan UKM dengan BUMN dan dunia usaha lainnya.	Mendayagunakan aparatur untuk meningkatkan sistem pengendalian internal koperasi melalui pendekatan fasilitasi bimbingan dan pembinaan
4	Pengawasan	Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengawasan usaha koperasi serta pemberian perlindungan hukum bagi koperasi dan anggota koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi • Pemberdayaan usaha koperasi • Pengembangan sistem perlindungan kepada koperasi

Sumber : Telah diolah kembali

Mencermati matriks yang diuraikan di atas, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan upaya pengembangan koperasi, termasuk di dalamnya pengembangan pembiayaan mikro yang menjadi kendala sebagian besar masyarakat di level komunitas pelaku usaha pedesaan.

Keterlibatan pelaku usaha kecil menghimpun dalam wadah koperasi merupakan subyek bagi dinas koperasi untuk diberdayakan dan difasiltasi dalam mengembangkan usahanya. Upaya tersebut pada kenyataannya memperoleh hasil yang membanggakan bagi masyarakat bahwa pada tahun 2011 Kabupaten Bogor memperoleh penganugerahan Koperasi Berprestasi tingkat Nasional untuk kategori Koperasi Produksi Terbaik.

Terlepas dari penganugerahan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor, upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan perkoperasian dan program pembiayaan mikro merupakan gambaran keberpihakan dan kepeduliannya dalam proses pembangunan masyarakat, khususnya bagi peningkatan usaha para pelaku usaha kecil yang mayoritas tinggal di pedesaan. Aparatur dinas yang betugas melakukan pemberdayaan dan pengembangan koperasi melakukan upaya-upaya fasilitasi dan koordinasi dengan koperasi-koperasi yang ada di wilayah kerjanya. Sebab peran-peran koperasi tersebut dianggap sebagai pelaku dalam mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Bogor. Peranan Koperasi BAIK yang diangkat dalam penelitian ini juga berperan sebagai pelaku operasionalisasi kebijakan perkoperasian, dimana koperasi ini juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan program pembiayaan mikro pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Bogor.

3.3. Profil Koperasi BAIK

Koperasi BAIK didirikan pada tahun 2008 sebagai lembaga mandiri yang dimiliki dan dikelola oleh anggota Ikhtiar. Proses pembentukan Koperasi BAIK dimulai tahun 2006, dimana Peramu mulai berupaya merumuskan kemandirian Program Ikhtiar sebagai lembaga otonom. Peramu melibatkan para fungsionaris KBMT, Baytul Maal (BM), dan Oxfam Novib¹ mendirikan koperasi yang fokus pada pemberdayaan berbasis komunitas dan memberikan pelayanan keuangan mikro secara khusus kepada anggotanya, yaitu para IRT dari keluarga miskin di

¹ Pada tahun 2000 Novib (lembaga donor negeri Belanda) bergabung ke *Oxford Family* (Oxfam) Belanda dan berubah nama menjadi Oxfam Novib. Sejak tahun 1999 sampai 2006, lembaga ini telah membangun kemitraan dengan Peramu dalam bentuk donasi pada program Ikhtiar. Kemitraan yang dibangun secara baik ini memperoleh sambutan dan kunjungan langsung Ratu Belanda kepada anggota layanan di Bogor tahun 2005. Menjelang berakhirnya kemitraan, Oxfam Novib dilibatkan dalam perumusan konsep program Ikhtiar menjadi lembaga yang mandiri.

pedesaan. Anggota koperasi merupakan kelompok sasaran program Ikhtiar yang memiliki potensi produktif dengan menjadi pelaku usaha mikro, seperti pedagang sayur di pasar atau pedagang sayur keliling, perajin/pemilik dan buruh bengkel sepatu, pedagang warung, pedagang makanan, petani kecil, buruh tani. Inilah perbedaannya dengan BMT yang hanya fokus memberikan pelayanan kepada pengusaha kecil dan menengah yang umumnya sudah memiliki skala usaha dan permodalan yang relatif besar. Visi Koperasi BAIK adalah menjadi organisasi keuangan mikro syariah yang memberdayakan masyarakat miskin melalui pelayanan simpan pinjam/pembiayaan, pendidikan, dan pengorganisasian. Visi ini dijabarkan dalam misi koperasi, yaitu :

1. Memperluas jangkauan pelayanan keuangan mikro syariah kepada masyarakat miskin
2. Melakukan pendampingan dan pelayanan secara berkelompok yang terorganisir
3. Membangun jaringan untuk memperkuat pelayanan dan pendampingan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pemerintah, Swasta, dan Perorangan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan koperasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Tercapainya pelayanan keuangan menjangkau 30.000 perempuan dari keluarga miskin di Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Sukabumi.
2. Terlaksananya pendidikan kader/kepemimpinan, Ekonomi/Usaha Rumah Tangga (ERT/URT) kepada 500 anggota
3. Tercapainya kelangsungan keuangan melalui diversifikasi produk dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) anggota
4. Terjalin kerjasama dan jaringan dengan 10 lembaga mitra strategis untuk sumber pendanaan, pertukaran pengetahuan hak-hak sosial dasar

5. Berkembang dan diterapkannya manajemen internal melalui penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP), *Management Information Systems* (MIS), Sistem Kepegawaian.

Kegiatan utama Koperasi BAIK saat ini memberikan pelayanan simpan pinjam yang dananya berasal dari memutar Dana Pihak Ketiga (DPK) anggota Koperasi, BPRS dan BMT serta beberapa lembaga donor swasta yang dahulu memberikan dana hibah untuk program Ikhtiar, seperti Yayasan Lentera 165/ESQ Jakarta, Mercy Corps Indonesia, Plan International, dan Oxfam Novib. Dalam perkembangannya, saat ini Koperasi BAIK memperoleh dana pinjaman dari Lembaga Keuangan yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, seperti : Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Sinar Mas Syariah. Koperasi juga membangun kemitraan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pekab) Bogor. Pada tahun 2008, koperasi memperoleh modal bergulir dari Pekab sebagai tambahan permodalan. Seluruh dana disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan akad bagi hasil, sedangkan dana dari BM sebagai dana pinjaman kebajikan kepada kelompok yang baru.

Upaya melaksanakan pelayanan yang terbaik kepada anggota merupakan jaminan bagi Koperasi BAIK memperoleh kepercayaan dari lembaga mitra. Kerjasama yang telah dilakukan menuntut koperasi untuk meningkatkan pelayanan dan pendampingan melalui usaha-usaha yang dapat menghidupkan keaktifan anggota di dalam berkoperasi. Adapun usaha-usaha koperasi sebagai berikut:

1. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
2. Menjalankan usaha perdagangan, khususnya menyediakan sembilan bahan pokok.
3. Simpan pinjam untuk melayani keperluan anggota khususnya yang memiliki usaha kecil.
4. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian, perekonomian, kesehatan.

5. Menyediakan bahan-bahan pertanian, perikanan, seperti : bibit, pupuk, benih.
6. Menjalankan usaha dalam bidang warung telekomunikasi dan bengkel.
7. Menyediakan pengadaan barang, jasa, dan lainnya.
8. Menjalankan usaha dalam bidang peragenan/perwakilan dari instansi pemerintah/lembaga atau perusahaan lain

Dalam melaksanakan usaha-usaha di atas, para anggota memandatkan kepada pengurus untuk melaksanakan pelayanan dan menjalin kerjasama dengan para pihak eksternal. Para pengurus dipilih melalui Rapat Pendirian Koperasi tahun 2008 yang disahkan di dalam Akta Notaris : N0. 115 Tanggal 31 Maret 2008 dengan struktur kepengurusan seperti gambar dibawah ini.

1. Pengawas
 - Ketua : Juhariah
 - Anggota : Hoerudin, Erna Indriastuti
2. Pengurus
 - Ketua : Latief Efendy
 - Wakil Ketua : Aziz Muhammad Abduh
 - Sekretaris I : Asep Zaenal Umami
 - Sekretaris II : Hifni Permadi
 - Bendahara : Titin Prasetyawati
3. Manajemen
 - Manajer : Titin Prasetyawati
 - Kabag. Operasional : Yachya Supriadi
 - Pembukuan : Dera Rahayu
 - Supervisi Wilayah : M. Syukur Sekarmaji, Imam Iskandar, Yadi Mulyadi, Dini Yusron
 - TPL : 47 Orang



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi BAIK

Sumber : Koperasi BAIK (2012)

Tugas pengurus adalah membuat beberapa kebijakan sebagai pedoman pelayanan koperasi yang tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban anggota, strategi pengembangan koperasi, dan pedoman operasi standar (SOP) pelayanan. Hal ini dibuat sebagai acuan bagi anggota dan pengurus untuk mengembangkan dan memajukan koperasi sebagai wahana meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Adapun hak dan kewajiban Anggota sebagai berikut :

Hak Anggota :

1. Memperoleh Pelayanan dari Koperasi
2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota
3. Memiliki hak suara yang sama
4. Mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi
5. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Kewajiban Anggota :

1. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Rapat Anggota

2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi
3. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi
4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Untuk menjamin keberlangsungan manfaat Koperasi kepada anggotanya, maka pengurus Koperasi BAIK menyusun kebijakan dalam membangun suatu kelembagaan ekonomi yang mengutamakan partisipasi aktif anggotanya. Kebijakan pengembang Koperasi BAIK, yaitu :

1. Mampu menjangkau lebih banyak orang miskin pada skala bisnis yang berkelanjutan secara finansial.
2. Pelayanan dapat diakses oleh usaha mikro dan IRT dari keluarga miskin. Proses pelayanan membuka ruang untuk proses pembelajaran, sehingga wawasan mereka lebih terbuka dan mampu melakukan perubahan dalam menghadapi persoalan-persoalan mereka.
3. Memadukan atau mengintegrasikan pendampingan masyarakat dan URT syariah kepada para IRT
4. Pendayagunaan sumber dana dari BM membuka peluang partisipasi sumber-sumber dana lain dari swasta dan pemerintah, baik dalam bentuk investasi maupun hibah.

Dalam merealisasikan kebijakan pengembangan koperasi tersebut, pengurus telah menyusun beberapa strategi sebagai prosedur standar pelayanan mengacu pada beberapa pedoman standar yang sudah berhasil diterapkan, seperti : *Grameen Bank*, Program Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), metode pengelolaan keuangan syariah dan panduan yang dikeluarkan oleh CGAP (*Consultative Group to Assist the Poor*), semuanya dipadukan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh di lapangan. Perpaduan pedoman standar dari LKM tersebut didasarkan pada keberhasilan mereka melaksanakan pelayanan dan manajemen keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengurus belajar dari LKM ini dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan koperasi dengan

mengedepankan akuntabilitas dan transparansi pengeolaan keuangan anggota koperasi. Pedoman standar ini disesuaikan dengan pengalaman pelayanan di lapangan dengan melibatkan anggota sebagai pengontrol dan memberi masukan saat laporan pertanggung jawaban pengurus di sampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).Berikut Prosedur Operasi Standar (SOP) Koperasi BAIK :

1. Sistem dan Prosedur Pelayanan Anggota, yang terdiri dari transaksi kas dan brankas, pembentukan dan pembubaran majlis, mutasi anggota, pertemuan majlis, pelayanan pinjaman atau pembiayaan, serta kebijakan dana infak dan dana *sasarengan* (sumbangan) anggota.
2. Sistem dan Prosedur Pendukung Operasional, yang terdiri dari administrasi pra penyaluran, audit transaksi lapangan, monitoring prestasi pinjaman, penanganan pinjaman bermasalah, cadangan pinjaman berisiko, dan penghapusan pinjaman (*write-off*).
3. Sistem dan Prosedur Keuangan dan Auditing, yang terdiri dari manajemen akuntansi keuangan, manajemen dana, penilaian kinerja dan kesehatan keuangan, internal audit, standar pelaporan, dan sebagainya.

Berdasarkan SOP yang telah disusun, pengurus melibatkan supervisor dan Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) untuk membantu pelaksanaannya di lapangan. Tugas utama supervisor dan TPL yaitu melaksanakan di lapangan sesuai dengan SOP yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) tahapan, yaitu :

1. Pemilihan Wilayah Sasaran

Penentuan wilayah sasaran pelayanan koperasi BAIK berdasarkan kajian wilayah yang masuk dalam kategori yang berpenduduk miskin. Penentuan wilayah diawali dengan melakukan pengkajian yang mendalam untuk melihat semua keadaan wilayah tersebut, diantaranya : mata pencaharian penduduk, pendidikan, dan infrastruktur. Pengkajian wilayah ini dilakukan oleh beberapa petugas suvervisor dan TPL yang bertugas melakukan pengkajian awal mengenai kondisi wilayah yang akan dijadikan sasaran pelayanan.

Tujuan pengkajian wilayah untuk menilai kelayakan program masuk ke dalam wilayah baru tersebut. Proses pengkajian wilayah diawali dengan observasi

wilayah oleh petugas untuk mengumpulkan informasi lapangan dan dokumen data mengenai kesejahteraan penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti BPS, Dinas Kependudukan, BKKBN, Bappeda, dan sebagainya. Kegiatan selanjutnya adalah menyusun analisa kelayakan yang terdiri dari sketsa wilayah, pendataan potensi wilayah dan rekomendasi kegiatan persiapan sosial.

Selain itu, petugas mulai berinteraksi dengan penduduk di sekitar wilayah tersebut guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai kondisi masyarakat di wilayah itu. Aktivitas keseharian yang dilakukan penduduk dapat dijadikan informasi awal mengenai pola hidup masyarakat, hal ini sebagai dasar acuan bagi pelaksana program untuk melihat waktu yang digunakan penduduk dalam mengisi kehidupannya, misalnya : waktu bekerja, waktu berinteraksi dengan tetangga, waktu kegiatan di masyarakat, dan sebagainya. Aktivitas penduduk penting diketahui karena jika program berjalan di wilayah ini, maka pelaksana program akan melaksanakan pelayanan di luar waktu yang telah mereka lakukan sebelumnya, sehingga tidak mengganggu aktivitas penduduk. Hasil pengkajian tersebut dibahas dalam oleh rapat pengurus sehingga dapat diputuskan rencana tindak lanjut. Bila sebuah wilayah dianggap layak maka segera disusun Rencana Kerja Anggaran yang kemudian divalidasi oleh rapat pengurus.

2. Persiapan Sosial

Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam persiapan sosial antara lain: kunjungan dan diskusi dengan tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh seperti kepala desa, ketua RT/RW, tokoh agama; presentasi pada acara-acara pertemuan warga seperti pengajian, kelompok Posyandu dan kelompok arisan. Dalam tahap ini petugas menjelaskan secara jelas tujuan pelayanan koperasi di desa, serta menjelaskan kelompok sasaran yang akan diterima. Bersamaan dengan sosialisasi, petugas memberikan sebuah formulir yang berisi biodata dan pendapatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya : penghasilan, kebutuhan keluarga dan tujuan mengikuti program. Setelah itu, formulir dijadikan informasi awal untuk memperoleh hasil yang akurat melalui proses Uji Kelayakan (UK).

3. Penerimaan Anggota Ikhtiar

Proses penerimaan anggota dilakukan dengan membentuk kelompok dan majelis.² Proses penerimaan anggota dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu : UK dan Latihan Wajib Kelompok. Tahapan UK dilakukan dengan melakukan wawancara langsung berdasarkan formulir yang telah diisi oleh calon anggota. Kondisi rumah, pendapatan & kemampuan menabung, serta aset rumah tangga. Rumah tangga yang dikategorikan tidak miskin atau rumah tangga miskin tanpa sumber pendapatan tidak menjadi target pelayanan. Rumah tangga yang lulus dalam uji kelayakan akan mengikuti Latihan Wajib Kelompok (LWK) selama tiga hari berturut-turut dengan lama pertemuan maksimum 1 jam. Ada pun materi yang diberikan dalam LWK adalah sebagai berikut:

- a. Hari pertama berisi pengenalan program dengan menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan program.
- b. Hari kedua berisi penjelasan mengenai produk-produk Koperasi BAIK yang meliputi beberapa macam jenis tabungan atau simpanan dan pinjaman, pengenalan dan penjelasan ikrar anggota.
- c. Hari ketiga penjelasan mekanisme yang akan dilakukan oleh anggota, yang meliputi cara meminjam, cara menabung, latihan tanda tangan bagi yang belum terbiasa dan sebagainya.

Seluruh calon anggota wajib hadir dalam LWK ini. Jika ada salah seorang yang tidak bisa hadir maka pertemuan dibatalkan dan digeser ke minggu depannya. Hal ini bertujuan untuk memupuk kekompakan dan komitmen calon anggota terhadap kelompok/majelis. Apabila lulus dalam latihan wajib ini maka majelis telah terbentuk dan semua anggota berhak atas pinjaman.

4. Pelayanan Pinjaman dan Tabungan

Pelayanan pinjaman difasilitasi oleh TPL dan diberikan secara bergiliran dengan urutan 2-2-1 dalam kelompok kecil. Maksudnya, dalam sebuah kelompok

² Setiap kelompok kecil terdiri dari 5 (lima) orang. Setiap majelis terdiri dari 4 -5 kelompok kecil. Majelis dibentuk berdasarkan wilayah terkecil dalam desa, baik RT, RW, atau Kampung/Dusun. Tujuannya untuk memudahkan pelayanan kepada anggota.

yang beranggotakan 5 orang, pinjaman diberikan secara bergilir kepada 2 orang pertama, kemudian 2 orang kedua dan 1 orang terakhir. Orang yang mendapat giliran terakhir adalah ketua kelompok. Pemilihan ketua kelompok diserahkan kepada anggota kelompok.

Pengajuan pinjaman oleh anggota dilakukan dalam pertemuan majlis. Calon peminjam harus berbicara di depan anggota majlis dan TPL mengenai besaran jumlah uang yang akan dipinjam dan pemanfaatan pinjaman. Setelah itu anggota yang lain memberikan berbagai saran dan masukan, baik yang bersifat dukungan maupun penolakan. Tahap ini bisa berlangsung alot karena pinjaman diberikan dengan sistem tanggung renteng.

Setiap tahun anggota berhak atas 2 kali pinjaman, pinjaman berikutnya dapat diberikan apabila umur pertemuan minimal 25 kali dalam masa angsuran. Pinjaman pertama Rp. 300 ribu. Kenaikan jumlah pinjaman diberikan secara bertahap menjadi Rp. 500 ribu, Rp. 750 ribu, dan maksimum Rp. 1 juta dengan mempertimbangkan disiplin kehadiran, disiplin angsuran dan disiplin tabungan, serta kesepakatan tanggung renteng oleh anggota lainnya.

Bagi anggota yang memperoleh pinjaman putaran kedua atau seterusnya, diberikan fasilitas asuransi kecelakaan dan kematian. Sebab di dalam angsuran ada biaya premi yang dibayarkan setiap minggunya. Jika anggota mendapat pinjaman Rp. 500.000,- maka ia membayar angsuran Rp. 10.000,- ditambah biaya premi dan administrasi sebesar Rp. 2.500,- perminggu. Jadi total yang dibayarkan anggota setiap minggunya Rp. 12.500,-. Upaya intervensi program pelayanan ini bukan sebatas pada transaksi keuangan saja, melainkan upaya pelayanan jaminan sosial kepada anggotanya, sehingga program yang dirancang dan dijalankan ini memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Fasilitas asuransi jarang diperoleh bagi keluarga miskin, kecuali bagi mereka yang bekerja sebagai buruh industri. Namun dalam pelayanan ini, keluarga miskin memperoleh akses jaminan sosial dan permodalan sebagai upaya untuk memberikan jaminan hidup di masa depan.

Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 50 minggu. Namun diperbolehkan pula bagi anggota yang ingin melunasi pinjaman kurang dari 50 minggu. Setelah pinjaman pertama dilunasi anggota dapat mengajukan pinjaman

Universitas Indonesia

yang kedua. Pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan rutin majlis. Kegiatan ini selalu disertai dengan penyetoran simpanan atau tabungan dan infaq, yaitu iuran sukarela yang akan digunakan untuk membantu anggota yang tertimpa musibah. Ada 3 jenis tabungan, yaitu:

- a. Tabungan wajib yang besarnya bervariasi tergantung dari besarnya pinjaman. Tabungan wajib baru bisa diambil pada saat anggota kelompok keluar dari keanggotaan. Seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Skema jumlah tabungan wajib yang harus disetorkan

No	Besar Pinjaman (Rp)	Besar Tabungan (Rp.)
1	300.000 - 600.000	200
2	700.000	250
3	1.000.000	400
4	1 - 5 Juta	1000

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2012)

- b. Tabungan sukarela yang besarnya tidak ditentukan tergantung kemampuan finansial anggota.
- c. Tabungan kelompok adalah tabungan yang dihimpun oleh anggota dan dicatat atas nama kelompok kecil yang berjumlah 5 orang. Besarnya tabungan yang harus disetor oleh masing-masing anggota bervariasi tergantung besarnya pinjaman. Seperti halnya tabungan wajib, Tabungan wajib baru bisa diambil pada saat anggota kelompok keluar dari keanggotaan. Di bawah ini adalah tabel skema besarnya tabungan kelompok yang harus disetorkan oleh masing-masing anggota sesuai pinjamannya :

Tabel 3.6 Skema jumlah tabungan kelompok yang harus disetorkan

No	Besar Pinjaman (Rp)	Besar Tabungan (Rp.)
1	300.000 - 600.000	300
2	700.000	500
3	1.000.000	600
4	1 - 5 Juta	2000

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2012)

5. Pertemuan Rutin Majelis

Pertemuan majelis merupakan wadah interaksi sosial ekonomi antar anggota, kelompok, dan TPL yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota dan dilaksanakan setiap minggu. Dalam majelis tersebut para IRT berkumpul dan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ketua majelis memimpin pembukaan majelis, kemudian membacakan ikrar bersama-sama. Setelah itu, TPL membuka majelis dan langsung melakukan pengabsenan majelis. Dari absen itu, TPL bersama anggota mengetahui anggota yang tidak hadir, jika ada yang tidak hadir, maka kelompoknya memberikan informasi alasan anggotanya tidak hadir.

Kehadiran anggota menjadi salah satu kedisiplinan kelompok. Jika ada anggota yang tidak hadir karena alasan terkena musibah, maka anggota kelompok lain harus membantu melalui tabungan kelompok yang disimpan setiap kali pertemuan majelis. Selain itu, ketua majelis memimpin do'a bersama untuk anggotanya yang terkena musibah tersebut, dan jika dibutuhkan anggota kelompok lain membantunya sesuai dengan kemampuannya, misal : sumbangan baik yang berbentuk materi maupun non-materi. Kebiasaan ini selalu ditanamkan di dalam majelis untuk semua wilayah, kepedulian terhadap sesama anggota majelis merupakan hal yang utama dalam membangun solidaritas kelompok. Sehingga pertemuan majelis merupakan wahana interaksi setiap anggota untuk saling berkomunikasi antar sesamanya, maka disinilah letak penguatan kapasitas sosial dalam program layanan ini.

6. *Monitoring* Kinerja Majelis

Monitoring didasarkan pada data prestasi majelis dan informasi lapangan dari TPL. Data pendukung tentang kinerja majelis berupa prestasi angsuran, tabungan, dan kehadiran anggota diberikan oleh bagian operasional setiap bulan. Data tersebut menjadi bahan pembahasan dalam rapat monitoring kinerja majelis untuk memetakan kualitas majelis dan memberikan rekomendasi kegiatan pendampingan. Perkembangan kegiatan pendampingan dimonitor dalam *briefing* harian, mingguan dan bulanan. Rapat bulanan membahas laporan dan proyeksi finansial, perkembangan kinerja majelis/kelompok, serta evaluasi dan rencana

pendampingan, sedangkan rapat mingguan dilakukan sebagai monitoring kinerja tenaga lapangan.

7. Perencanaan dan Evaluasi Pelayanan

Perencanaan dan evaluasi pelayanan Koperasi BAIK dilakukan selama satu kali dalam setahun melalui suatu lokakarya yang menghasilkan rumusan program tahunan yang diterjemahkan menjadi rencana kegiatan dan anggaran tahunan (*annual working plan & budget*), serta proyeksi finansial. Selain pelayanan pinjaman dan tabungan serta pertemuan rutin majlis yang diadakan seminggu sekali, pengurus Koperasi BAIK juga memberikan beragam pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota majlis, seperti pelatihan kesehatan bayi dan ibu hamil, pelatihan kesehatan gizi, pelatihan pencegahan penyakit demam berdarah, pelatihan *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ), pelatihan manajemen keuangan rumah tangga dan lain-lain. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung program dalam mencapai tujuan (jangka pendek) yang diinginkan sebagai hasil yang diperoleh secara langsung. Ada pun hasil yang ingin dicapai oleh Koperasi BAIK, yaitu :

- a. Meningkatkan jumlah tabungan anggota
- b. Meningkatkan pendapatan rumahtangga
- c. Meningkatkan asset rumah tangga
- d. Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga
- e. Meningkatkan kemampuan rumah tangga menaggulangi hal-hal darurat.

Perkembangan pelayanan Koperasi BAIK tidak dilepaskan dari pelaksanaan program Ikhtiar tahun 1999 – 2008. Program yang dirancang untuk memberikan akses permodalan melalui pelayanan simpan pinjam kepada IRT miskin di desa, berdampak pada peningkatan jumlah anggota, penyaluran pinjaman, dan tabungan anggota. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di Bawah ini :

1. Perkembangan Jumlah Anggota Layanan

Perkembangan pelayanan Koperasi BAIK mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari sisi jumlah anggota, tabungan, dan pembiayaan. Pada tahun

2010, dana yang digulirkan kepada anggota lebih dari Rp. 6 miliar dengan jumlah tabungan sekarela Rp. 600 juta, diiringi dengan peningkatan jumlah anggota sebanyak 6.888 orang (480 majelis). Seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi BAIK

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
	3,003	3,572	5,190	5,849	6,888
	199	237	346	410	480
	321,618	372,853	420,452	385,443	692,665

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2010)



Gambar 3.2. Jumlah Anggota Koperasi BAIK

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2010)

2. Perkembangan Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi BAIK dalam kurun waktu tahun 2007 – 2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007, dana yang disalurkan mencapai Rp. 1,6 Milyar dan meningkat secara signifikan menjadi Rp. 6,2 Milyar di tahun 2010. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah anggota Koperasi BAIK yang mengikuti program

pembiayaan mikro. Sejalan dengan tujuan program, bahwa penyaluran pembiayaan difokuskan pada masyarakat miskin yang tidak mampu mengakses permodalan untuk membiayai usaha produktif. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.8 dan 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.8 Jumlah Penyaluran Pembiayaan ke Anggota Koperasi BAIK

Tahun	2007	2008	2009	2010
Jumlah Anggota	3.480	4.993	5.493	6.888
Jumlah Nominal (Rp.)	1.678.950.000	2.729.500.000	3.953.050.000	6.164.350.000

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2010)

Tabel 3.9. Sektor Usaha Anggota yang Memperoleh Pembiayaan Pembiayaan tahun 2010

	Sektor usaha	Nominal (Rp.)	%
	Perdagangan	1,688,300,000	27.39%
	Pertanian	417,550,000	6.77%
	Home Industri	150,400,000	2.44%
4.	Jasa	142,850,000	2.32%
5.	Bangunan Rumah	2,065,450,000	33.51%
6.	Pendidikan	977,550,000	15.86%
7.	Kesehatan	276,950,000	4.49%
8.	Asset	384,450,000	6.24%
	Lain-lain	60,850,000	0.99%
	TOTAL	6,164,350,000	100

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2010)

Peningkatan yang cukup signifikan ini tidak terlepas dari proses pendampingan yang berkelanjutan kepada anggota layanan. Mekanisme penguatan kelompok sebagai wadah pengorganisasian di tingkat pelayanan yang paling kecil menjadi kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan. Peran-peran yang dilakukan TPL sebagai pendamping bukan hanya melakukan transaksi keuangan saja, melainkan menanamkan interaksi dan partisipasi setiap anggota menguatkan kelompoknya. Jadi, pelayanan keuangan sebagai sarana dalam melakukan proses pemberdayaan komunitas perempuan di pedesaan.

3.4. Profil Anggota Koperasi BAIK

Berikut ini adalah profil singkat anggota Koperasi BAIK sebagai peserta program pembiayaan mikro. Profil ini berisi data-data yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan kategori pendapatan yang disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan narasi. Bentuk penyajian narasi

dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan deskripsi yang lebih lengkap tentang kehidupan para anggota Koperasi BAIK.

Latar belakang pendidikan anggota Koperasi BAIK penting untuk ditampilkan karena pendidikan dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi anggota. Pendidikan yang rendah identik dengan kebodohan dan kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang memberikan pelayanan akses pembiayaan secara khusus kepada anggota dari rumah tangga miskin. Semua anggota Koperasi BAIK adalah para Ibu Rumah Tangga (IRT) dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Namun keterlibatan mereka dalam program wajib memperoleh ijin dari suami, sebab suami dalam hal ini juga ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan saat pertama kali istri mengajukan diri menjadi anggota, sehingga akan terjalin komunikasi yang bertujuan agar mereka mampu merumuskan masa depan keluarganya. Dengan demikian, latar belakang pendidikan suami dan istri menjadi relevan untuk ditampilkan dalam sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.10. Tingkat Pendidikan Istri (anggota) dan Suami

Pendidikan	Istri (Anggota)		Suami	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Akademi/PT	22	0.36%	47	0.76%
Kursus	1	0.02%	1	0.02%
Pesantren	16	0.26%	31	0.50%
Sekolah Dasar (SD)	4299	69.44%	3713	59.97%
SLTA	336	5.43%	607	9.80%
SLTP	613	9.90%	589	9.51%
Tdk Sekolah	531	8.58%	290	4.68%
Lainnya	373	6.02%	913	14.75%
Total	6191	100.00%	6191	100.00%

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2011)

Data di atas menggambarkan tingkat pendidikan anggota Koperasi BAIK. Dari 6.191 anggota, sekitar 70 persen anggota masuk dalam kategori berpendidikan rendah, dimana mereka hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan SD. Hal ini diikuti pula pendidikan suami, dimana sekitar 70 persen suami anggota juga sampai jenjang pendidikan SD. Sedangkan

untuk jenjang pendidikan lebih tinggi yang dimiliki oleh anggota dan suaminya rata-rata kurang dari 20 persen. Kondisi ini diakui oleh salah satu anggota.

Saya sekolah hanya sampai kelas satu SD. Kan orang tua nggak mampu gitu. Kata bapa saya sudahlah nggak usah sekolah nggak ada biayanya, bantu kerja saja semampunya di sawah. Ya sudah saya berhenti sekolah. (WRI, 29 Mei 2012)

Rendahnya pendidikan anggota merupakan sasaran program Koperasi BAIK, dengan harapan keberadaan program ini juga mampu memberikan arahan merubah pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan bagi keluarga dan taraf hidupnya di masa depan.

Faktor sosial dan ekonomi masyarakat merupakan penyebab pendidikan anggota dan keluarganya dikategorikan rendah. Dari sisi sosial ditemukan bahwa masyarakat di lingkungan mereka tidak memperhatikan pentingnya pendidikan, mereka lebih memilih bekerja untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu, kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat (Aparatur Desa, Tokoh Agama, Guru) untuk memotivasi mereka melanjutkan sekolah, sebab peran tokoh masyarakat di desa sangat penting yang mampu mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih memilih dan meminta anak-anaknya untuk bekerja untuk menghasilkan pendapatan membantu ekonomi.

Fenomena di atas dapat dikatakan wajar jika dilihat dari faktor kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini juga dirasakan oleh keluarga anggota Koperasi BAIK, dimana 61 persen anggota bekerja sebagai ibu rumah tangga saja yang hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan suaminya, dimana suami mereka sekitar 36% bekerja sebagai buruh tani dan pabrik (Tabel 3.11). Namun ada juga anggota yang karena keadaan ekonominya kurang mampu (kurang dari 10 persen), mereka memutuskan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga seperti pembantu rumah tangga, pedagang, buruh tani, pabrik, dan sebagainya. Aktivitas tersebut seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.3.

Pekerjaan suami pada Tabel tersebut menggambarkan ada juga dari mereka yang bekerja sebagai pedagang (14,4 %), wiraswasta dan supir (masing-masing 7%), sedangkan lainnya ada yang bekerja sebagai petani, PNS, karyawan, dan bahkan sekitar 15 persen ada yang tidak menetap pekerjaannya (lainnya). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembagian kerja antara suami dan isteri masih dikatakan relatif rendah yang diperlihatkan masih tingginya anggota yang bekerja sebagai IRT saja, walaupun masih ada kegiatan usaha yang dijalankan oleh anggota untuk mencari nafkah membantu perekonomian keluarga, namun hasilnya belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga.



Gambar 3.3. Anggota yang Bekerja sebagai Buruh Sayuran di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang – Kabupaten Bogor

Sumber : Dokumentasi Koperasi BAIK (2012)

Banyaknya anggota yang mengandalkan penghasilan dari usaha suami, menyebabkan pendapatan rumah tangga dikatakan relatif rendah. Jika mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Bogor, ditemukan sekitar 80 persen anggota dan suaminya dikategorikan sebagai keluarga yang berpenghasilan rendah, dimana pendapatan atas usaha yang dijalankan kurang dari Rp. 1 Jt./bulan. Sedikit sekali anggota dan sumaniya yang masuk dalam kategori penghasilan sedang (9,4% dan 11,27%), sedangkan anggoya yang penghasilannya tinggi masing-masing 10,48 persen dan 7 persen. Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel. 3.11. Jenis Pekerjaan Istri (Anggota) dan Suami

Jenis Pekerjaan	Anggota		Suami	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Buruh	626	10.11%	2223	35.91%
Guru	22	0.36%	21	0.34%
Ibu Rumah Tangga	3788	61.19%	60	0.97%
Jasa	35	0.57%	427	6.90%
Karyawan	18	0.29%	121	1.95%
Pedagang	809	13.07%	889	14.36%
Pegawai Negeri	6	0.10%	83	1.34%
Pembantu Rumah Tangga	135	2.18%	0	0.00%
Pensiunan	10	0.16%	33	0.53%
Petani	80	1.29%	517	8.35%
Sopir	11	0.02%	451	7.28%
Wiraswasta	235	3.80%	436	7.04%
Lainnya	426	6.88%	930	15.02%
Total	6191	100.00%	6191	100.00%

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2011)

Tabel. 3.12. Kategori Pendapatan (Anggota) dan Suami

Kategori Pendapatan	Istri (Anggota)		Suami	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Rendah (< Rp. 1 Jt)	4960	80.12%	5066	81.83%
Sedang (Rp. 1 Jt > < Rp. 3 Jt)	582	9.40%	698	11.27%
Tinggi (> Rp. 3 Jt)	649	10.48%	427	6.90%
Total	6191	100.00%	6191	100.00%

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2011)

Tabel di atas menggambarkan bahwa keterkaitan antara pekerjaan dengan penghasilan berkorelasi positif. Hal ini dibuktikan oleh pekerjaan anggota dan suaminya yang mayoritas sebagai IRT dan buruh menyebabkan mereka dikatakan sebagai keluarga yang berpenghasilan rendah, walaupun mereka memiliki usaha yang relatif kecil, namun belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

BAB 4

TEMUAN LAPANGAN

Proses pemberdayaan masyarakat pada program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK pada dasarnya sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Koperasi BAIK dan Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan saling berkoordinasi dalam kegiatan pengembangan koperasi di Kabupaten Bogor. Program pembiayaan mikro yang dilaksanakan koperasi BAIK merupakan bentuk peran partisipasi masyarakat membantu pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, bagian ini menyajikan temuan lapangan terhadap proses pemberdayaan masyarakat melalui program pembiayaan mikro serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan program sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.1. Proses Pemberdayaan pada Program Pembiayaan Mikro

Mencermati rendahnya kondisi sosial ekonomi yang dihadapi oleh anggota (Bab III : 88 – 92), Koperasi BAIK memberikan pelayanan pembiayaan mikro melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dapat dikatakan efektif yang dilakukan melalui proses pendampingan. Peran *Community Worker* (tenaga pendamping) memfasilitasi kegiatan di tingkat kelompok agar mereka mampu merumuskan masa depannya sendiri. Mengingat pemberdayaan sebagai proses, maka dibutuhkan tenaga pendamping yang setia memberikan pelayanan kepada anggota. Untuk itu, Koperasi BAIK memiliki kebijakan untuk menguatkan kapasitas tenaga pendamping agar mereka mampu memfasilitasi program pemberdayaan. Seperti yang dikemukakan oleh pengurus berikut ini :

Tetap, dalam pelaksanaan program kami lakukan melalui pendampingan supaya yang mengurus simpan-pinjam di kelompok. Walau kami udah jadi Koperasi, nilai dan semangat dampingi anggota sudah jadi ruh nya yang kami peroleh dari Peramu sejak program ini dimulai tahun 1999 (LTF, 09 Maret 2012)

Koperasi BAIK saat ini memiliki tenaga pendamping yang terdiri dari : Supervisor (Koordinator wilayah) dan Tenaga Pendamping Lapangan (TPL). Saat ini Supervisi berjumlah 8 (delapan) orang, sedangkan TPL berjumlah 46 orang. Sebagai tenaga pendamping, mereka memiliki gambaran tugas pokok yang berbeda namun mengedepankan kerjasama dalam koordinasi dan konsolidasi. Dalam kapasitasnya sebagai tenaga pendamping, masing-masing memiliki perbedaan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan lamanya kerja. Namun hal itu belum menjamin, sebab dalam proses pendampingan ternyata yang lebih menentukan kapasitas tenaga pendamping adalah kemauan keras untuk belajar bersama dengan kelompok. Ada beberapa pendamping yang sudah lama kerja namun dalam hal pengetahuan dan pengalamannya masih relatif lebih baik dibandingkan dengan tenaga pendamping yang baru. Proses belajar antar pendamping menjadi fokus utama Koperasi dalam bentuk tukar pengetahuan dan pengalaman, melalui pertemuan rutin tersebut para pendamping saling belajar.

4.1.1. Perekrutan Tenaga Pendamping

Perekrutan tenaga pendamping dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu : eksternal dan internal. Perekrutan jalur eksternal dilakukan melalui proses lamaran kerja, dimana Koperasi mengumumkan lowongan kerja TPL lewat media massa dalam menjaring pelamar yang siap bekerja sebagai tenaga pendamping. Pelamar berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, ada yang dari perguruan tinggi, SMP, SMA, dan pondok pesantren. Para pelamar diminta mengirimkan surat lamaran dan beberapa persyaratan lain kepada pengurus Koperasi, setelah itu pelamar yang lolos seleksi administrasi akan dipanggil untuk melakukan proses wawancara. Bagi pelamar yang lolos seleksi wawancara diterima sebagai tenaga pendamping. Namun ada beberapa tahap yang harus dilalui sampai diangkat menjadi pekerja tetap, yaitu masa pelatihan, kontrak, dan karyawan tetap. *Tahap pertama*, tenaga pendamping wajib melalui masa pelatihan selama 3 bulan, mereka akan ditempatkan di berbagai wilayah pelayanan dengan didampingi oleh Supervisi dan TPL lainnya untuk mengetahui dan melaksanakan tugas dan peran yang dijalankan. Dalam masa pelatihan, mereka memperoleh kompensasi berupa uang operasional lapangan dan asuransi sebagai modal

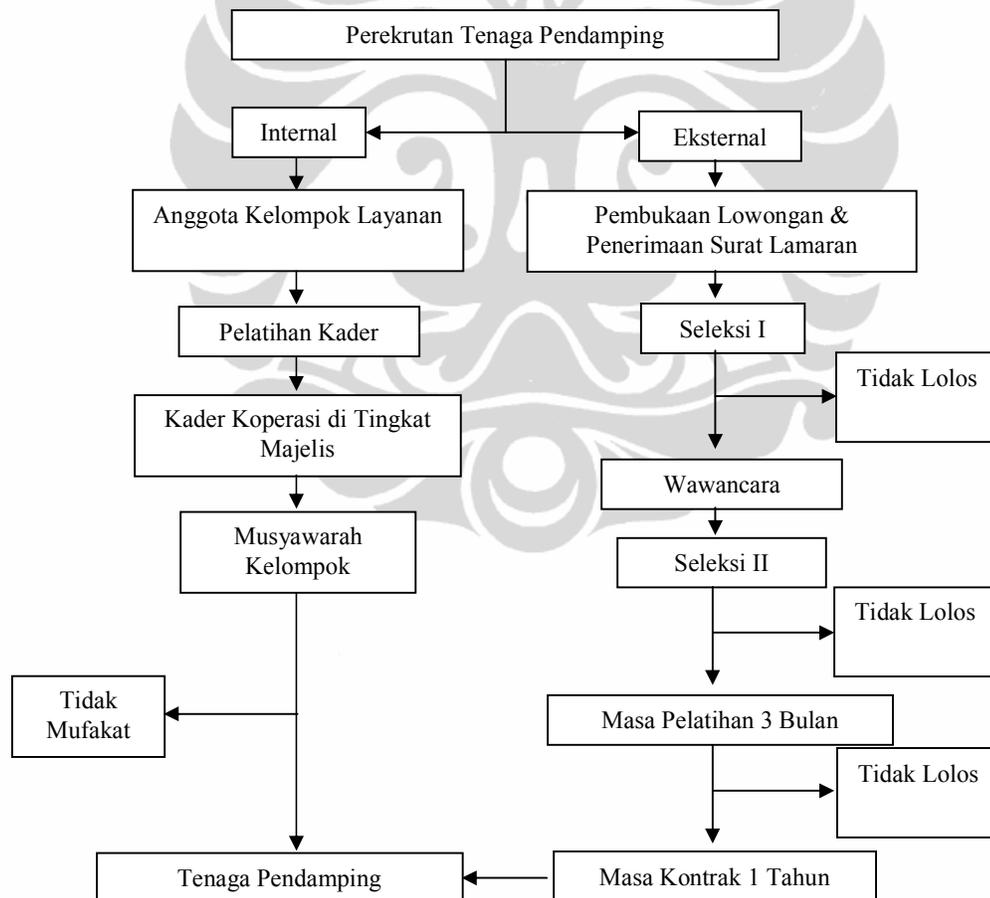
transportasi. *Tahap kedua*, tenaga pendamping akan diangkat menjadi tenaga kontrak selama 1 (satu) tahun, tugas-tugasnya lebih meningkat dibandingkan masa pelatihan, namun memiliki kompensasi berupa uang bulanan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Bogor, asuransi, dan kendaraan operasional. *Tahap ketiga*, tenaga pendamping akan diangkat menjadi pekerja tetap Koperasi bagi yang sudah melewati masa kontrak, beban kerja disini semakin padat disesuaikan dengan jumlah kelompok layanan, bahkan membantu sebagian tugas-tugas supervisi. Kompensasi yang diberikan relatif meningkat dibandingkan sebelumnya berupa tambahan uang tunjangan hidup.

Ketiga tahap ini wajib dilalui oleh tenaga pendamping untuk sampai pada tahap pekerja tetap di Koperasi, namun banyak juga yang keluar di tengah jalan akibat beban kerja yang berat dan juga sisi moralitas yang tidak sesuai yang diharapkan Koperasi, misalnya melaporkan keuangan yang tidak sesuai. Jika terjadi demikian, Pengurus Koperasi menindak tegas tenaga pendamping, mulai dari mengganti uang sampai mengeluarkan dengan tidak hormat. Seperti yang dikemukakan pengurus berikut ini.

Makanya, demi menjaga nama baik di anggota layanan kami semua punya aturan jelas untuk mengatur uang mereka, seperti kemarin ada yang kita keluarin karena ya gitu, ada uang tabungan anggota gak ngikutin aturan. (AMA, 10 April 2012)

Perekrutan melalui jalur internal berasal dari menjaring anggota layanan yang memiliki integritas sebagai anggota Koperasi. Penjaringan anggota dilalui dari proses kaderisasi di tingkat kelompok melalui kegiatan pelatihan kader, banyak penilaian yang dijadikan pertimbangan dalam menjaring anggota yang siap dijadikan kader Koperasi, seperti : lamanya menjadi anggota, kedisiplinan dan kehadiran dalam setiap pertemuan kelompok, memiliki pengaruh dan jiwa sosial di masyarakat, serta memiliki kapasitas menjadi pendamping. Kriteria ini merupakan hasil seleksi dalam waktu yang panjang untuk memperoleh seorang tenaga pendamping yang berasal dari kelompok layanan. Alur proses perekrutan tenaga pendamping Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.1.

Dalam prosesnya, pengurus Koperasi membuat kegiatan pelatihan kader yang rutin dilaksanakan di setiap wilayah pelayanan. Pelatihan kader bertujuan melatih anggota layanan yang dipilih berdasarkan kriteria penilaian untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai kader dalam masyarakatnya. Proses pelatihan diorientasikan untuk pengembangan kapasitas anggota yang memiliki potensi menjadi pemimpin, baik di tingkat kelompok maupun masyarakat. Materi yang diberikan tentang kepemimpinan, komunikasi, dan internalisasi kelembagaan untuk membangkitkan semangat dirinya sebagai anggota Koperasi. Dari pelatihan kader, anggota memperoleh pendidikan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya yang diharapkan menjadi pekerja sosial yang siap bekerja sebagai tenaga pendamping. Seperti diperlihatkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.1. Alur Proses Perekrutan Tenaga Pendamping

Sumber : Telah diolah kembali



Gambar 4.2. Pendamping (kiri) Mengucapkan Terima Kasih kepada Pemateri (kanan) dalam Acara Pelatihan bagi para TPL

Sumber : Dokumentasi Koperasi BAIK (2012)

Pendidikan bukan menjadi salah satu ukuran dalam proses perekrutan tenaga pendamping. Di wilayah pelayanan Tamansari ada seorang perempuan yang sejak tahun 2007 menjadi tenaga pendamping, hanya bermodalkan ijazah SMP ia merelakan diri bekerja mendampingi kelompok layanan. Dengan semangat relawan sampai sekarang ia tetap giat dan bekerja sebagai pendamping kelompok. Keterbatasan pengetahuan tentang proses pendampingan tidak menyurutkan semangatnya untuk belajar bersama dengan tenaga pendamping lainnya. Setiap pertemuan rutin antar pendamping dijadikan sebagai ruang untuk meningkatkan kapasitasnya agar bisa bertukar pengetahuan dan pengalaman, sampai memperoleh tambahan ilmu baru sebagai pendamping. Catatan harian sebagai bekal dirinya untuk mengingat kembali proses belajar yang diperolehnya, yang sampai saat ini tetap dijalani. Seperti dikemukakan oleh salah satu pengurus berikut ini.

Pendidikan formal gak jamin orang bisa kerja keras sebagai TPL, disini banyak yang udah ikut seleksi masuk, diterima dan ikut proses pelatihan 3 bulan. Baru berapa hari kerja, dia uda mengundurkan diri. Tapi ada juga TPL yang pendidikannya cuma sampe SMP, dia bisa kerja keras dengan mengandalkan catatan harian yang dia catat setiap pertemuan terus diterapin di lapangan (AMA, 24 Mei 2012)

Tenaga pendamping memiliki tugas dan peran dalam melayani anggota layanan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Supervisor Wilayah

Supervisor bertanggung jawab pada proses pelayanan kelompok di tingkat wilayah. Tugas yang paling utama diemban saat ini yaitu melakukan penumbuhan di lokasi baru dalam satu wilayah pelayanan, mengingat semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pendanaan dari beberapa lembaga keuangan hasil kerjasama antara Koperasi dengan Perbankan Syariah di Bogor. Hal ini membuat Supervisi meningkatkan kinerjanya agar dana-dana tersebut bisa terserap kepada kelompok sasaran yang membutuhkan pembiayaan.

Dalam melakukan upaya penumbuhan pelayanan dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : Penumbuhan Awal, Pemadatan, dan Tambal Sulam. Ketiganya memiliki perbedaan dalam penumbuhan kelompok layanan, dimana penumbuhan awal merupakan kegiatan yang fokus pada pembukaan wilayah baru yang belum tersentuh oleh program di luar wilayah pelayanan, yang membutuhkan pengkajian mendalam untuk memperoleh kelayakan program yang dijalankan tepat sasaran. Kegiatan pemadatan dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok baru di dalam satu wilayah pelayanan, yang prosesnya juga membutuhkan pengkajian mendalam untuk memperoleh kelompok sasaran. Sedangkan kegiatan tambal sulam dilakukan pada kelompok-kelompok layanan yang sudah terbentuk dimana anggotanya ada yang keluar, sehingga diperlukan anggota baru untuk menggantinya, prosesnya dilakukan di tingkat kelompok di dampingi oleh tenaga pendamping dalam merekrut anggota baru yang aturan dan mekanismenya disepakati oleh kelompok.

Dalam proses kegiatan penumbuhan, supervisi berperan sebagai Tenaga Pendamping yang belajar bersama masyarakat untuk memahami program pelayanan yang akan dijalani bersama. Sebelum memfasilitasi calon anggota, supervisi melakukan Uji Kelayakan (UK) yang bertujuan untuk mengetahui informasi kehidupan calon anggota, baik data dasar

Universitas Indonesia

keluarga maupun pola nafkahnya. Dari hasil UK ini, Supervisi akan mengkajinya di tingkat komite UK yang terdiri dari TPL dan pengurus Koperasi yang tujuannya menseleksi calon anggota sesuai dengan kelompok sasaran yang dituju. Calon anggota yang lolos UK diundang oleh Supervisi mengikuti Latihan Wajib Kader (LWK).

Kegiatan LWK merupakan pintu gerbang calon anggota menjadi anggota Koperasi. Pada tahap ini calon anggota memperoleh pemahaman tentang makna berkoperasi yang prosesnya difasilitasi oleh Supervisi, dimana dalam kehidupan masyarakat ada potensi berbasis nilai kolektivitas dan kerjasama yang harus digali bersama-sama sebagai pemahaman mendasar dalam berkoperasi. Peserta yang telah mengikuti kegiatan LWK akan menjadi anggota Koperasi dan proses pelayanannya akan difasilitasi oleh TPL. Peran Supervisi fokus pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas anggota, secara teknis dilanjutkan oleh TPL dalam menguatkan proses pelayanan di tingkat kelompok.

Supervisi juga memiliki peran dalam memfasilitasi proses koordinasi dan konsolidasi di tingkat TPL. Kegiatan ini dilakukan secara rutin, harian, mingguan, dan bulanan. Kegiatan harian dilakukan setiap sore sebelum jam kerja berakhir, kegiatan mingguan setiap hari jum'at (minggu II – IV) yang dihadiri oleh seluruh Pengurus, Supervisi, dan TPL di semua wilayah pelayanan, sedangkan kegiatan bulanan dilakukan setiap hari jum'at (Minggu I) yang pesertanya sama dengan kegiatan mingguan. Agenda yang dibahas dalam tiap kegiatan berbeda-beda, kegiatan harian membahas beberapa laporan teknis yang diutarakan oleh TPL dalam satu hari kerja, kegiatan mingguan membahas beberapa laporan oleh seluruh Supervisi dan TPL terkait proses pendampingan selama satu minggu, sedangkan kegiatan bulanan fokus pada laporan dan proyeksi pelayanan, seperti laporan keuangan, kegiatan sosial (misal : sunatan massal, kurban, sembako), dan perkembangan kelompok.

b. Tenaga Pendamping Lapangan (TPL)

Tugas TPL secara teknis dimulai pada saat pembentukan kelompok dilakukan setelah LWK. Pada tahap ini anggota sudah memiliki pengetahuan tentang proses pelayanan dalam berkoperasi, serta sudah menentukan anggota kelompok yang memperoleh pencairan pinjaman I – V dengan pola tanggung renteng. Proses pencairan secara teknis dilakukan oleh TPL, berlanjut pada pelayanan menghimpun tabungan di tingkat kelompok. Selain itu, tugas yang lebih penting adalah menguatkan kelompok dalam pertemuan rutin mingguan, seperti meningkatkan kedisiplinan, kehadiran, dan kerjasama antar anggota. Sebab proses ini dipahami sebagai ukuran keberhasilan pelayanan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup anggota.

Tugas TPL fokus dalam proses pendampingan di tingkat kelompok. Para TPL ikut dalam proses kegiatan bersama dengan kelompok, membangun kesepahaman pentingnya berkelompok, bertukar pikiran dalam menghadapi masalah, aktif dalam setiap pertemuan, menabung untuk kebutuhan masa depan, rajin mengangsur untuk meringankan dan mempercepat proses pengguliran dana kepada anggota lainnya, serta yang lebih penting memperkuat kesadaran menabung kelompok sebagai dana *sasarengan* (infaq) yang digunakan membantu anggota kelompok yang terkena musibah.

Pendampingan merupakan tugas utama TPL sebagaimana yang tertera dalam ikrar TPL. Setiap pagi sebelum mendampingi kelompok (pukul 08.00 – 09.00 WIB), para TPL dan Supervisor berkumpul mengkaji nilai-nilai ajaran agama, membahas beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits, saling memotivasi, bertukar informasi dan pengalaman, dan diakhiri dengan berdo'a bersama untuk memperkuat jiwa dan meluruskan niat sebagai tenaga pendamping, yang diikuti oleh pengucapan ikrar yang diucapkan sebagai berikut :

Adalah menjadi tanggung jawab TPL untuk melayani dan mendampingi kelompok dengan ikhlas. Mengemban amanah dari Koperasi BAIK untuk memberikan pembiayaan, mengelola tabungan anggota dan kelompok dengan jujur. Tidak menerima apapun dari anggota kecuali air putih. Tidak membedakan suku, agama, ras, dan paham politik. Allah menjadi saksi atas apa yang kami ucapkan dan kami lakukan. (Sumber : Dokumen Koperasi BAIK, 2012)

Pendampingan kelompok dilakukan selama 4 (empat) hari dalam seminggu (senin-kamis). Di wilayah pelayanan Tamansari, setiap hari tugas TPL mendampingi dan melayani sekitar 5 sampai 7 majelis, yang tersebar dalam satuan wilayah desa. Pendampingan dimulai dari pukul 08.00 – 14.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan proses koordinasi dan konsolidasi sampai pukul 17.00 WIB. Sedangkan setiap hari jum'at merupakan waktu berkumpulnya seluruh TPL dari setiap wilayah pelayanan yang digunakan untuk proses bertukar pikiran antar para pendamping, supervisor, dan pengurus koperasi, yang intinya adalah *sharing* belajar dan pengalaman dan merencanakan proses pendampingan minggu selanjutnya.

Dalam beberapa pertemuan mingguan di wilayah pelayanan Tamansari, proses pendampingan setiap majelis dilakukan selama satu jam. Waktu tersebut digunakan oleh TPL fokus mendampingi anggota, baik dalam pelayanan keuangan simpan pinjam maupun pendampingan yang berkaitan dengan masalah usaha, sekolah anak, dan kesehatan anggota (kehamilan dan persalinan). Dalam pertemuan ini, TPL menggali berbagai informasi yang dihadapi oleh anggota, serta memahami kehidupan anggota berikut masalah yang dihadapinya dan mampu berempati atau menempatkan diri dalam kepentingan anggota. Dengan demikian, seorang TPL berada pada posisi yang simetris antara kepentingan koperasi dan kepentingan ibu-ibu anggota majelis. Sebagai contoh, dalam kasus Bu Aci dari Majelis Semangka yang merasa keberatan dengan sistem angsuran yang dikenakan oleh Koperasi BAIK dan berniat untuk keluar dari keanggotaan dan bahkan membubarkan majlisnya, maka YSN sebagai TPL majelis tersebut berusaha

memahami apa yang menjadi sumber keberatan Ibu ACI tersebut dan membawa permasalahan ini untuk dibahas dalam rapat pengurus.

“Ya... saya sih ngerti kalau Bu ACI ingin mundur soalnya dia harus nombokin terus angsuran anggota majlisnya padahal usaha suaminya lagi sepi. Saya berusaha menjelaskan masalah ini ke manajer wilayah, ya... supaya gimanalah, ada kebijakan gitu..., soalnya sayang, sebelumnya Bu ACI anggota majlis yang rajin, nggak pernah ada masalah. Saya nggak mau majlis ini bubar. (YSN, 16 Mei 2012)

Dalam banyak kasus keputusan ibu-ibu untuk keluar atau tetap menjadi anggota majlis sangat dipengaruhi oleh kedekatan emosional yang terjalin antara mereka dengan TPL yang mendampinginya. Salah seorang TPL mengisahkan pengalamannya saat menghadapi masalah ada anggota majlis dampungannya yang hendak keluar dari Koperasi BAIK. Namun akhirnya anggota tersebut membatalkan niatnya bahkan kemudian menjadi anggota majlis yang loyal karena merasa tersentuh oleh usaha TPL untuk turut merasakan masalah yang sedang dihadapi oleh anggota majlis dampungannya tersebut. Berikut pernyataannya :

“Dulu ada anggota majelis saya yang tadinya keukeuh (keras) pengen keluar. Nah pas ada keluarganya yang meninggal, saya datangi ke rumahnya, sebenarnya niat saya ikhlas gak ada tujuan apa-apa, bener. Nah si ibu itu teh jadi gimana ya... asa diaku cenah (merasa diakui keberadaannya). Akhirnya si ibu itu jadi termotivasi lagi, katanya saya gak mau keluar, saya ingin terus bergabung dengan Koperasi BAIK. Sebenarnya sih saya hanya berusaha menempatkan diri saya itu tidak hanya sebagai petugas tapi juga teman buat ibu-ibu. (YSN, 16 Mei 2012)

Berkunjung atau silaturahmi ke rumah anggota terutama pada saat anggota tertimpa musibah memang menjadi salah satu cara yang ampuh untuk menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan ibu-ibu anggota majlis. Bahkan sekedar menanyakan kabar kesehatan mereka dan keluarganya dalam pertemuan mingguan, hal itu akan membuat hubungan

Universitas Indonesia

menjadi dekat karena pada dasarnya ibu-ibu itu mudah tersentuh. Salah seorang TPL senior yang sudah 9 tahun mendampingi anggota majlis di wilayah Tamansari, menuturkan kiatnya:

“Untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan ibu-ibu anggota majlis saya memperbanyak silaturahmi aja. Saya selalu menanyakan kondisi kesehatan mereka, bagaimana perkembangan usahanya. Kalau ada yang harus dibicarakan atau diketahui lebih jauh, ya.... saya datang rumah mereka. Sekarang sih itu lebih giat dilakukan. Nah di sana saya tidak sekedar melihat kondisi rumahnya kayak gimana tapi juga menanyakan kondisi anak-anaknya, sekolahnya gimana...” (YSN, 16 Mei 2012)

Proses belajar dan bertukar pengalaman antar TPL dan anggota merupakan bagian penting dalam pendampingan. Ibu-ibu majelis pun tidak sungkan-sungkan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para TPL yang menurutnya telah memberikan banyak pelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ya saya berterima kasih kepada petugas dari Koperasi yang sudah mengajak saya dan ibu-ibu yang lain di kampung ini sehingga menjadi anggota Koperasi BAIK. (YSN, 16 Mei 2012)

4.1.2. Tahapan Pelaksanaan Program

Pendampingan merupakan faktor penting dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi BAIK. Tenaga pendamping yang telah melakukan proses rekrutmen dan menjalani serangkaian tahapan *trainning* selama selama 3 (tiga) bulan, diupayakan bisa menjadi pendamping dalam memberdayakan anggota koperasi. Proses pemberdayaan pada program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK dimulai dari tahap pemilihan wilayah sasaran, persiapan sosial, penerimaan anggota, pelayanan pinjaman dan tabungan, pertemuan rutin anggota, *monitoring* kinerja majelis/kelompok, serta perencanaan dan evaluasi pelayanan. Semua tahapan ini menjadi rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh

Koperasi BAIK, dalam rangka mengawal program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang masing-masing dapat dijelaskan berikut ini :

1. Tahap Pemilihan Wilayah Sasaran

Tahap awal dalam pelaksanaan program kredit mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK disebut sebagai proses penumbuhan program. Kegiatan penumbuhan dilakukan oleh supervisi sebagai Tenaga Pendamping yang ditugaskan oleh Koperasi untuk mengidentifikasi potensi dan masalah di wilayah sasaran program. Pemilihan wilayah sasaran diawali dengan melakukan pengkajian yang mendalam untuk melihat semua keadaan wilayah tersebut, diantaranya : mata pencaharian penduduk, pendidikan, dan infrastruktur. Tenaga Pendamping melakukan pengkajian dengan melakukan pengamatan untuk mengenal kondisi wilayah yang akan dijadikan sasaran program untuk menilai kelayakan program. Dalam kegiatan pengamatan, Tenaga Pendamping mulai berinteraksi dengan penduduk di sekitar wilayah tersebut guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai kondisi masyarakat di wilayah itu. Aktivitas keseharian yang dilakukan penduduk dapat dijadikan informasi awal mengenai pola hidup masyarakat dalam mengisi kehidupannya sehari-hari, misalnya : waktu bekerja, waktu berinteraksi dengan tetangga, waktu kegiatan kemasyarakatan, dan usaha-usaha produktif penduduk. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pengurus Koperasi BAIK :

Kegiatan pemilihan wilayah sasaran program merupakan tahapan awal untuk mengetahui kondisi kemiskinan pada wilayah tersebut. Agar memperoleh data yang akurat, tugas Tenaga Pendamping berbaur dengan masyarakat dan melihat sendiri aktivitas keseharian masyarakat, karena disitulah akan terlihat jelas kondisi nyata kemiskinan masyarakat, kemudian baru mencocokkan dengan data profil desa dari kantor desa, sehingga data dan informasi tersebut bisa menjadi justifikasi pelaksanaan program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran (AMA, 25 Maret 2012)

Dalam melakukan pengkajian wilayah, Tenaga Pendamping ditemani oleh seorang warga desa yang membantu proses di lapangan. Orang ini sebagai kontak pertama Tenaga Pendamping yang dikenal melalui proses perkenalan, yang

Universitas Indonesia

sebelumnya mengetahui aktivitas Koperasi BAIK di desa lain dan menginginkan di desanya diadakan program yang sama, sehingga terjadi saling kenal antara dirinya dengan Tenaga Pendamping. Namun menurut Tenaga Pendamping, ada juga perkenalan yang dilakukan langsung di desa, kemudian orang ini yang membantu proses pengkajian di desa tersebut. Dengan adanya orang desa yang membantu tugas Tenaga Pendamping, cukup memudahkan proses pengkajian penduduk dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Tenaga Pendamping dalam kegiatan pengamatan dan pengkajian di desa tersebut.

Tantangan yang dihadapi Tenaga Pendamping ketika melakukan pengkajian di desa yaitu banyaknya warga desa yang bertanya-tanya maksud dan tujuannya berkunjung ke desa tersebut. Sebab salah satu tugas Tenaga Pendamping yaitu berinteraksi dengan penduduk desa, dalam interaksi tersebut terjadi hubungan komunikasi mulai dari menegur/meyapa sampai pada komunikasi yang intensif. Seperti yang dikemukakan oleh Tenaga Pendamping :

Di desa kami selalu menegur/menyapa warga desa ketika kami lewat dihadapan mereka, biasanya dengan kata-kata : punteun (permisi) saja, dan kebanyakan kami menemui mereka ketika sedang berkumpul dan mengajak mereka untuk : kongko-kongko (ngobrol bareng). Bahasa sunda menjadi pembuka komunikasi di antara kami, sebab warga desa akan merasa percaya diri jika diajak komunikasi dengan bahasanya. Pertanyaan yang sering ditanya oleh mereka biasanya : bade' nuju naon ka dieu? bade' aya bantuan nyak? Ieu' nembe pendataan lain? (apa tujuannya datang ke sini? Apa mau ada bantuan ya? Lagi pendataan bukan?). Terus terang kami jika ditanya seperti itu agak hati-hati menjawabnya, karena kami menghindari memberikan janji-janji kepada warga. Supaya kami diterima dengan baik, kami menjawabnya dengan jelas tujuan kami dan menjelaskan prosesnya kepada mereka. (MSS, 27 Maret 2012)

Ketika Tenaga Pendamping sudah menjelaskan prosesnya, warga desa baru memahami tujuannya. Namun yang dihindari oleh Tenaga Pendamping adalah memberikan janji-janji bantuan bagi orang desa, sebab dikawatirkan akan menimbulkan kekecewaan jika tidak ditepati. Melalui proses *kongko-kongko*

Tenaga Pendamping mulai melakukan pendekatan untuk mengkaji pola kehidupan masyarakat, dengan bertanya seputar aktivitas sehari-hari, mata pencaharian, pendidikan, dan kondisi infrastruktur desa (rumah, jalan, sarana fasilitas umum).

Pelaksanaan pengkajian wilayah dilakukan pada setiap wilayah yang akan dimasuki oleh program Koperasi BAIK di Kabupaten Bogor. Sewaktu melakukan pengkajian wilayah di Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari - Kabupaten Bogor, Tenaga pendamping mengkaji data monografi desa Sukaluyu, yang dijadikan informasi awal sebelum melakukan pengkajian di tingkat masyarakat. Berdasarkan data monografi desa Sukaluyu tahun 2011 sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian diperlihatkan pada Tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1. Jenis dan Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sukaluyu (2011)

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Sarana Pendidikan (Unit)	
		Negeri	Swasta
1	TK	0	1
2	SD	3	1
3	SMP	0	1
4	SMA	0	0
5	SMK	0	0
6	Akademi/PT	0	0
7	SLB	0	0
8	Pondok Pesantren	0	6
9	Madrasah Diniyah	0	3

Sumber : Telah diolah kembali (BPS, 2011)

Tabel 4.2. Jenis, Keberadaan, Jumlah, Jarak, dan Kemudahan Akses Sarana Kesehatan di Desa Sukaluyu (2011)

No	Jenis Sarana Kesehatan	Keberadaan	Jumlah	Jarak (KM)	Kemudahan Akses
1	Rumah Sakit	Tidak Ada	0	15,20	Mudah
2	Rumah Bersalin	Tidak Ada	0	8,30	Mudah
3	Poliklinik	Tidak Ada	0	6,20	Mudah
4	Puskesmas	Tidak Ada	0	4,60	Mudah
5	Puskesmas Pembantu	Tidak Ada	0	6,20	Mudah
6	Tempat Praktek Dokter	Ada	1		-
7	Tempat Praktek Bidan	Ada	1		-
8	Poskesdes	Tidak Ada	0	1,20	Mudah
9	Polindes	Tidak Ada	0	11,30	Mudah
10	Posyandu	Ada	15		-
11	Apotik	Tidak Ada	0	3,80	Mudah
12	Toko Jamu	Tidak Ada		3,70	Mudah

Sumber : Telah diolah kembali (BPS, 2011)

Tabel 4.3. Jenis dan Jumlah Sarana Perekonomian di Desa Sukaluyu

No	Industri kecil dan mikro (tenaga kerja kurang dari 20 pekerja)	Jumlah (Unit)
1	Industri dari kulit (tas, sepatu, sandal, dsb)	213
2	Industri dari kayu (meubel, dsb)	4
3	Industri logam mulia dan bahan dari logam (perabot dan perhiasan dari logam dsb)	0
4	Industri anyaman (peralatan dari rotan/bambu, rumput, mendong, pandan, tikar, tas, hiasan dinding, dsb)	4
5	Industri gerabah/keramik/batu (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, dsb)	3
6	Industri dari kain/tenun (kerajinan tenun, konveksi)	0
7	Industri makanan dan minuman (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, makanan lain, dan industri minuman)	1
8	Industri lainnya	0
9	Minimarket (sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, luas lantai < 400m ²)	0
10	Warung/kedai makanan minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli tidak bayar pajak)	5
11	Toko/warung kelontong (tempat usaha untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran tanpa ada sistem pelayanan mandiri)	7
12	Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli bayar pajak)	0
13	Hotel (akomodasi, ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel)	0
14	Penginapan: hostel/motel/losmen/wisma (akomodasi penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel)	0
15	Koperasi Unit Desa (KUD)	0
16	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)	0
17	Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	0
18	Koperasi lainnya	1

Sumber : Telah diolah kembali (BPS, 2011)

Selain itu mengkaji melalui data sekunder di atas, Tenaga Pendamping juga melakukan pengamatan langsung melihat kondisi realitas di desa untuk memperkaya informasi selain dari hasil *kongko-kongko*. Sebagian hasil pengkajian ini sebagai berikut :

Desa Sukaluyu terletak di wilayah dataran tinggi yang lokasinya di sebelah selatan Kota Bogor. Sama dengan desa-desa di kecamatan Tamasari, penduduk desa ini mayoritas bekerja pada sektor pertanian (petani dan buruh tani). Lahan-lahan pertanian kebanyakan sudah tidak dimiliki penduduk, karena banyak yang dijual ke “orang jakarta.” Akhirnya sebagian penduduk beralih ke sektor jasa (ojek), industri kecil (sepatu, sandal, kerajinan), dan banyak pula yang membuka usaha warung. Pemukiman di

desa ini terkelompok yang terbagi ke dalam kampung-kampung, setiap kampung dibatasi oleh lahan pertanian, sungai, maupun tebing yang ditempuh melalui jalan setapak. Pemukiman di setiap kampung tampak padat, dimana setiap rumah saling berdempet-dempetan dan tidak teratur. Fasilitas umum setiap kampung hanya ada musholla, sedangkan masjid, sekolah, dan Puskesmas ada di dekat kantor desa, sehingga warga di setiap kampung jika ingin sholat jum'at, sekolah, ke posyandu perlu jalan ke fasilitas umum tersebut, dengan jarak yang berbeda-beda dari setiap kampung. Minimnya sarana infrastruktur desa (terutama jalan dan sekolah) membuat banyak warga yang mengurungkan niat anak-anaknya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi) dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Lokasi sekolah SMP dan SMA jauh dan ada di dekat kecamatan sehingga membutuhkan biaya transportasi yang relatif tinggi, apalagi biaya untuk kuliah. Roda perekonomian di desa sangat dipengaruhi oleh pasar dan bergantung pada "tengkulak," jika sedang tinggi mereka untung, jika harga rendah mereka rugi. Tidak sedikit penduduk yang berhutang modal dengan tengkulak untuk usahanya, namun bunga yang ditetapkan mencapai 30-50 persen. Karena tidak ingin terbelit utang penduduk di desa ini membuka usaha sampingan, yaitu "warung jajanan" untuk mempertahankan ekonomi rumah tangganya, namun kendalanya di permodalan. Kondisi ini menggambarkan kehidupan masyarakat desa dalam serba keterbatasan, yaitu : akses pendidikan, infrastruktur, pengembangan usaha, permodalan. Pemerintah desa juga belum bisa mengatasi persoalan desanya, sebab dalam prakteknya bergantung dari program bantuan pemerintah saja. (MSS, 27 Maret 2012)

Dalam merealisasikan hasil pengkajian wilayah, Tenaga Pendamping dengan pengurus mulai mengkaji kembali tentang kelayakan wilayah ini untuk dimasuki program. Poin penting dalam memutuskan suatu wilayah layak dimasuki program adalah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut, yang diukur melalui : pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Pendapatan masyarakat di wilayah ini masih rendah dilihat dari skala usaha yang dijalankan, kebergantungan mereka

pada tengkulak mempengaruhi penghasilannya, belum lagi dipengaruhi oleh iklim usaha yang tidak menentu, jika permintaan produksi (sepatu, sandal, lemari, meja, dll) meningkat, maka warga mulai giat bekerja dengan melibatkan penduduk lain sebagai buruhnya, namun kendalanya adalah modal untuk membeli bahan bakunya. Kemudian akses ke sekolah dan pelayanan kesehatan yang jauh dari pemukiman menggambarkan rendahnya tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan penduduk di desa. Mayoritas penduduk desa tidak tamat atau lulus SD saja, sebagian kecil saja yang lulus SMP dan SMA, itupun karena mampu secara ekonomi dan tinggal (kost) di dekat sekolah. Rendahnya pelayanan kesehatan di desa mempengaruhi intensitas warga datang ke Puskesmas, walaupun biayanya rendah. Sehingga banyak warga yang memutuskan ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit (RS) jika keadaannya sudah mendesak, namun keterbatasan biaya pengobatan menjadi kendala, hal ini terjadi pada ibu-ibu yang ingin melahirkan. Aktivitas pengkajian wilayah sebagaimana diperlihatkan pada Gambar berikut ini.



Gambar 4.3. Pendamping Bersama dengan Masyarakat dalam Proses Pengkajian Wilayah

Sumber : Dokumentasi Koperasi BAIK (2012)

Atas dasar hasil pengkajian tersebut, pengurus mulai menggambarkan kondisi kemiskinan di wilayah ini. Kesepakatan antar pengurus dan Tenaga Pendamping dalam menilai hasil pengkajian ini bahwa desa Sukaharja di wilayah

pelayanan Tamansari dinyatakan layak untuk dimasuki program kredit mikro oleh Koperasi BAIK. Sebagai justifikasinya adalah kemiskinan penduduk di wilayah ini terlihat nyata dari apa yang dikemukakan oleh Tenaga Pendamping, kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan modal usaha memungkinkan program ini akan tepat sasaran, pinjaman dana yang digulirkan akan sedikit mengungkit usaha yang dimiliki penduduk dan berupaya menjauhkan ketergantungannya pada “tengkulak” dari luar desa, baik pada penjualan hasil-hasil produksi maupun permodalan yang cenderung membuat usaha penduduk semakin merugi. Jika pemilihan wilayah sasaran sudah diputuskan, maka fasilitator melanjutkan tugas ke tahapan persiapan sosial.

2. Persiapan Sosial

Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam persiapan sosial masih tetap dilakukan oleh Tenaga Pendamping. Tugas utama dalam tahap ini yaitu kunjungan dan diskusi dengan tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh (sowan). Tujuannya adalah menjelaskan tujuan dan manfaat pelayanan Koperasi BAIK di desa, serta menjelaskan kelompok sasaran yang akan diterima. Tokoh masyarakat yang dikunjungi yaitu : Kepala Desa, Ketua RT/RW, Kepala Kampung (Dusun), dan Tokoh Agama. Tenaga Pendamping juga hadir dalam setiap acara-acara pertemuan warga seperti : pengajian, kelompok Posyandu dan kelompok arisan ibu-ibu. Tantangan yang dihadapi oleh Tenaga Pendamping pada proses sosialisasi ini adalah bertemu dengan tokoh masyarakat yang tidak sejalan pemikirannya dengan pembangunan masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh perilaku aktor yang berupaya mempertahankan pengaruhnya di desa. Unsur tokoh masyarakat dari pemerintahan dan tokoh agama ditemukan tidak ada saling kecocokan dalam memaknai proses kemajuan masyarakatnya, pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan di desa selalu memperoleh kritik dari tokoh agama bahwa proses kemajuan dan pembangunan di desa tidak sesuai dengan ajaran agama. Seperti yang dikemukakan oleh Tenaga Pendamping :

Kami menemui kesulitan di wilayah ini karena ada perselisihan pendapat dari tokoh masyarakat di desa. Menurut kami, pemikiran tokoh agama di desa ini masih terlihat kolot, dalam kegiatan keagamaan di musholla tidak

boleh menggunakan alat pengeras suara (speaker), baik sholat maupun pengajian ibu-ibu. Pengaruh tokoh masyarakat ini bahkan sampai urusan pendidikan yang melarang masyarakat tidak boleh sekolah di sekolah SD, SMP, atau SMA, namun hanya diperbolehkan sekolah di pesantren. Jangankan program yang ingin kami jalankan, pendataan yang dilakukan oleh RT/RW untuk mengidentifikasi masyarakat miskin yang akan diberikan bantuan oleh pemerintah (subsidi BBM dan Askeskin) mendapat pertentangan dari tokoh agama, seringkali program pemerintah desa tanpa melibatkan tokoh agama, padahal masyarakat sebenarnya ingin hidupnya maju, namun masih ada saja yang masih patuh dengan tokoh agama. Untuk program koperasi jelas memperoleh dukungan dari pemerintah desa, namun belum memperoleh dukungan dari tokoh agama. Walau kondisinya demikian, bersama masyarakat (ibu-ibu anggota pengajian) kami melaksanakan program ini dikarenakan kebutuhan masyarakat sendiri untuk mempertahankan ekonomi keluarga, meski tokoh agama di desa ini tidak menyetujuinya. (DNI, 04 April 2012)

Atas dasar kehendak masyarakat sendiri, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga (perempuan) sebagai kelompok sasaran, Tenaga Pendamping mulai merealisasikan tahapan persiapan sosial ini. Setelah sosialisasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan Uji Kelayakan (UK) calon anggota. Tahap UK diawali dengan memberikan sebuah formulir yang berisi biodata dan pendapatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya : penghasilan, kebutuhan keluarga, dan tujuan mengikuti program.

Dalam proses kegiatan UK di lapangan yang difasilitasi oleh DNI dan MSS di Desa Sukaluyu. Masyarakat yang mengikuti UK adalah para calon anggota (ibu-ibu rumah tangga) yang sudah menerima sosialisasi program oleh Tenaga Pendamping pada saat kegiatan pengajian dan arisan di desa, dan pada saat itu juga Tenaga Pendamping mendata ibu-ibu yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon anggota koperasi. Proses UK kali ini dilakukan di rumah calon anggota dan fokus pada wawancara mendalam kepada 20 (dua puluh) calon anggota berdasarkan formulir yang telah diisi sebelumnya.

Mata pencaharian keluarga menjadi bahan pertanyaan umum oleh Tenaga Pendamping. Sebab dari pertanyaan ini akan berkembang pola nafkah rumah tangga terhadap akses sumberdaya ekonomi, calon anggota yang bekerja sebagai petani akan teridentifikasi dengan jelas status kepemilikan lahannya, untuk mengetahui pekerjaannya sebagai petani pemilik lahan, petani penggarap, atau buruh tani. Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.4.

Data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengolahan data teridentifikasi kesejahteraan anggota yang mengikuti pelayanan Koperasi BAIK di desa Sukualuyu. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan keluarga (baik isteri/suami) seperti diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Pendapatan Suami Perbulan

Pendapatan (Rp)	Frequency	Percent (%)
>=3.000.000	3	0.5
>=2.000.000	30	4.8
>=1.000.000	69	11.1
0 – 1.000.000	522	83.7
Total	624	100.0

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2011)

Tabel 4.5. Pendapatan Isteri Perbulan

Pendapatan (Rp)	Frequency	Percent (%)
>=1.500.000	26	4.2
>=1.000.000	4	.6
>= 500.000	54	8.7
0 – 1.000.000	540	86.5
Total	624	100.0

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2011)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pendapatan rumah tangga anggota Koperasi BAIK masuk dalam keluarga berpenghasilan rendah. Pendapatan suami untuk menafkahi anggota keluarga rata-rata kurang dari Rp. 1 Juta perbulan dengan mata pencaharian mayoritas sebagai buruh pabrik sepatu, tani, dan petani. Di sisi lain, peran isteri sebagai IRT memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga dari usaha yang mereka jalankan. Sekitar 86,5 persen pendapatan isteri dibawah Rp. 500.000 perbulan.



Gambar 4.4. Proses Pelaksanaan UK yang dilakukan oleh Pendamping kepada Calon Anggota Koperasi

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2012)

Data di atas memberikan informasi terhadap strategi nafkah yang dilakukan oleh anggota dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pola nafkah keluarga, di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi ternyata masih ada upaya yang dilakukan dengan membuka usaha sampingan dalam mendukung ekonomi rumah tangga, misalnya : warung. Seperti hasil wawancara singkat yang dilakukan kepada ibu MMI dan WNH sebagai berikut :

Ibu WNH dan MMI adalah saudara sekandung yang sudah tidak memiliki orang tua, mereka tinggal dalam satu rumah yang terbuat dari kayu dan atap rumbia. Rumahnya tidak ada pelayanan listrik, hanya menggunakan lampu tempel yang dihidupkan setiap malam hari saja. Suami ibu Winah sebagai petani penggarap, ia tidak bertani lagi karena kekurangan modal untuk menanam sayur-sayuran, sedangkan mereka memiliki 8 anak yang masih dalam tanggungannya. Ibu Mimi memiliki 1 orang anak, suaminya membuka usaha produksi sepatu. Kebutuhan pengeluaran harian rumah tangga dalam satu rumah sekitar Rp. 40.000 untuk makan dan jajan anak, mereka tidak memiliki usaha sampingan seperti warung, biasanya kalau tidak ada uang mereka pinjam dulu ke tetangga atau “tengkulak” yang sering berbisnis dengan suaminya, namun menurutnya itu cukup

memberatkan dalam membayarnya. Mereka memiliki sepeda motor yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga. (DNI, 04 April 2012)

Data diatas sebagai dasar penilaian pendamping untuk mengetahui tingkat kesejahteraan calon anggota dan menjadi bahan pengkajian dalam proses penerimaan anggota yang akan diputuskan dalam rapat komite UK. Rapat komite UK dihadiri oleh pengurus koperasi dan Tenaga Pendamping yang dilaksanakan setiap hari senin pukul 14.00 – 16.00 WIB yang membahas hasil proses UK. Tenaga Pendamping melaporkan hasil-hasil UK kepada 20 calon anggota dan memperoleh tanggapan dari pengurus dan Tenaga Pendamping lain. Jika masih ada laporan proses UK yang tidak bisa dijelaskan dengan baik dan masih menimbulkan banyak pertanyaan terhadap data-data calon anggota, maka proses UK diulang kembali dan dilaporkan senin depan, walaupun itu hanya terjadi pada salah satu anggota saja. Seperti apa yang dikemukakan oleh pengurus dalam rapat komite UK:

Rapat komite UK sangat penting yang didalamnya membahas data-data hasil UK. Laporan data calon anggota akan diverifikasi secara rinci dan sangat berpengaruh pada proses penerimaan yang bertujuan agar program ini tepat sasaran..... Lanjut kata pengurus, Dari pembahasan data 20 orang calon anggota ini, semuanya tidak ada data yang ganjil yang menimbulkan bias data. Dilihat dari laporan Tenaga Pendamping, semua calon anggota adalah kaum perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka membantu usaha suami yang tidak menentu penghasilannya, seperti tukang ojek, buruh sepatu dan sandal, buruh bangunan, dan kerajinan (pintu, lemari, meja, dan kursi). Sebagian calon anggota tersebut ada membuka usaha sampingan, yaitu : warung..... Lanjutnya, Hasil rapat komite UK memutuskan 20 orang calon anggota ini layak mengikuti program yang dilaksanakan Koperasi BAIK. (AMA, 10 April 2012)

Calon anggota yang dinyatakan lolos verifikasi dalam rapat komite UK, akan diundang untuk mengikuti Latihan Wajib Kelompok. Undangan ini wajib diikuti oleh calon anggota, sebab dalam pelatihan ini mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi.

3. Penerimaan Anggota

Kegiatan LWK difasilitasi oleh supervisor yang pesertanya yang lolos Uji Kelayakan (UK). Pelaksanaan LWK selama 3 (tiga) hari yang wajib diikuti oleh calon anggota dalam waktu 1 jam perhari yang merupakan salah satu prosedur dalam proses penerimaan anggota. Berikut adalah proses LWK di desa Sukaluyu, wilayah Tamansari Bogor. Adapun proses kegiatan LWK dapat diuraikan lebih rinci berikut ini.

a. Perkenalan

LWK difasilitasi oleh MSS (Supervisor wilayah Tamansari). Metode dalam LWK menggunakan proses partisipasi, dimana fasilitator dan peserta saling belajar dan berbagi pengalaman. Pada tahap ini Tenaga Pendamping memperkenalkan diri, sebab walaupun dalam pertemuan sosialisasi dan kegiatan UK sebelumnya sudah memperkenalkan diri namun ketika ditanya masih ada saja peserta yang lupa nama Tenaga Pendamping. Kemudian Tenaga Pendamping meminta peserta memperkenalkan diri masing-masing, dimana jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang yang merupakan para IRT dengan latar belakang pendidikan yang seragam, yaitu hanya tamatan SD. Tenaga Pendamping mengawal proses pelatihan ini disesuaikan dengan bahasa dan tingkat pendidikan mereka, materi pelatihan yang disampaikan sebagai berikut : Kelembagaan Koperasi dan Akad Pembiayaan.

b. Tujuan dan Peraturan LWK

Setelah perkenalan, Tenaga Pendamping menjelaskan tujuan dari LWK melalui pendekatan belajar bersama. Penjelasan mulai dibahas dari kata **latihan, wajib, dan kelompok**. Tenaga Pendamping mulai mengajukan pertanyaan kepada peserta tentang apa yang dimaksud dengan **latihan**. Jawaban peserta sangat beragam, yaitu : pertemuan, untuk menambah pengetahuan, dapat ilmu, dan belajar. Kata **wajib** menurut peserta, yaitu : harus, penting, tidak boleh absen. Sedangkan kata **kelompok** menurut peserta, yaitu : berkumpul, tolong menolong, rukun, dan silaturahmi.

Atas dasar jawaban dari peserta, Tenaga Pendamping merumuskan bahwa tujuan dari LWK sebagai proses belajar bersama antar peserta (IRT) yang wajib dilakukan (tidak boleh absen) untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian antar sesama peserta calon anggota koperasi. Tenaga Pendamping mengemukakan :

... LWK ini sebagai pintu masuk bagi calon anggota menjadi anggota Koperasi BAIK, sehingga ibu-ibu diwajibkan mengikuti pelatihan ini dengan baik yang manfaatnya untuk melatih kekompakan anggota. Ibu-ibu akan diberikan materi tentang Koperasi dan Akad Pembiayaan supaya ibu-ibu mengerti dan memahami pelaksanaannya nanti... (MSS, 05 April 2012)

Atas dasar tujuan tersebut, peserta dengan Tenaga Pendamping memiliki kesepakatan aturan (tata tertib) LWK, yaitu : hadir tepat waktu, hadir selam 3 hari berturut-turut, tidak bisa diwakilkan, tertib tidak boleh berisik, boleh membawa anak namun harus tetap fokus pada latihan, jika ada yang tidak hadir satu orang saja, maka ditunda/dibatalkan dan kembali ke-hari pertama. Dan selama pelatihan ini dilaksanakan peserta mematuhi aturan yang disepakati tersebut. Proses ini tampak sebagaimana pada Gambar di bawah ini.



Gambar 4.5. Pendamping sedang Memfasilitasi Proses LWK Calon Anggota di Kecamatan Cijeruk

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2012)

c. Kelembagaan (nilai arti dari koperasi *Baytul Ikhtiar*)

Pada awalnya Tenaga Pendamping mulai dengan memberikan informasi alamat lengkap lembaga sebagai kejelasan tempat berkantor, sekaligus dengan sejarah pendirian koperasi. Tenaga Pendamping mulai bertanya terlebih dahulu kepada peserta tentang ***Koperasi, Baytul, dan Ikhtiar***. Ketika bertanya apa itu ***koperasi***, jawaban dari peserta juga beragam, bahwa menurut peserta koperasi sebagai wadah simpan pinjam, bukan bank keliling, bukan rentenir, anggota dapat untung. Tenaga Pendamping mulai bertanya kepada peserta apa itu ***Baytul***. Peserta ada yang menjawab sebagai rumah, biasanya didalam sebuah rumah ada anggota keluarga, (Bapak, ibu, dan Anak), maka harus dijaga, dirawat dan dibersihkan, siapa yang harus melakukannya kalau bukan anggota keluarga itu sendiri, bagaimana jika tidak dirawat maka lama kelamaan akan hancur rumahnya. Lalu ketika ditanya apa yang dimaksud dengan ***Ikhtiar***, peserta menjawab ikhtiar sebagai usaha, usaha yang bertujuan mencari uang/nafkah, usaha untuk dapat merubah kehidupan, usaha untuk ikut kumpul dalam kelompok ini.

Fasilitator merumuskan hasil jawaban dari peserta bahwa Koperasi *Baytul Ikhtiar* merupakan wadah yang dimiliki oleh anggota yang ingin berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik dan bisa menjaga serta merawat wadahnya dengan jalan berkumpul setiap minggu, inilah makna atau nilai kenapa koperasinya diberi nama *Baytul Ikhtiar*.

d. Anggota Koperasi

Dalam sesi ini peserta diminta untuk mengungkapkan pendapatnya dari pertanyaan Tenaga Pendamping tentang mengapa keanggotaan koperasi BAIK yaitu ibu-ibu. setiap jawaban peserta ditulis oleh Tenaga Pendamping di kertas plano. Pendapat peserta yang ditulis antara lain : Ibu-ibu pandai menyimpan uang, bisa hemat, punya tugas mengatur keuangan rumah tangga, punya pengalaman mengatur uang, walau dalam kondisi miskin namun masih bisa menyimpan uang, tidak boros, uang

digunakan untuk kepentingan keluarga, sabar mengurus uang untuk keluarga, kreatif menggunakan untuk usaha.

Setelah itu Tenaga Pendamping mulai merumuskan pendapat peserta bahwa dengan pengalaman yang dimiliki ternyata ibu-ibu punya kemampuan mengatur keuangan rumah tangga, memiliki sifat sabar, teliti, dan tanggung jawab mengatur uang untuk kepentingan rumah tangga. Atas dasar pendapat peserta ini Koperasi Baytul IKhtiar memilih anggotanya yaitu ibu-ibu sekalian.

e. Kelompok

Merumuskan pendapat peserta tentang kelompok merupakan hal penting bagi Tenaga Pendamping untuk menguatkan komitmen peserta sebagai anggota koperasi. Ada beberapa pendapat peserta yang muncul dalam mengartikan makna kelompok, yaitu : silaturahmi, persaudaraan, tolong menolong, gotong royong, kerjasama, musyawarah, saling menghargai, saling menghormati, tanggung renteng. Tenaga Pendamping menjelaskan bahwa tujuan berkelompok adalah penguatan solidaritas antar anggota untuk saling peduli antar sesama. Dengan berkelompok suatu masalah akan menjadi mudah bila dipecahkan bersama.

f. Pembentukan Kelompok 2-2-1

Tenaga Pendamping mulai memfasilitasi peserta membentuk kelompok. Metode yang digunakan dengan membentuk kelompok kecil lima-an (5 orang). Tenaga Pendamping meminta peserta memilih calon anggota kelompoknya masing-masing. Setelah terbentuk posisi para peserta harus duduk menghadap kearah Tenaga Pendamping dan memastikan dalam setiap kelompok tidak boleh ada yang memiliki hubungan sedarah seperti adik-kaka, ibu-anak, menantu-mertua. Hal ini dimaksudkan mencegah saling mengandalkan atau melempar tanggung jawab ketika ada masalah, yang terpenting adalah adanya pembauran ditingkat mereka sehingga menambah akrab diantara mereka dan semakin kuat tali persaudaraannya.

Kelompok yang terbentuk dalam LWK ini ada 3 (tiga) kelompok kecil. Pembentukan kelompok kecil bertujuan untuk menentukan urutan pengajuan pinjaman, serta menguji kesabaran peserta memperoleh pencairan pinjaman. Dengan pola yang sudah ditentukan yakni 2-2-1 maksudnya adalah pengajuan dan pencairan dibagi menjadi 3 minggu, pada minggu pertama pengajuan pinjaman masing-masing akan dipilih 2 orang dari setiap kelompok. Jika ada 3 kelompok kecil, maka pada minggu pertama ada 6 orang yang mengajukan pinjaman, minggu ke- 2 ada 6 orang, dan minggu ke- 3 ada 2 orang.

Kemudian para peserta memilih dan menentukan sendiri dengan cara musyawarah oleh masing-masing kelompok. Disini terlihat siapa saja yang benar-benar peduli dan siapa yang tidak, ada juga peserta yang terlihat sangat agresif untuk mendapatkan pencairan pinjaman yang pertama sehingga prosesnya berjalan lama dan alot ditingkat kelompok. Tenaga Pendamping mengarahkan khususnya bagi calon anggota yang terlihat selalu mendominasi. Tujuannya untuk mempermudah kelompok membuat kesepakatan dan persetujuan bersama tanpa adanya paksaan dari orang tertentu.

Tenaga Pendamping mendampingi kelompok yang sudah memiliki kesepakatan, dengan mengatur posisi duduknya dari kiri ke kanan yang terpilih memperoleh pinjaman minggu I, II, III dimana orang yang duduk paling kanan adalah calon anggota yang pengajuannya terakhir. Peserta yang memperoleh pengajuan terakhir disepakati sebagai ketua kelompok, sebab dengan memilih pencairan pinjaman yang terakhir menunjukkan kepedulian dengan anggota yang lainnya, selain itu ia sudah siap mengalah untuk kepentingan kelompoknya. Dengan terbentuknya kelompok kecil ini, maka status para peserta sudah menjadi anggota layanan Koperasi BAIK, dan mulai melakukan pertemuan rutin mingguan yang waktunya berdasarkan kesepakatan kelompok.

4. Pelayanan Pinjaman dan Tabungan.

Pengajuan pinjaman dan pelayanan tabungan anggota dilakukan dalam pertemuan majlis. Sebelum memperoleh pelayanan, para anggota diwajibkan melengkapi syarat-syarat administrasi, yaitu : Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, serta Kartu Keluarga (KK). Syarat administrasi ini digunakan untuk pendataan anggota baru di dalam manajemen Koperasi BAIK. Selain itu manfaatnya juga bisa digunakan untuk pemberian asuransi kesehatan dan kematian bagi anggota yang sudah lama menjadi anggota Koperasi.

Setelah melengkapi syarat administrasi, calon peminjam (anggota) bisa mengajukan diri di depan anggota majlis dan TPL mengenai besaran jumlah uang yang akan dipinjam dan pemanfaatan pinjaman. Peran TPL dalam tahap ini memfasilitasi kebutuhan anggota di dalam majelis, dalam prosesnya TPL menganalisa kebutuhan dan pemanfaatan dana yang akan dipinjamkan untuk usaha anggota, kemudian anggota yang lain memberikan berbagai saran dan masukan, baik yang bersifat dukungan maupun penolakan. Tahap ini bisa berlangsung alot karena pinjaman diberikan dengan sistem tanggung-renteng (Gambar 4.6). Seperti yang dikemukakan kedua pendamping berikut ini :

Dalam pertemuan majelis baru, ada 2 (dua) anggota yang mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000. Tenaga Pendamping yang mendampingi majelis mulai memfasilitasi kebutuhan dan pemanfaatan dana pinjaman tersebut melalui analisa usaha. Dua anggota yang memiliki usaha sebagai pedagang Gorengan dan Nasi Uduk ini mengikuti arahan dari Tenaga Pendamping, dan menuliskannya di kertas Plano, dan hasilnya dipaparkan di hadapan para anggota majelis. Pemaparan dari anggota tersebut memperoleh tanggapan dari anggota lainnya, jika tidak sesuai maka dilakukan perubahan dalam analisa usaha tersebut, begitu yang dilakukan dalam setiap pencairan pinjaman. (KMR & IMM, 23 Mei 2012)

Setiap tahun anggota berhak atas 2 kali pinjaman, pinjaman berikutnya dapat diberikan apabila umur pertemuan minimal 25 kali dalam masa angsuran. Pinjaman pertama Rp. 300 ribu. Kenaikan jumlah pinjaman diberikan secara bertahap menjadi Rp. 500 ribu, Rp. 750 ribu, dan maksimum Rp. 1 juta dengan

mempertimbangkan disiplin kehadiran, disiplin angsuran dan disiplin tabungan, serta kesepakatan tanggung renteng oleh anggota lainnya. Ungkapan Pengurus :

Kedisiplinan anggota dalam kehadiran pertemuan rutin, menabung, dan membayar angsuran merupakan proses yang perlu dijalankan anggota dan menjadi salah satu pelaksanaan kebijakan lembaga kita. Tidak ada kebijakan yang memperbolehkan anggota yang menabung dan membayar angsuran namun tidak hadir dalam pertemuan, semua proses pelayanan dilakukan di tingkat pertemuan majelis dihadiri seluruh anggota. (TTN, 24 Mei 2012)



Gambar 4.6. Proses Pelayanan Simpan-Pinjam pada Kelompok di Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari – Kabupaten Bogor

Sumber : Dokumentasi Koperasi BAIK (2012)

Bagi anggota yang memperoleh pinjaman putaran kedua atau seterusnya, diberikan fasilitas asuransi kecelakaan dan kematian. Sebab di dalam angsuran ada biaya premi yang dibayarkan setiap minggunya. Jika anggota mendapat pinjaman Rp. 500.000,- maka ia membayar angsuran Rp. 10.000,- ditambah biaya premi dan administrasi sebesar Rp. 2.500,- perminggu. Jadi total yang dibayarkan anggota setiap minggunya Rp. 12.500,-. Upaya intervensi program pelayanan ini bukan sebatas pada transaksi keuangan saja, melainkan upaya pelayanan jaminan sosial kepada anggotanya, sehingga program yang dirancang dan dijalankan ini memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Fasilitas asuransi jarang diperoleh

bagi keluarga miskin, kecuali bagi mereka yang bekerja sebagai buruh industri. Namun dalam pelayanan ini, keluarga miskin memperoleh akses jaminan sosial dan permodalan sebagai upaya untuk memberikan jaminan hidup di masa depan.

Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 50 minggu. Namun diperbolehkan pula bagi anggota yang ingin melunasi pinjaman kurang dari 50 minggu. Setelah pinjaman pertama dilunasi anggota dapat mengajukan pinjaman yang kedua. Pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan rutin majlis. Kegiatan ini selalu disertai dengan penyetoran simpanan atau tabungan dan infaq, yaitu iuran sukarela yang akan digunakan untuk membantu anggota yang tertimpa musibah. Ada 3 jenis tabungan, yaitu:

- a. Tabungan wajib yang besarnya bervariasi tergantung dari besarnya pinjaman. Tabungan wajib baru bisa diambil pada saat anggota kelompok keluar dari keanggotaan. Di bawah ini adalah tabel skema besarnya tabungan wajib yang harus disetorkan sesuai dengan besarnya pinjaman :

Tabel 4.6. Skema Jumlah Tabungan Wajib yang harus Disetorkan

No	Besar Pinjaman (Rp)	Besar Tabungan (Rp)
1	300.000 - 600.000	200
2	700.000	250
3	1.000.000	400
4	1 - 5 Juta	1000

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2012)

- b. Tabungan kelompok adalah tabungan yang dihimpun oleh anggota dan dicatat atas nama kelompok kecil yang berjumlah 5 orang. Besarnya tabungan yang harus disetor oleh masing-masing anggota bervariasi tergantung besarnya pinjaman. Seperti halnya tabungan wajib, Tabungan wajib baru bisa diambil pada saat anggota kelompok keluar dari keanggotaan. Di bawah ini adalah tabel skema besarnya tabungan kelompok yang harus disetorkan sesuai dengan besarnya pinjaman :

Tabel 4.7. Skema Jumlah Tabungan Kelompok yang harus Disetorkan

No	Besar Pinjaman (Rp)	Besar Tabungan (Rp)
1	300.000 - 600.000	300
2	700.000	500
3	1.000.000	600
4	1 – 5 Juta	2000

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2012)

- c. Kondisi ini diupayakan sebagai jalan menuju peningkatan ekonomi rumah tangga, melalui pendekatan pendampingan dengan menguatkan kedisiplinan anggota, baik dalam kehadiran, pembayaran angsuran dan tabungan. Dalam realitasnya, banyak anggota yang menerima pendekatan tersebut dalam mendampingi peningkatan ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, ada beberapa anggota yang tidak sepaham dengan pola seperti ini, dan semua keputusan pada mereka. Ungkap Pendamping :

Pinjaman, angsuran, tabungan, dan kehadiran hanya sebagai instrumen saja pelaksanaan program ini. Yang dijadikan fokus program oleh Koperasi BAIK yaitu peningkatan kapasitas sosial ekonomi rumah tangga anggota, dengan pola seperti ini kami berupaya mereka menjadi lebih sejahtera, dan jika ada anggota yang tidak sejalan dengan pendekatan program kami keputusan untuk berhenti kembali pada mereka (AMA, 24 Mei 2012)

5. Pertemuan Rutin Majelis

Pertemuan majelis merupakan wadah interaksi sosial ekonomi antar anggota, kelompok, dan TPL yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota dan dilaksanakan setiap minggu. Dalam majelis tersebut para IRT berkumpul dan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ketua majelis memimpin pembukaan majelis, kemudian membacakan ikrar bersama-sama. Setelah itu, TPL membuka majelis dan langsung melakukan pengabsenan majelis. Dari absen itu, TPL bersama anggota akan mengetahui anggota yang tidak hadir, jika ada yang tidak hadir, maka anggota kelompoknya memberikan informasi alasan anggotanya tidak hadir. Dari jumlah 480 majelis (per Desember 2010) masih ditemukan ada

beberapa majelis yang memiliki catatan kurang baik dan kurang disiplin. Majelis-majelis yang bermasalah menurut TPL yaitu :

Banyaknya majelis yang bermasalah disebabkan oleh oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari masalah yang dihadapi oleh anggota, yang biasanya terkait dengan kehidupan rumah tangga yang terkena musibah (bencana, kesulitan ekonomi, perceraian, dan di tinggal wafat oleh suami) sehingga membuat kedisiplinan anggota jadi berkurang. Sedangkan dari faktor eksternal berasal dari kemampuan TPL untuk mendampingi anggota dalam memotivasi anggota. Kemampuan ini sangat diperlukan untuk menjaga keaktifan anggota hadir dalam setiap pertemuan majelis. (YSN, 16 Mei 2012)

Kehadiran anggota menjadi salah satu kedisiplinan kelompok. Partisipasi anggota ditanamkan di dalam kelompok untuk menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama. Jika ada anggota yang tidak hadir karena alasan terkena musibah, maka anggota kelompok lain membantu melalui tabungan kelompok yang disimpan setiap kali pertemuan majelis. Selain itu, ketua majelis memimpin do'a bersama untuk anggotanya yang terkena musibah tersebut, dan jika dibutuhkan anggota kelompok lain membantu sesuai dengan kemampuannya. Kebiasaan ini selalu ditanamkan di dalam majelis untuk semua wilayah, kepedulian terhadap sesama anggota majelis merupakan hal yang utama dalam membangun solidaritas kelompok. Sehingga pertemuan majelis merupakan wahana interaksi setiap anggota untuk saling berkomunikasi antar sesamanya, maka disinilah letak penguatan kapasitas sosial dalam program layanan ini.

Dalam beberapa pertemuan mingguan di wilayah pelayanan Tamansari, proses pendampingan setiap majelis dilakukan selama satu jam. Waktu tersebut digunakan oleh TPL fokus mendampingi anggota, baik dalam pelayanan keuangan simpan pinjam maupun pendampingan yang berkaitan dengan masalah usaha, sekolah anak, dan kesehatan anggota (kehamilan dan persalinan). Dalam pertemuan ini, TPL menggali berbagai informasi yang dihadapi oleh anggota, serta memahami seluk beluk kehidupan anggota berikut masalah yang dihadapinya dan mampu berempati atau menempatkan diri dalam kepentingan

anggota. Dengan demikian, seorang TPL berada pada posisi yang simetris antara kepentingan koperasi dan kepentingan ibu-ibu anggota majelis. Sebagai contoh, dalam kasus Bu Aci dari Majelis Semangka yang merasa keberatan dengan sistem angsuran yang dikenakan oleh Koperasi BAIK dan berniat untuk keluar dari keanggotaan dan bahkan membubarkan majlisnya, maka YSN sebagai TPL majelis tersebut berusaha memahami apa yang menjadi sumber keberatan Ibu Aci tersebut dan membawa permasalahan ini untuk dibahas dalam rapat pengurus. Seperti Yang dikeleemukakan oleh salah satu TPL berikut ini :

“Ya... saya sih ngerti kalau Bu ACI ingin mundur soalnya dia harus nombokin terus angsuran anggota majlisnya padahal usaha suaminya lagi sepi. Saya berusaha menjelaskan masalah ini ke Supervisor, ya... supaya gimanalah, ada kebijakan gitu..., soalnya sayang, sebelumnya Bu ACI termasuk anggota majlis yang rajin, nggak pernah ada masalah. Saya nggak mau majlis ini bubar. (YSN, 16 Mei 2012)

Dalam pelaksanaannya, kondisi demikian tidak semuanya berjalan mulus. Masih banyak ditemukan anggota bermasalah yang tidak mematuhi segala kesepakatan kelompok. Kondisi ini membuat kinerja kelompok menjadi menurun dan membutuhkan upaya peran TPL untuk memperbaiki kelompok yang bermasalah tersebut.

6. *Monitoring* kinerja majelis/kelompok

Koperasi BAIK memiliki kebijakan bagi para pengurus, supervisor, dan TPL untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi. Kebijakan ini dibuat untuk mengetahui proses pemberdayaan yang dijalankan sesuai dengan standar pelaksanaan program yang ditetapkan oleh pengurus Koperasi BAIK. Kegiatan koordinasi dan konsolidasi dilaksanakan secara rutin dalam waktu harian, mingguan, dan bulanan. Agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut disesuaikan materi yang disampaikan oleh Supervisor selaku penanggung jawab di wilayah kerjanya, kemudian dari pengurus juga memberikan arahan yang sifatnya strategis untuk dilaksanakan oleh TPL dan Supervisor. Seperti yang dikemukakan oleh pengurus berikut ini :

Kegiatan harian dilakukan setiap sore sebelum jam kerja berakhir, kegiatan mingguan setiap hari jum'at (minggu II – IV) yang dihadiri oleh seluruh Pengurus, Supervisi, dan TPL di semua wilayah pelayanan, sedangkan kegiatan bulanan dilakukan setiap hari jum'at (Minggu I) yang pesertanya sama dengan kegiatan mingguan. Agenda yang dibahas dalam tiap kegiatan berbeda-beda, kegiatan harian membahas beberapa laporan teknis yang diutarakan oleh TPL dalam satu hari kerja, kegiatan mingguan membahas beberapa laporan oleh seluruh Supervisi dan TPL terkait proses pendampingan selama satu minggu, sedangkan kegiatan bulanan fokus pada laporan dan proyeksi pelayanan, seperti laporan keuangan, kegiatan sosial (misal : sunatan massal, kurban, sembako), dan perkembangan kelompok. (AMA, 25 Mei 2012)

Proses konsolidasi dan koordinasi menjadi bagian penting dalam menjaga interaksi antar Supervisi dan TPL. Hal ini sebagai proses bertukar cerita dan pengalaman tentang kendala yang dihadapi ditingkat anggota dan bersama-sama untuk mencari solusinya. Dalam salah satu pertemuan harian di sore hari mereka membahas beberapa masalah yang dihadapi anggota yang disampaikan oleh RNO, ICM, dan NNU sebagai TPL, ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mengganggu kelancaran pelayanan dan pendampingan di tingkat kelompok. Masalah yang dibahas terkait musibah yang dihadapi anggota yang terkena bencana longsor, dan ketidak-aktifan anggota untuk hadir dalam pertemuan rutin mingguan, berikut masalah yang dibahas (Wawancara tanggal 15 Mei 2012) :

- RNO : Ibu SRY dari Kelompok GA terkena musibah, rumahnya hancur karena bencana longsor, beliau menelpon saya menanyakan peluang memperoleh bantuan karena kena bencana. Ibu Soraya memiliki peluang memperoleh bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 2 jt, namun kabar itu masih belum pasti, menurut saya ini perlu ditindaklanjuti oleh kita dan kelompoknya supaya dia bisa kembali aktif di pertemuan kelompok.
- ICM : Ibu ATI dari Kelompok TG, 3 bulan ini sudah tidak hadir, kerena alasan malu tidak bisa mengangsur, pengeluaran rumah

tangganya cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan pekerjaan suaminya tidak menentu. Tabungan kelompok sudah tidak ada lagi, karena sudah banyak dikeluarkan untuk membantu angsuran Ibu ATI, pernah saya datang ke rumahnya untuk mengajak ke pertemuan, di hadir namun minggu depan ia tidak hadir.

NUU : Ibu NNI dari Kelompok CHG tidak hadir. Ia tidak memiliki uang untuk mengangsur, suaminya sedang dalam kesulitan ekonomi, pekerjaannya sebagai tukang ojeg penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tabungan kelompok dikeluarkan untuk membayar angsurannya, ditambah dana dari hasil penggalangan dari anggota yang lain. Rencananya, ketika angsurannya sudah lunas, ia memutuskan untuk keluar, karena ia sudah tidak mampu membuka usaha menopang ekonomi keluarga.

Dari hasil penyampaian masalah tersebut, Supervisor mencoba untuk mendalami informasi, kemudian mendiskusikan bersama dengan TPL. Berbagai alternatif pemecahan masalah diutarakan sebagai bahan pengambilan keputusan dengan mengedepankan kepentingan kelompok. Solusi yang bisa ditawarkan oleh Supervisi kepada TPL untuk mengatasi masalah di kelompok sebagai berikut :

Untuk RNO, coba didalami kembali informasi dari pemerintah terkait peluang Ibu SRY memperoleh bantuan Rp. 2 Jt, termasuk juga prosedur untuk memperoleh bantuan tersebut. Kemudian sampaikan di tingkat Kelompok Gunung Agung, dari informasi tersebut apa yang bisa dibantu untuk Ibu SRY, penyelesaian ada tingkat kelompok kita hanya sekedar membantu mengarahkan anggota untuk memperkuat solidaritas.

Untuk ICM dan NUU, coba ditawarkan kepada kelompoknya apakah bersedia pertemuan mingguan diadakan di rumah Ibu ATI dan NNI. Dalam kehidupan ekonomi yang sulit, kita mencoba untuk memotivasi kedua keluarga tersebut, minimal memberikan perhatian pada masalah yang dihadapinya melalui silaturahmi. Dengan begitu, kita memberikan proses

belajar bukan hanya dari membantu lewat tabungan anggota atau galangan dana, namun perhatian kelompok kepada yang terkena musibah melalui pertemuan mingguan dirumahnya. (RNO, ICM, NNU, 15 Mei 2012)

7. Perencanaan dan evaluasi pelayanan.

Perencanaan dan evaluasi pelayanan merupakan bagian dari kebijakan Koperasi BAIK untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proses pemberdayaan masyarakat melalui program pembiayaan mikro. Perencanaan dan evaluasi pelayanan program pembiayaan mikro dilakukan selama satu kali dalam setahun melalui suatu lokakarya, yang dihadiri oleh pengurus, supervisor, TPL, dan ketua kelompok anggota-anggota Koperasi BAIK. Seperti yang dikemukakan oleh pengurus Koperasi BAIK berikut ini :

Kegiatan lokakarya diadakan setiap tahun, tujuannya yaitu mengevaluasi seluruh aktivitas pemberdayaan masyarakat dan mencoba merumuskan perencanaan ke depan untuk menghasilkan rumusan program tahunan yang diterjemahkan menjadi rencana kegiatan dan anggaran tahunan (annual working plan & budget), serta proyeksi finansial. Semua anggota yang diwakili oleh ketua kelompoknya hadir dalam lokakarya ini, termasuk pengurus, supervisor, dan TPL berpartisipasi memikirkan koperasi ke depan, karena merekalah pemilik koperasi BAIK. (AMA, 25 Mei 2012)

Hasil-hasil lokakarya diturunkan dalam bentuk program sebagai acuan bagi pengembangan Koperasi BAIK di tahun berikutnya. Selain program pelayanan pinjaman dan tabungan serta pertemuan rutin majlis yang diadakan seminggu sekali dalam rangkaian program pembiayaan mikro, Koperasi BAIK juga membuat program-program yang mampu meningkatkan kapasitas bagi anggota dan tenaga pendamping, yaitu dengan memberikan beragam pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota majlis, seperti pelatihan kesehatan bayi dan ibu hamil, pelatihan kesehatan gizi, pelatihan pencegahan penyakit demam berdarah, pelatihan *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ), pelatihan manajemen keuangan rumah tangga dan lain-lain. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung program dalam mencapai tujuan (jangka pendek) yang diinginkan sebagai hasil yang diperoleh secara langsung dari kegiatan yang

Universitas Indonesia

dilakukan dan sumberdaya yang digunakan (Gambar 4.7). Ada pun hasil yang ingin dicapai oleh Koperasi BAIK, yaitu :

- 1) Meningkatkan jumlah tabungan anggota
- 2) Meningkatkan pendapatan rumahtangga
- 3) Meningkatkan asset rumah tangga
- 4) Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga (aspek pendidikan, kesehatan, dan keamanan pangan).
- 5) Meningkatkan kemampuan rumah tangga menaggulangi hal-hal darurat.



Gambar 4.7. Pengurus sedang Memfasilitasi Pelatihan bagi Anggota
Sumber : Dokumentasi Koperasi BAIK (2012)

4.2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program Pembiayaan Mikro

Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK, telah ditemukan beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

4.2.1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang memperlancar dalam proses pemberdayaan pada program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK terdiri dari : Kebijakan pemerintah dan Koperasi BAIK dalam program pembiayaan mikro, akses dan manfaat pembiayaan yang diterima oleh anggota, serta peran tenaga pendamping. Faktor-faktor tersebut ditemukan dari hasil pengumpulan data selama penelitian berlangsung, dimana ketiga faktor tersebut sebagai bentuk dukungan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang disajikan berikut ini :

1. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah dan Koperasi BAIK.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pengembangan koperasi di wilayah administratifnya merupakan dukungan bagi Koperasi BAIK dalam melaksanakan program pembiayaan mikronya di masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bogor 2008-2013 seperti yang dikemukakan oleh aparatur Dinas KUKM Perindag Kabupaten Bogor berikut ini :

Dinas saat ini sedang menjalankan amanah kebijakan pembangunan koperasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bogor. Kebijakan ini fokus pada optimalisasi sumber daya produktif dengan peningkatan pemberdayaan koperasi yang ada di wilayah kami dan diupayakan sejalan dengan perkembangan dunia usaha sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah dimana koperasi itu berdiri. Berkat kerja keras Pemerintah Kabupaten Bogor, alhamdulillah pada tahun 2011 Bapak Bupati berhasil mendapat penghargaan dibidang pengembangan perkoperasian di Kabupaten Bogor. Disamping itu juga Kabupaten Bogor dianugerahi Koperasi Berprestasi tingkat Nasional yang diraih oleh Kopti Bogor untuk kategori Koperasi Produksi Terbaik. (JYA, 04 Juni 2012)

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan kebijakan pengembangan Perkoperasian merupakan faktor pendukung bagi Koperasi BAIK. Melalui kebijakan internalnya, Koperasi BAIK mulai membangun jejaring dengan lembaga-lembaga keuangan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan perkoperasian di Kabupaten Bogor. Selain bantuan modal bergulir

dari Pemerintah Kabupaten Bogor, saat ini sudah ada beberapa perbankan yang terlibat dalam investasi pembiayaan di Koperasi BAIK, yaitu : Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Sinar Mas Syariah, *Baytul Maal* (BM), serta koperasi-koperasi lainnya yang berpartisipasi dalam pembiayaan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh pengurus berikut ini :

Kita juga tidak menafikkan bahwa kita bisa dikenal dan membangun jejaring karena peran teman-teman di koperasi lain, pemerintah, dan juga dari perguruan tinggi yang melakukan studi disini, menceritakan ke orang lain. Adanya beberapa perbankan syariah yang bekerja sama dengan kita berkat mereka, sehingga membuat kalangan tertarik dan bekerja sama dengan kita. Jadi semuanya kami jadikan sumberdaya untuk membangun sebuah jaringan bagi kepentingan koperasi BAIK. Karena keterlibatan mereka bisa mendorong program kami, seperti BMI, BSM, Sinar Mas, dan sebagainya. (LTF, 10 Maret 2012)

2. Akses dan manfaat pembiayaan dalam pelaksanaan program

Program kredit mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK secara langsung menjadi kebutuhan masyarakat, keterbatasan pada akses permodalan yang menjangkau masyarakat miskin di pedesaan relatif sedikit. Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa alasan masyarakat memutuskan ikut bergabung menjadi anggota antara lain, yaitu : *pertama*, sudah ada proses pelaksanaan program yang sedang berjalan sehingga menimbulkan minat bagi masyarakat yang belum bergabung untuk menjadi anggota. *Kedua*, sistem yang diterapkan dalam program melalui pola pengorganisasian kelompok yang sesuai dengan budaya lokal masyarakat setempat yang masih menjunjung nilai guyub (mencerminkan saling asah, asih, dan asuh), dimana menurut masyarakat sendiri sangat berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh Bank Keliling (rentenir) yang sering menawarkan pinjaman melalui pendekatan individu. *Ketiga*, mekanisme pembiayaan yang diterapkan melalui dana bergulir dengan pola tanggung-renteng yang memberikan kemudahan dan kesempatan bagi anggota untuk mengangsur dan menabung sesuai keputusan kelompok. Hal senada juga diungkapkan oleh salah beberapa ketua kelompok berikut ini :

Universitas Indonesia

..... Alhamdulillah ikut jadi anggota enak, bayarnya bisa dicicil terus kelompok selalu kompak kalau ada masalah... seperti bayar uang iuran aja, terus usaha keluarga juga bisa lumayan hasilnya... usaha keluarga saya berkembang. Bayar angsuran juga lancar... kalau ada lebihnya bisa nabung, alhamdulillah di koperasi uangnya aman.....

..... Di sini banyak yang nawarin pinjaman.... ada dari bank keliling ada juga dari orang-orang yang suka minjem uang, kadang-kadang mereka suka datang ke warung dan rumah-rumah, kalau saya nggak mau sebab bunganya kan tinggi. Udah gitu, saya hanya mengandalkan dari keuntungan warung aja, jadi lebih enak di koperasi atuh kalau gitu.....

..... Ibu-ibu anggota ikut disini lebih enak daripada di rumah melamun jadi stres kalau ngumpul-ngumpul kan bisa bercanda dengan yang lain, bisa curhat gitu, ada masalah kita obrolin sama anggota lain. Ketua kelompok mah punya tanggung jawab kalau anggotanya ada masalah masalahnya selesai... kalau selesai mah, kelompok kita mah bagus gitu.... (WRI, ENH, YNI, Wawancara Tanggal 29 Mei 2012)

Pilihan anggota ikut terlibat sebagai peserta program pembiayaan mikro dikarenakan resiko pengembalian pinjaman merupakan tanggung jawab kelompok. Jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa mengangsur, maka kelompok lainnya bertanggung jawab untuk memikirkan membantu anggotanya bisa membayar. Jika masalah ini bisa diselesaikan oleh kelompok, maka kelompok ini benar-benar memahami makna berkoperasi sesuai dengan materi yang mereka peroleh saat mengikuti LWK. Mekanisme kelompok seperti ini yang membuat tingkat resiko pengembalian relatif kecil. Dari tahun 2008 – 2010 resiko tingkat pengembalian relatif kecil yang masing-masing nilainya sebesar 1,9 persen, 0,6 persen, dan 0,7 persen dengan jangka waktu tunggakan 1 (satu) hingga lebih dari 4 (empat) bulan. Seperti diperlihatkan pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel. 4.8. Nominal Perkembangan Tingkat Kelancaran Angsuran

Kriteria	2008	2009	Des 2010
Pinjaman Lancar	956,596,201	1,734,763,800	2,307,696,800
Tertunggak 1-30 hari	478,148,249	273,547,000	737,852,065
Tertunggak 31-60 hari	25,099,083	3,968,000	10,607,400
Tertunggak 61-90 hari	988,084	2,215,000	4,653,092
Tertunggak 91-120 hari	792,085	1,196,000	4,848,000
Tertunggak >120 hari	1,028,086	3,197,000	1,555,333
T o t a l (T)	1,462,651,788	2,018,886,800	3,067,212,690
PAR	1.91%	0.60%	0.71%

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2010)

Kelancaran tingkat pengembalian tersebut merupakan hasil dari kerja keras pengurus, Supervisor, dan TPL dalam mengawal keberlanjutan program yang diterapkan di tingkat kelompok. Kebijakan penumbuhan kelompok dilakukan melalui mekanisme rekrutmen yang cukup ketat, melalui proses UK dan LWK kelompok ditanamkan nilai-nilai kesadaran, kebersamaan, dan tolong menolong sesama anggota. Sebab dipungkiri bahwa dalam proses UK dijadikan sebagai cara untuk memperoleh informasi tentang pola kehidupan anggota, dari data tersebut dapat menjadi syarat penilaian penerimaan anggota, serta dikuatkan lagi dengan pemahaman anggota tentang berkoperasi sebagai wadah membangun kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

3. Peran tenaga pendamping

Untuk mengatasi permasalahan di tingkat kelompok, pengurus Koperasi BAIK memberikan kesempatan bagi para Supervisor dan TPL menghadapi persoalan anggota yang dihadapi oleh kelompok. Sebab peran tenaga pendamping sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan kelompok untuk bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro. Kerajinan, kedisiplinan, kehadiran, menabung, dan mengangsur di tingkat kelompok merupakan tanggung jawab TPL, dan jika ada permasalahan kelompok, maka peran TPL untuk memfasilitasi masalah tersebut. Pengalaman yang dimiliki TPL membuktikan kemampuannya memfasilitasi persoalan yang dihadapi anggota, dengan kapasitasnya sebagai fasilitator dan *enabler* merupakan faktor pendukung TPL mampu mendampingi kelompok secara profesional. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu TPL berikut ini :

Universitas Indonesia

Biasanya peran pendampingan yang dilakukan oleh TPL menghadapi masalah pembayaran anggota yang macet. Di sini peran TPL sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi persoalan tersebut. Jika TPL kurang berpengalaman, mereka sharing dengan teman2 TPL lain dan supervisor, dengan anggota juga, pendampingan, dimana fokusnya berjalan dengan teman-teman TPL. Tapi harus didukung. Atau ada juga mungkin, biasanya mereka menemui problem atau masalah di lapangan yang mereka tidak bisa mengatasi, itu kita musyawarahkan, lebih memfasilitasi untuk mereka. Dimana mereka juga sering mengadu ada masalah seperti ini, dan solusi seperti ini. Jika di lain waktu ada masalah yang sama, mereka bisa menyelesaikannya sendiri. (KMR & IMM. 03 Mei 2012)

TPL yang mampu bekerja secara profesional bisa memposisikan dirinya setara dengan anggota, TPL bukan menanggap dirinya lebih tinggi dibandingkan anggota, melainkan setara dan berupaya belajar bersama menyelesaikan persoalan bersama. Belajar bertindak bersama merupakan yang pemahaman yang dipegang teguh oleh tenaga pendamping dalam memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat, baik dari sisi penguatan kelompok maupun pelayanan pembiayaan mikro. Sering kali para TPL melakukan pendekatan kepada anggota yang bermasalah di kelompoknya, bahkan rela menemui secara pribadi untuk mengajaknya datang kembali ke pertemuan rutin walaupun tidak mengangsur.

4.2.2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam proses pemberdayaan pada program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK terdiri dari : Faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut ditemukan dari hasil pengumpulan data selama penelitian berlangsung, dimana faktor-faktor tersebut sebagai kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana disajikan berikut ini :

1. Faktor Internal

Kebijakan penyaluran pembiayaan bagi usaha non-produktif menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program. Dari data UK anggota yang

dilakukan di Kecamatan Tenjolaya – Kabupaten Bogor, terlihat bahwa pengguliran pembiayaan sekitar 46 persen disalurkan kepada anggota yang bekerja sebagai buruh, dimana mereka memperoleh penghasilan tetap (harian, mingguan, atau bulanan) yang diharapkan mereka bisa membayar angsuran secara rutin, kemudian 27,5 persen disalurkan kepada anggota yang bekerja sebagai wirausaha, 24 persen disalurkan bagi anggota yang bekerja sebagai petani, pembantu RT, dan sebagainya. Sedangkan sekitar 2 persen disalurkan kepada IRT yang hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan suami dan anak-anaknya. Seperti diperlihatkan pada Tabel 4.9.

Kondisi ini mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan penting untuk mendongkrak status sosial ekonomi anggota. Pemanfaatan pembiayaan yang bertujuan untuk membantu dan mengatasi ekonomi rumah tangga, terkendala oleh penyaluran pembiayaan yang belum banyak menyentuh usaha ekonomi rumah tangga. Dampaknya adalah proses pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal sehingga mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan program di tingkat kelompok. Kebijakan yang kurang efektif akan mempengaruhi pencapaian program, baik dari sisi teknis maupun substantif di dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Tabel. 4.9. Pengguliran Pembiayaan terhadap Jenis Usaha Anggota (2011)

No	NAMA MAJELIS	Pekerjaan Anggota (Orang)				Total
		Buruh	IRT	Wirausaha	Petani, Jasa, dll	
1	Gn. Agung	2	0	6	8	16
2	Gn. Arcadomas	0	0	7	8	15
3	Gn. Bromo	1	0	13	1	15
4	Gn. Ceremei	16	0	4	0	20
5	Gn. Galunggung	11	0	5	4	20
6	Gn. Gede	9	4	2	0	15
7	Gn. Geulis	19	1	0	0	20
8	Gn. Halimun	7	0	2	1	10
9	Gn. Himalaya	14	0	7	0	21
10	Gn. Jati	12	2	1	0	15
11	Gn. Jaya wijaya	7	0	10	3	20
12	Gn. Jayanti	16	0	4	2	22
13	Gn. Kapur	12	0	3	1	16
14	Gn. Kelud	3	0	4	3	10
15	Gn. Kerinci	3	0	4	13	20
16	Gn. Krakatau	15	0	5	0	20
17	Gn. Merapi	7	0	4	4	15
18	Gn. Merbabu	0	0	3	17	20

(Lanjutan)						
19	Gn. Pancar	0	0	3	17	20
20	Gn. Pangrango	12	0	8	5	25
21	Gn. Papandayan	15	0	2	3	20
22	Gn. Puji	7	0	3	5	15
23	Gn. Putri	12	0	1	2	15
24	Gn. Rinjani	16	0	2	2	20
25	Gn. Salak	6	0	7	2	15
26	Gn. Sari	15	4	1	0	20
27	Gn. Sawal	0	0	2	18	20
28	Gn. Semeru	5	0	7	3	15
29	Gn. Sindur	0	0	11	9	20
30	Gn. Slamet	2	0	14	0	16
31	Gn. Teras	2	0	9	4	15
32	Gn. Wilis	14	0	1	1	16
Total		260	11	155	136	562
Persentase		46.26%	1.96%	27.58%	24.20%	100.00%

Sumber : Telah diolah kembali (Koperasi BAIK, 2011)

Kebijakan Koperasi BAIK tersebut telah mengalami berbagai permasalahan di tingkat kelompok. Banyak ketua kelompok menghadapi persoalan anggotanya yang tidak bisa membayar, program yang dilaksanakan melalui pola “tanggung-renteng,” menyebabkan masalah kemacetan angsuran diserahkan kepada kelompok, sehingga kelompok tersebut yang menanggungnya. Seperti yang dikemukakan ketua dan anggota kelompok berikut ini :

..... Makin ke sini saya memimpin kelompok memang terasa berat, Sekarang cicilannya naik dan terasa berat, udah gitu gak bisa minta penundaan sama koperasi, setiap minggu semua anggota wajib bayar angsuran dan tabungan kelompok. Kan gini ada anggota saya yang tidak bisa bayar cicilan, terus tetap harus bayar, sedangkan uang kelompok udah habis buat nalangin, sampe-sampe sama saya ditalangin dulu gitu....

..... Kalau boleh jujur mah, banyak ibu-ibu anggota disini ingin pinjam uang lagi lebih gede jumlahnya tapi nanti takut gak kuat bayarnya..... klu ibu-ibu punya yang punya usaha kan enak, bisa punya uang buat ngangsur, kalo yang gak punya atuh kumaha....? ngandelken suami atuh uangnya cukup buat makan, kalau saya sudah nggak bisa kerja apa-apa. Buat makan saja susah. Enteu kumaha atuh, arek punya warung encan tercapai iyeu.....

(MMH & YYN. Wawancara Tanggal 28 Mei 2012)

Masalah yang dihadapi oleh anggota Koperasi BAIK di atas merupakan penghambat yang dihadapi oleh pengurus. Permasalahan yang dihadapi anggota saat ini adalah bagaimana menguatkan kembali komitmen bersama seperti yang mereka sepakati dalam LWK, jika anggota sudah tidak ada komitmen, maka akan menyebabkan mundurnya anggota dan memutuskan untuk keluar dari program.

Fenomena mundur atau berhentinya anggota menjadi hal yang biasa yang disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk mengangsur pinjaman. sebab anggota tersebut merasa malu dengan anggota kelompok lainnya karena tidak bisa memenuhi komitmen kelompok untuk mengangsur, pada akhirnya ia mengundurkan diri menjadi anggota. Internalisasi nilai-nilai yang ditanamkan pada saat LWK belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh anggota jika budaya saling toleransi, tolong-menolong, dan “tanggung-renteng,” belum melekat pada diri kelompok. Peran TPL dalam mengatasi hal tersebut selama ini dianggap kurang menyelesaikan akar permasalahan. Peran TPL lebih banyak terbebani oleh urusan administrasi keuangan sebagai ukuran penilaian kinerja kelompok. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam proses pemberdayaan melalui pembiayaan mikro, dimana dalam setiap pertemuan rutin yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam, hanya bisa digunakan untuk mengurus administrasi dan keuangan kelompok, sedangkan kelompok yang dilayani dalam sehari sekitar 5-7 majelis (kelompok besar), sehingga sedikit sekali waktu yang dibutuhkan untuk menguatkan kapasitas kelompok dalam proses pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh TPL berikut ini :

Setiap hari dari senin sampai kamis saya bertugas sebagai TPL di desa Sukaluyu, saya berangkat dari rumah jam 7.15 wib, terus sampe kantor unit biasanya jam 8 kurang, habis itu menyiapkan administrasi harian untuk kelompok, mulai dari absensi, formulir tabungan, angsuran, dll gitu deh, hehhe... Kira-kira jam 9-an saya baru mulai datang ke majelis-majelis, yah tiap hari paling banyak 7 lah, biasanya sih bisa selesai sampe jam 2-an siang, kalau udah beres kita semua kumpul di kantor sambil mencatat semua transaksi keuangan harian, kalau gak sempet yah dikerjain di rumah,, hehehe... abis banyak juga tugas2 harian kita, trus jam 4-5 sore kita ada

briefing sama temen2, ya bahas masalah2 kelompok gitu... biasanya kita sharing aja masalahnya apa dan solusinya gimana... makanya kita mah belajar dari pengalaman temen2 yang udah pernah ngadepin duluan gimana nyelesaiin masalah... hehehe...(YSN, 16 April 2012)

Kondisi di atas merupakan bagian dari tugas-tugas TPL yang memang bisa dikatakan cukup berat, karena selain kemampuan menyelesaikan administrasi, juga diminta mampu mengatasi persoalan kinerja keuangan anggota. Kebijakan Koperasi yang ketat, menuntut TPL bekerja secara profesional demi memperoleh kinerja koperasi yang baik di mata publik. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, sering pengurus melakukan mutasi TPL dari satu wilayah ke wilayah pelayanan lain dengan melihat jeli secara konteks permasalahan dari laporan keuangan maupun informasi dari tenaga pendamping, sehingga langsung memutuskan dilakukan mutasi TPL.

2. Faktor Eksternal

Berbagai kesuksesan tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Koperasi BAIK, juga menghadapi berbagai permasalahan yang dipengaruhi oleh tuntutan perkembangan dunia usaha dewasa ini. Pengembangan program koperasi untuk meningkatkan usaha anggota di berbagai sektor perekonomian melalui peningkatan kualitas usaha produktif, ternyata mengalami hambatan dari segi pengembangannya. Usaha yang dijalankan anggota ternyata belum memiliki daya daya tawar dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Usaha yang dijalankan terhambat oleh faktor produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar (korporasi), sehingga usaha mereka kalah dalam persaingan pasar. Seperti yang dikemukakan aparaturnya dinas berikut ini :

Kami mengakui bahwa meskipun pertumbuhan koperasi di Kabupaten Bogor cukup signifikan, namun dalam pengembangannya masih menghadapi sejumlah masalah yang dihadapi oleh anggota, yaitu : Pertama, masih terbatasnya kemampuan, keterampilan, wawasan SDM, anggota koperasi sehingga mengakibatkan masih lemahnya kinerja organisasi, manajemen dan usaha. Kedua, minim dan lemahnya struktur

Universitas Indonesia

permodalan, pemupukan modal sendiri dan terbatasnya akses permodalan pada sumber modal dari luar. Ketiga, masih terbatasnya akses pemasaran terutama dalam menghadapi persaingan usaha yang berhadapan langsung dengan pelaku usaha yang punya modal besar. (JYA, 04 Juni 2012)

Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bogor juga dialami oleh Koperasi BAIK dalam mengembangkan program pembiayaan mikro di tingkat anggota. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya, dengan terbukanya investasi dari berbagai perbankan nasional tersebut menuntut pengurus Koperasi BAIK bekerja secara profesional seperti layaknya kinerja perbankan. Ukuran keberhasilan kinerja keuangan menjadi target dominan dibandingkan upaya-upaya menguatkan kapasitas sosial ekonomi anggota menuju kemandirian taraf hidupnya. Hal ini diakui oleh salah satu pengurus berikut ini :

Akibat kebijakan mengikutkan lembaga perbankan berinvestasi di dalam program, dampaknya luar biasa. Sebelum kami mengikutsertakan mereka margin yang kita tetapkan maksimal hanya 10% sekarang menjadi 24%, pernah ada yang bilang begini : pinjaman Rp. 500.000 dengan margin 10% menjadi Rp. 550.000,- dimana angsuran hanya Rp. 11.000,-/minggu (angsuran Rp, 10.000,- ditambah margin Rp.1000,-). Nah sekarang menjadi Rp. 12.500,-/minggu, kan yang dilihat rupiahnya, bukan persentasinya (itu masyarakat), kalau mereka itu berapa rupiah. Itu adalah perjuangan bagi kita bagaimana memberikan pemahaman kepada anggota tentang perubahan tadi. Kita menaikkan margin “menjerit” anggota, ini menjadi pertempuran yang sangat besar, karena merubah margin dari 10% ke 24 % itu hal yang drastis, akibatnya banyak anggota yang keluar. Salah satu alasan anggota keluar akibat kebijakan itu. Akibat kebijakan itu, sekitar 800 orang yang keluar, dari 800 orang itu salah satunya disebabkan banyak mempertanyakan angsuran sekarang mahal. (LTF, 10 Maret 2012)

BAB 5

ANALISIS

5.1. Analisis Proses Pemberdayaan pada Program Pembiayaan Mikro

Konteks pengembangan masyarakat pada dasarnya meletakkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan mengedepankan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya mengarah pada pembangunan yang merata dan berkeadilan, khususnya pada pembangunan masyarakat desa. Istilah ini disebut sebagai *people-centred development* sebagai suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumberdaya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan (Bab II : 40).

Paradigma *people-centred development* sebagai wujud alternatif konsep pembangunan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di dunia ketiga. Penduduk miskin semakin banyak jumlahnya ketiga pembangunan dunia berjalan ke arah era globalisasi, dengan mengedepankan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi namun menanggalkan aspek sosial sebagai subjek pembangunan, sehingga muncul masalah baru dalam proses pembangunan tersebut, yaitu kemiskinan. Sejak beberapa dekade yang lalu, para pakar sudah mengkritik berbagai konsep pembangunan yang hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan, karena akan menimbulkan masalah sosial yang serius, yaitu kesenjangan sosial pada masyarakat yang umumnya terjadi pada penduduk pedesaan.

Untuk menjawab masalah kemiskinan, para pakar tersebut mengajukan berbagai gagasan dalam menjawab persoalan tersebut. Gagasan Sajogyo dan *Chambers* (Bab II : 29) dapat dimaknai bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia dilakukan melalui penguatan kebijakan di sektor pangan (pertanian), sedangkan realisasi dari kebijakan tersebut mengacu salah satu upayanya melalui pemberdayaan agar orang miskin berdaya dan keluar dari *deprivation trap* di tengah kesulitan hidup yang melilitnya, terutama masyarakat pedesaan.

Dalam upaya mencapai pembangunan yang sinergis antar sektor, pemerintah selaku pengambil dan pelaksana kebijakan telah mengupayakan melalui program pengentasan kemiskinan. Seperti yang dikemukakan oleh Dirjen PMD Depdagri (1996 : 4) menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Salah satu wujud dari implementasi pembangunan yaitu program pembiayaan mikro yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan bagi anggota yang dilakukan oleh Koperasi BAIK.

Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan program tersebut dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dalam menganalisa pemberdayaan masyarakat secara spesifik dijelaskan oleh *Narayan* (Bab II : 42). Pemberdayaan disini dimaknai sebagai sebuah intervensi yang merupakan upaya untuk memperkuat sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan sendiri masa depannya. Penekanannya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan agar anggota koperasi memahami manfaat dan peranannya dalam program pembiayaan mikro, mampu merumuskan kebutuhan dengan potensi/sumberdaya yang dimiliki, mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, serta mampu menyusun rencana kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, yang lebih penting adalah anggota mampu membangun kekuatan ekonomi kelompok atas dasar usaha bersama dalam menentukan dan memandirikan taraf hidup yang lebih baik.

5.1.1. Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Pembiayaan Mikro

Mengingat pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah proses tanpa menafikan hasil (output), maka Koperasi BAIK menetapkan kebijakan sebagai dasar implementasi program pembiayaan mikro di level komunitas dan anggota koperasi. Sejak tahun 1999 sebagai pondasi pelaksanaan program pembiayaan mikro yang dilaksanakan oleh Yayasan Peramu, kini bernaung dalam wadah Koperasi yang berbasis komunitas. Dengan menjadi sebuah organisasi formal, Koperasi BAIK mengembangkan diri sebagai organisasi sosial ekonomi.

Koperasi BAIK terus mempertahankan pelaksanaan kegiatan pembiayaan mikro diwujudkan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Sebab kegiatan-kegiatan tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan hakekat pemberdayaan yang mencoba mengangkat ekonomi rumah tangga melalui penguatan kapasitas kelompok (Bab III : 74-88). Kegiatan simpan-pinjam sebagai bentuk dalam rangkaian program pembiayaan mikro merupakan salah satu kegiatan utama, sebagai *entry point* pemberdayaan rumah tangga miskin agar mereka berdaya dan berdikari dalam peningkatan ekonomi keluarga.

Keberadaan lembaga keuangan di pedesaan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan sebagai intermedator antara individu yang ingin menabung dan yang ingin meminjam. Gagasan *Smith* (Bab II : 35) menyebut kegiatan simpan pinjam baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kapasitas perempuan dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarganya. Dalam perekonomian modern, modal berperan besar dalam pembangunan ekonomi sehingga akses kepada lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usahanya.

Sejalan yang dikemukakan *Narayan* (Bab II : 43) bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu komunitas didukung oleh beberapa elemen dalam meningkatkan kapasitas kelompok, di antaranya adalah akses, partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal sebagaimana diuraikan berikut ini :

1 Akses & Informasi.

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Kekuasaan di sini tidak didefinisikan secara harfiah begitu saja, melainkan pengertian kekuasaan ini merupakan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya.

Program pembiayaan mikro yang dilaksanakan Koperasi BAIK berusaha untuk meningkatkan akses rumah tangga miskin melalui kegiatan simpan pinjam. Pemberdayaan ekonomi melalui model ini diharapkan sejalan dengan hasil

Microcredit Summit (MS) yang salah satunya mampu mengangkat *Reaching the poorest* (menjangkau orang yang paling miskin). *The poorest* yang dimaksud adalah masyarakat paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (*economically active*). Secara internasional mereka dipahami merupakan separuh bagian bawah dari garis kemiskinan nasional (Ismawan, Bab II : 37).

Melalui kegiatan simpan pinjam anggota memperoleh akses terhadap informasi-informasi baru yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan. Informasi ini termanifestasi dalam kegiatan pelatihan dan diskusi yang secara berkala diselenggarakan melalui pertemuan rutin kelompok dan juga kegiatan yang dikerjasamakan dengan lembaga lainnya (Bab III : 81-86). Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan wadah bagi anggota dalam berpartisipasi untuk memperoleh akses dan informasi bagi pengembangan taraf hidupnya.

2 Partisipasi.

Pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan “dari bawah” dan melibatkan lembaga seperti individu dan kelompok. Partisipasi secara sederhana dipahami sebagai bentuk keterlibatan komunitas miskin terhadap peranannya di dalam aktivitas pemberdayaan. Lebih jauh lagi ungkapan *Conyers* (Bab II : 45) terkait keterlibatan masyarakat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi, di antaranya adalah masyarakat akan merasa lebih dihargai apabila keterlibatan (partisipasi) mereka berpengaruh terhadap suatu kebijakan tertentu dan berpengaruh langsung terhadap apa yang mereka rasakan.

Partisipasi muncul sebagai bentuk keterlibatan berbagai pihak, yaitu anggota layanan, tenaga pendamping, pengurus koperasi, pemerintah, dan swasta yang masing-masing memiliki peran dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Partisipasi anggota diwujudkan melalui keterlibatannya dalam aktivitas pertemuan kelompok sebagai bentuk penguatan kapasitas sosial ekonominya. Pemberdayaan masyarakat melalui program pembiayaan mikro mustahil akan terlaksana sesuai tujuannya jika partisipasi anggotanya relatif kecil. Peran tenaga pendamping dan pengurus Koperasi BAIK yaitu menstimulasi partisipasi anggotanya agar mereka berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Bentuk-bentuk peranan tenaga pendamping sangat mempengaruhi efektivitas partisipasi anggota kelompok (Bab IV : 98-103). Kebijakan pengurus bisa dikatakan cukup sesuai dalam mendesain keterlibatan dan peran tenaga pendamping dalam memfasilitasi kegiatan di tingkat kelompok. Problematika yang muncul di setiap kelompok diupayakan bisa difasilitasi oleh tenaga pendamping melalui aktivitas yang menekankan permasalahan kelompok bisa diselesaikan melalui partisipasi aktif anggotanya tersebut. Partisipasi anggota, tenaga pendamping dan pengurus Koperasi BAIK menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap aktivitas pemberdayaan masyarakat. Tinggal bagaimana peran pengurus masuk kepada partisipasi aktif lembaga eksternal dalam mendukung aktivitas pemberdayaan yang dilakukan, yaitu dengan melibatkan peran pemerintah dan swasta dalam mengembangkan masyarakat.

3 Akuntabilitas.

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan Koperasi BAIK dalam mempertanggungjawabkan kepada pihak internal maupun eksternal terhadap kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah, perusahaan swasta atau perguruan tinggi yang ikut terlibat dan berperan aktif dalam pengembangan program pembiayaan mikro juga dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, tindakan serta pendanaan yang mendukung pelaksanaan tindakan tersebut.

Akuntabilitas Koperasi BAIK diwujudkan melalui keterbukaan pada proses pemberdayaan melalui program pembiayaan mikro. Dalam melaksanakan akuntabilitas tersebut, Koperasi BAIK saat ini memiliki *website* yang di dalamnya berisi informasi tentang proses pelaksanaan program pembiayaan mikro, baik dari sisi kemajuan anggota, penyaluran pembiayaan, dan laporan kinerja keuangan yang bisa dikonsumsi oleh publik. Selain itu, bentuk lain dari akuntabilitas ini dengan melakukan kerjasama sebagai wujud membangun jejaring dengan kelembagaan eksternal yang fokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Lihat : <http://koperasi-baik.org/>). Institusi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi merupakan lembaga yang *concern* dan peduli terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Koperasi BAIK, dan hal ini membuktikan bahwa jejaring merupakan kunci bagi pengembangan program yang akuntabel.

Keterlibatan peran pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui kebijakan dan kerjasama yang selama ini dilakukan bersama Koperasi BAIK. Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan dan pemberdayaan koperasi BAIK sejalan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan, khususnya di Kabupaten Bogor. Bentuk kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengembangan koperasi dan pembiayaan mikro termaktub dalam peraturan dan perundang-undangan serta program-program yang dilaksanakan (Bab III : 67-73). Upaya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pengambil dan pelaksana kebijakan untuk merealisasikan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor sejalan dengan pembangunan nasional.

Kemudian dalam proses pencapaian pembangunan tersebut peran swasta dan perguruan tinggi cukup penting sebagai instrumen membangun kerja sama antar pemangku kepentingan. Peran swasta sangat besar dalam membangun kerjasama dengan Koperasi BAIK, yaitu melalui investasi bagi pengembangan kinerja pembiayaan agar proses pemberdayaan berjalan dengan efektif mencapai tujuan bersama, mengangkat taraf hidup anggota dan perluasan skala ekonomi (Bab III : 74). Selain itu, perguruan tinggi mampu menghasilkan karya-karya akademik dengan menggabungkan kajian teoritik dan empirik yang berguna bagi pengembangan masyarakat secara sinergis. Berbagai pemangku kepentingan ini saling bekerjasama secara terbuka dan transparan sebagai wujud membangun kebersamaan yang akuntabel sejalan dengan pembangunan.

4 Kapasitas Organisasi Lokal

Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program pembiayaan mikro, anggota tergabung dalam kelompok-kelompok kecil yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan pendampingan agar mereka saling mendukung satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kelompok kecil ini dikelola melalui penguatan kapasitas sebagai kunci dari efektifnya sebuah pemberdayaan masyarakat lokal.

Penguatan kapasitas kelompok dilakukan mulai dari penerimaan anggota baru (Bab IV : 118). Wadah kelompok dijadikan wahana bagi anggota untuk beraktivitas dalam kerangka pelaksanaan program pembiayaan mikro. Di dalam kelompok ini, anggota dapat menyuarakan pendapatnya melalui pengelolaan yang terorganisir agar suara mereka menjadi perbaikan bagi dirinya dan kelompoknya. Dalam kaitannya dengan kegiatan program pembiayaan mikro, kelompok-kelompok di wilayah dampingan merupakan representasi dari organisasi lokal. Setiap kelompok mengorganisasikan diri, dan membentuk jaringan-jaringan kelompok yang dapat bekerja sama untuk memperoleh kerjasama sosial ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, penguatan kapasitas kelompok belum maksimal disebabkan oleh minimnya partisipasi anggota yang berdampak munculnya fenomena rendahnya tingkat keaktifan kelompok, sehingga menjadi masalah dalam kegiatan pemberdayaan (Bab IV : 102). Kemudian, pemahaman dan keterampilan tenaga pendamping dalam memfasilitasi kegiatan kelompok merupakan kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan. Banyaknya masalah yang dihadapi oleh anggota dan kelompok mempengaruhi kinerja kelompok membutuhkan keterampilan tenaga pendamping untuk memfasilitasi kelompok sesuai dengan perannya dalam aktivitas pendampingan.

5.1.2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Proses pelaksanaan kegiatan pembiayaan mikro melalui pemberdayaan yang telah diuraikan di atas, sangat terkait dengan tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi BAIK. Tahapan pemberdayaan yang dimiliki oleh Koperasi BAIK pada dasarnya sejalan dengan tahapan secara teoritik, namun ada sedikit perbedaan yang kiranya cukup mendasar dalam proses pemberdayaan masyarakat. Jika pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses tanpa menafikkan tujuan, maka diperlukan sinergitas kajian teoritik dan empirik agar proses pemberdayaan tersebut sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Pada Tabel 5.1 memperlihatkan kondisi realitas dan teoritik terhadap pelaksanaan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi BAIK dengan tahapan menurut Adi (2003) yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1. Matriks Keterlibatan Pelaku dalam Tahapan Program

Tahapan Koperasi BAIK	Keterlibatan Pelaku		
	Tenaga Pendamping	Anggota	Pengurus
1. Pemilihan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan Pengkajian Wilayah; ➢ Pengamatan langsung; ➢ Wawancara dengan warga desa. 	-	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menampung laporan hasil dari tenaga pendamping ➢ Memberikan masukan dan arahan yang tepat bagi penetapan wilayah sasaran program.
2. Persiapan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sosialisasi Program ke masyarakat; ➢ Melakukan pendataan calon anggota baru koperasi; ➢ Memberikan formulir UK; ➢ Wawancara di rumah calon anggota. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menghadiri sosialisasi program ➢ Jika tertarik, Mengisi formulir UK ➢ Diwawacara oleh tenaga pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Berperan sebagai komite UK yang bertugas menetapkan jumlah penerimaan calon anggota baru.
3. Penerimaan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memfasilitasi kegiatan LWK selama 3 hari berturut-turut; ➢ Memfasilitasi pembentukan kelompok; ➢ Memfasilitasi proses pemilihan ketua kelompok dan majelis; ➢ Memfasilitasi penetapan mekanisme 2-2-1 di tingkat kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Wajib mengikuti LWK; ➢ Membentuk kelompok dan majelis; ➢ Memilih ketua kelompok dan majelis. ➢ Memilih dan menetapkan anggota melalui mekanisme 2-2-1 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memberi masukan dan arahan kepada TPL terhadap proses fasilitasi LWK
4. Pelayanan Pinjaman & Tabungan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memfasilitasi proses pencairan pinjaman pada pertemuan rutin berdasarkan mekanisme 2-2-1 di tingkat kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyaksikan proses pencairan pinjaman kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memiliki kewenangan dalam menetapkan jumlah penyaluran pembiayaan.
5. Pertemuan Rutin	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memfasilitasi pertemuan rutin; ➢ Memimpin membaca do'a dan ikrar anggota; ➢ Memfasilitasi dan mencatat angsuran, tabungan, penarikan tabungan anggota; ➢ Memfasilitasi keluhan anggota di tingkat kelompok dan menguatkan solidaritas antar anggota kelompok; ➢ Menguatkan partisipasi anggota untuk selalu hadir dalam pertemuan rutin, membayar angsuran, dan menabung. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menghadiri pertemuan rutin; ➢ Membaca bersama-sama ikrar kelompok dengan TPL ➢ Membayar angsuran, menabung, dan menerima pencairan pinjaman; ➢ <i>Sharing</i> dengan TPL terhadap keluhan yang dihadapi oleh anggota kelompok; ➢ Menguatkan kerajinan dan solidaritas anggota. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengontrol semua aktivitas pelayanan di dalam pertemuan rutin kelompok; ➢ Memberi masukan dan arahan dalam memfasilitasi kegiatan pelayanan, serta masalah yang dihadapi oleh kelompok.
6. Monitoring & Penilaian Kinerja Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar tenaga pendamping; ➢ Melaporkan proses pendampingan di tingkat kelompok. 	-	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menerima laporan perkembangan kinerja kelompok; ➢ Memberi masukan dan arahan kepada tenaga pendamping terhadap kinerja kelompok.
7. Evaluasi & Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengikuti lokakarya tahunan; ➢ Mengikuti program dan kegiatan yang diselenggarakan pengurus. 	-	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyelenggarakan lokakarya tahunan; ➢ Melaporkan kinerja koperasi selama setahun; ➢ Membuat perencanaan program

Sumber : Telah diolah kembali

Keteraturan dan kesinambungan melakukan tahapan dalam proses pemberdayaan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan aktivitas pemberdayaan. Untuk itu, tabel di atas perlu dikaji secara teoritik untuk mengetahui keterkaitannya dengan praktek dilapangan. Mengacu pada tahapan pemberdayaan yang dikemukakan Adi (Bab II : 47) bahwa secara umum proses pemberdayaan dilakukan melalui 7 (tujuh) tahapan. Tahapan pemberdayaan masyarakat perlu dijelaskan secara rinci dengan tahapan yang dilakukan Koperasi BAIK sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2. Matriks Keterkaitan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat (Teoritik dan Empirik)

Tahapan Pemberdayaan	
Teoritik (Adi, 2003)	Empirik (Koperasi BAIK)
1 Persiapan	Tahap ini dilakukan sebagai upaya mengawal proses pelaksanaan program pembiayaan mikro. Koperasi BAIK telah melakukan rekrutmen <i>community worker</i> (tenaga pendamping) melalui berbagai tahapan dalam menguatkan peranannya pada aktivitas pemberdayaan masyarakat (Bab IV : 94 – 103). Proses perekrutan tidak masuk dalam rangkaian tahapan sesuai dengan kebijakan Koperasi BAIK, namun tetap dilakukan sejalan dengan proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut. (Bab IV : 94-103)
2 Tahap Pengkajian	Tahap ini dilakukan pada pelaksanaan Pemilihan Wilayah Sasaran dan Persiapan Sosial, dimana fokus kegiatan pengkajian wilayah, sosialisasi, uji kelayakan bagi setiap calon anggota yang akan bergabung dalam Koperasi BAIK (Bab IV : 104-113)
3 Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan dan Tahap Pemformulasian Rencana Aksi	Tahap ini dilakukan pada saat Penerimaan Anggota. Masyarakat yang sudah resmi menjadi anggota Koperasi BAIK akan memperoleh LWK yang bertujuan untuk memberikan dan menambah pemahaman mereka tentang Koperasi BAIK dan mekanisme program pembiayaan mikro. Di samping itu, anggota diberikan kewenangan untuk membentuk kelompok dan merumuskan sendiri terkait peningkatan kualitas kelompok untuk mencapai solidaritas sosial ekonomi kelompok sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan (Bab IV : 114-119)
4 Tahap <i>capacity building</i> dan <i>networking</i>	
5 Tahap pelaksanaan dan pendampingan	Tahapan ini dilakukan pada kegiatan Pelayanan Simpan Pinjam dan Pertemuan Rutin kelompok yang dilakukan melalui pendampingan dari para TPL. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan program sebagai hasil dari proses yang dilaksanakan sebelumnya, serta menjadi aksi dari program pembiayaan mikro Koperasi BAIK. (Bab IV : 120-124)
6 Tahap evaluasi	Tahapan ini dilakukan pada kegiatan <i>Monitoring</i> Kinerja Kelompok serta Evaluasi dan Perencanaan Koperasi BAIK. Kinerja kelompok selalu rutin dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan program. (Bab IV : 125-128)
7 Tahap Terminasi	Tahapan ini sedang diupayakan melalui pelatihan bagi anggota yang sudah lama mengikuti program, yang diharapkan mampu meneruskan estafet pelaksanaan progra di masa depan.

Sumber : Telah diolah kembali

Tahapan pelaksanaan pemberdayaan tersebut sebagaimana temuan lapangan pada Tabel 5.1 belum sepenuhnya dipahami sebagai proses dalam konteks teoritik pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tahap pemilihan wilayah sasaran sampai pada tahap evaluasi dan perencanaan kurang sejalan dengan tahapan pemberdayaan seperti yang diuraikan pada Tabel 5.2. Koperasi BAIK melakukan rekrutmen tenaga pendamping di luar tahapan program, namun masih masuk dalam kerangka proses program, yang seharusnya kegiatan tersebut masuk pada tahap persiapan. Begitu juga dengan tahapan-tahapan lainnya, yang menunjukkan kegiatan tersebut umumnya tidak memperhatikan tahapan secara teoritik. Kondisi ini pada dasarnya secara teknis tidak mempengaruhi aktivitas program pembiayaan mikro, namun dalam konteksnya berpengaruh terhadap pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Kondisi tersebut berdampak pada proses pelaksanaan program di tingkat kelompok, dimana tahapan-tahapan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh tenaga pendamping. Pengurus Koperasi dalam hal ini memiliki kontrol penuh terhadap pelaksanaan pada setiap tahapan tersebut, tugas pendamping selalu melaporkan perkembangan yang terjadi di lapangan kepada pengurus pada setiap tahapan tersebut yang pada akhirnya pengurus memiliki otoritas menetapkan keputusan pada setiap proses tersebut, sedangkan pendamping hanya menjalani keputusan. Keterlibatan anggota dan kelompok hanya dilakukan pada tahapan kegiatan pelayanan dan pertemuan rutin, selain itu jika diperlukan mereka akan dilibatkan pada tahapan lainnya, yaitu pada tahap evaluasi dan perencanaan.

Kontrol penuh oleh pengurus mencerminkan kurang teralisasinya makna pemberdayaan sebagai proses. Sebab setiap keputusan yang diambil oleh pengurus mempertimbangkan kondisi perkembangan kinerja koperasi dan efektivitas penyaluran pembiayaan. Dengan pengalaman pengurus yang dahulu pernah menjadi pendamping, mereka mampu menganalisa laporan-laporan dari tenaga pendamping, baik dalam bentuk data maupun informasi. Jika hasil analisa pengurus mengarah pada ketidak-efektifan bagi perkembangan koperasi, maka pengurus akan memberikan keputusan yang tepat dan sepenuhnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh tenaga pendamping.

Kondisi ini memperlihatkan adanya pola hubungan yang belum setara antara pengurus dengan tenaga pendamping. Otoritas yang dimiliki pengurus lebih tinggi dibandingkan tenaga pendamping, sebab pengurus memiliki peran mengawal perkembangan koperasi sedangkan tenaga pendamping berperan mengawal proses pendampingan di tingkat kelompok. Segala aktivitas di tingkat kelompok yang kurang sejalan dengan tujuan koperasi, maka otoritas pengurus mengarahkan proses pendampingan tersebut sesuai dengan tujuan koperasi. Sehingga realisasi pelaksanaan tahapan pemberdayaan tersebut teralienasi oleh pencapaian tujuan koperasi. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.2 menggambarkan peranan tenaga pendamping dalam pelaksanaan tahapan program lebih fokus pada urusan teknis. Padahal dalam proses pendampingan, kemampuan yang dimiliki tenaga pendamping bukan hanya sekedar teknis pelayanan simpan pinjam saja, melainkan mengkombinasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam memfasilitasi aktivitas kelompok. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Suharto (Bab II : 50) terkait peran tenaga pendamping dalam proses pendampingan berpusat pada empat bidang tugas, yaitu : fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*Protecting*), mendukung (*supporting*). Peran-peran tersebut umumnya dilakukan oleh tenaga pendamping dalam mengawal keberlanjutan program yang dilakukan pada tahap penerimaan anggota, pelayanan simpan-pinjam, dan pertemuan rutin. Pada tahap penerimaan, fasilitasi dilakukan untuk mengawal proses pelatihan wajib bagi anggota (LWK), dimana dalam proses ini calon anggota memperoleh materi-materi yang terkait dengan perkoperasian, serta mekanisme yang perlu dipatuhi yang diterapkan oleh koperasi BAIK. Pada tahap tersebut tenaga pendamping juga melakukan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi kelompok dalam membangun membangun solidaritas sosial antar anggota, saling menjaga kebersamaan sesuai dengan konsensus bersama. Terakhir tenaga pendamping memang dituntut melakukan tugas memberikan dukungan (*supporting*) yang dalam hal ini pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar.

Peranan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendamping. Peranan tersebut berkaitan dengan kemampuan dalam mengawal aktivitas pelaksanaan program. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh proses rekrutmen tenaga pendamping yang belum optimal. Dalam proses rekrutmen tenaga pendamping, belum ada proses peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Mereka yang baru bergabung langsung diarahkan untuk mengikuti pelatihan (training) selama 3 bulan, melalui praktek di lapangan didampingi oleh supervisor atau TPL yang sudah lama bergabung (lihat Gambar 4.1). Sehingga pemahaman tenaga pendamping dalam memaknai pendampingan sebagai upaya memberdayakan masyarakat belum bisa dikatakan tuntas.

Perencanaan dan peningkatan kualitas SDM tenaga pendamping yang lemah, mempengaruhi kinerja pendampingan di tingkat kelompok. Peranan tenaga pendamping di kelompok sebatas pada pelayanan transaksional simpan pinjam, pengabsenan, sebagai “guru” atau “penasehat” dalam memfasilitasi permasalahan di kelompok, serta mampu mengatasi masalah kelompok hanya sekedar selesai dipermukaannya saja. Hal ini disebabkan oleh belum terinternalisasinya makna pendampingan yang mengedepankan kesetaraan (egalitarian) dalam setiap aktivitas fasilitasi kelompok. Lebih jauh lagi oleh Sumodiningrat (Bab II : 51) dikemukakan peranan tenaga pendamping mampu melakukan upaya Peningkatan Kesadaran dimana tenaga pendamping berupaya membantu kelompok mengartikulasikan kebutuhannya, mengidentifikasi masalah, serta mengembangkan potensi dan kapasitasnya dalam menangani masalah secara efektif dalam kegiatan-kegiatan pertemuan rutin kelompok. Artinya peranan tenaga pendamping sebagai pemercepat proses, bukan sebagai orang yang memberikan masukan atau arahan bagi masalah yang dihadapi kelompok.

Kondisi ini dapat dikatakan wajar, sebab koperasi belum mengarahkan kebijakannya pada peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan tenaga pendamping sebagai instrumen penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam ikrar yang mereka miliki dan dibacakan setiap hari oleh pendamping belum juga terinternalisasi menyentuh pada konsepsi pendampingan sebagaimana mestinya (Bab IV, Hal : 101). Dalam ikrar tersebut terdapat kata

“mendampingi” masih dimaknai sebagai proses “mememani dan membantu” dalam aktivitas kelompok. Kegiatan pendampingan dilakukan melalui pertemuan pekanan, bulanan, maupun tahunan yang dilakukan bersama dengan kelompok yang sifatnya hanya sebatas memberikan pelayanan atau santunan (*Charity*), sebagai bentuk penguatan solidaritas sosial antara pihak Koperasi BAIK dengan anggota yang bertujuan untuk menguatkan loyalitas anggota dan kelompok terhadap koperasi BAIK. Walaupun tujuannya membantu memfasilitasi kegiatan kelompok, namun dalam teknisnya belum diterapkan makna fasilitasi dalam lingkup pemberdayaan masyarakat. Sehingga proses fasilitasi yang hanya tampak dipermukaannya saja, dalam belum dimaknai sebagai fasilitasi yang bertujuan memberdayakan potensi dan sumberdaya kelompok menuju kemandirian.

Kondisi ini berdampak pada ketidak-efektifan proses fasilitasi. Setiap fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping bukan menyelesaikan masalah sampai ke tingkat akarnya, namun hanya bisa diselesaikan sampai permukaannya saja. Beberapa fasilitasi yang dilakukan oleh YSN, seorang TPL yang memfasilitasi permasalahan keaktifan anggota menggambarkan bahwa upaya fasilitasi yang dilakukan belum seutuhnya sesuai konteks pendampingan. Hal ini tercermin dari pendekatannya kepada anggota yang kurang aktif, dimana YSN hanya mengandalkan faktor kekerabatan dan solidaritas untuk mengajaknya aktif kembali dalam kegiatan kelompok (Bab IV, Hal : 102). Walaupun upaya yang dilakukan oleh YSN berhasil, namun belum tentu anggota tersebut bisa aktif kembali sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (Bab II : 51) bahwa peran tenaga pendamping dilapangan yaitu memotivasi anggota agar mereka dapat terlibat dalam kegiatan program pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan, potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Peran YSN sepatutnya melakukan inisiasi untuk menguatkan kesadaran anggota tersebut yang difasilitasi oleh Koperasi BAIK yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota dan kelompok melalui kegiatan pelatihan informal ditingkat kelompok, misalnya : pelatihan-pelatihan yang menyentuh aktivitas rumah tangga dikaitkan dengan peningkatan kapasitas kelompok terhadap pencapaian tujuan

program pembiayaan mikro. Peranan seperti akan membantu anggota dan kelompok untuk mengembangkan sebuah “sistem” internal kelompok yang dibangun dan dilakukan atas dasar kebersamaan, kemudian tenaga pendamping bertugas mengawal dan memberikan wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut. Proses fasilitasi dilakukan berasal dari kesepakatan dalam membangun kepentingan bersama, bukan berasal dari niatan TPL untuk mengajak kembali aktif di kelompok. Jika dikaitkan dengan konteks pendampingan, YSN memfasilitasi anggota tersebut dengan cara merangkai potensi dan sumberdayanya dalam mengembangkan koperasi dengan semangat toleransi, kebersamaan, solidaritas dari “dari kita, oleh kita, dan untuk kita.” Dengan demikian, dalam memfasilitasi anggota dan kelompok diharapkan mengedepankan inisiatif bersama, dan bukan inisiatif salah satu pihak.

Di samping itu, niatan tenaga pendamping untuk membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan juga diperlukan dalam proses pendampingan. Seperti inisiatif yang dilakukan oleh RNO, ICM, dan NNU dalam membantu anggota yang terkena musibah longsor (Bab IV : 126-127), mereka bertiga melakukan upaya pendampingan dengan melibatkan diri membantu kesulitan yang dihadapi anggota tersebut. Upaya tersebut dilakukan dari mendalami informasi yang diterima, kemudian mendiskusikan bersama. Berbagai alternatif pemecahan masalah diutarakan sebagai bahan pengambilan keputusan dengan mengedepankan kepentingan kelompok. Peran-peran seperti ini sebagai upaya memberikan perlindungan (*Protecting*) dari tenaga pendamping kepada anggota yang mengalami Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan kelompok yang didampingannya. Dalam kaitan dengan fungsi ini seorang pendamping bertugas mencari sumber-sumber melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja, sebagai konsultasi.

Fasilitasi yang kurang efektif mempengaruhi proses penguatan internal di tingkat kelompok. Berdasarkan Tabel 5.1 di atas juga menguraikan bahwa keterlibatan anggota difokuskan pada proses pelayanan, mulai dari tahap

persiapan sosial hingga pertemuan rutin. Keterlibatan Anggota tinggal mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping berdasarkan SOP yang ditetapkan koperasi BAIK, seperti membentuk kelompok, melaksanakan mekanisme kelompok, menghadiri pertemuan rutin, membayar angsuran, menabung, dan memotivasi keaktifan antar anggota. Pertemuan kelompok tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan interaksi sosial antar anggota di tingkat kelompok. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tujuan dari pertemuan kelompok ini yaitu : munculnya kemampuan berkomunikasi bagi anggota dalam mengupayakan penguatan interaksi antar anggota koperasi. Kemudian adanya peningkatan kapasitas bagi pada anggota yang mempunyai atau mengelola usaha sendiri, seperti membuka warung atau berdagang. Semakin kelompok itu aktif dalam proses tersebut, maka kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok yang baik sesuai dengan SOP koperasi BAIK.

Jika kondisinya demikian, maka partisipasi anggota koperasi lebih diorientasikan untuk memenuhi proses administrasi berdasarkan SOP koperasi BAIK. Padahal partisipasi bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan administrasi, melainkan partisipasi dilakukan atas dasar sukarela terhadap perubahan yang ditentukannya sendiri. Walaupun koperasi merupakan lembaga yang sudah tersistem dengan struktur, tugas, dan fungsinya sudah jelas, namun dalam implementasi kebijakannya perlu mengedepankan partisipasi aktif anggotanya, terutama dalam proses pelaksanaan program. Sebab keikutsertaan anggota sebagai peserta program diharapkan mampu memajukan koperasi melalui suatu aksi bersama, terutama merajut usaha produktif untuk melakukan perubahan taraf hidup dan penghidupan anggotanya.

Jika anggota bergabung hanya sekedar memenuhi tuntutan administrasi, maka hal ini merupakan cikal bakal lemahnya partisipasi anggota dalam berkoperasi. Belum terinternalisasinya nilai-nilai prinsip berkoperasi dalam diri anggota dan kelompoknya, hanya akan menjadikan koperasi sebagai korporasi yang mengedepankan kemudahan akses permodalan tanpa memperhatikan asas kebersamaan dan kekeluargaan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Internalisasi prinsip berkoperasi menjadi penting dikarenakan maju atau

mundurnya koperasi tergantung dari partisipasi aktif anggotanya yang berasal dari daya sukarela anggota, dan bukan karena dorongan dari tenaga pendamping untuk “memaksa” partisipasi anggota.

Lemahnya partisipasi anggota dibuktikan dengan tidak efektifnya penguatan kelompok yang dipengaruhi oleh keluar-masuknya anggota. Kondisi ini jika dikaitkan dengan makna spesifik koperasi menurut Hudiyanto (2002:12) yang menyatakan bahwa koperasi sebagai perkumpulan yang memberi kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan bertujuan untuk dapat meningkatkan kebutuhan materi anggotanya dengan menjalankan usaha secara bersama. Artinya disini bahwa lemahnya partisipasi anggota dalam program pembiayaan mikro yang dilaksanakan koperasi BAIK masih berorientasi pada pemenuhan akses permodalan dan belum menjangkau suatu desain usaha bersama di tingkat kelompok. Kondisi ini dibuktikan dengan minimnya penyaluran pembiayaan yang difokuskan bagi pengembangan usaha. Mengacu pada Tabel 4.9 (Bab IV, Hal : 135) memperlihatkan bahwa 27,5 persen penyaluran pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang bekerja sebagai wirausaha, sedangkan yang paling besar disalurkan kepada anggota yang bekerja sebagai buruh (46%), sisanya disalurkan kepada IRT dan lainnya (2% dan 24%). Data tersebut menggambarkan peran koperasi pada dasarnya belum fokus pada pemenuhan permodalan bagi anggota yang memiliki kepentingan usaha bersama sebagai modal produktif anggota, namun masih terlihat pada pemenuhan akses permodalan, yang hanya sabatas untuk kepentingan konsumtif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa lemahnya partisipasi anggota bukan karena faktor dari anggotanya sendiri, melainkan desain program yang kurang tepat pada penyaluran pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.

Arah kebijakan program pembiayaan mikro yang difokuskan untuk kegiatan usaha yang tidak produktif bagi keluarga miskin, hanya akan menambah beban hutang anggota serta membuat dirinya kesulitan membayar. Seperti mitos yang dikemukakan oleh Daley-Haris (2005:11) bahwa sebuah lembaga yang entah bagaimana mengelola keuangan untuk menjangkau masyarakat yang sangat miskin hanya akan menambah beban hutang terhadap keluarga-keluarga yang

melakukan pinjaman. Walaupun secara *finansial* kinerja koperasi mengalami pertumbuhan berdasarkan resiko tingkat kelancaran angsuran (lihat Tabel. 4.8), namun hal tersebut masih dipengaruhi oleh penerapan sistem manajemen koperasi yang hampir mirip dengan sistem yang diterapkan oleh korporasi perbankan, pola hubungan yang dibangun antara koperasi dengan anggota identik dengan hubungan antara kreditur dan debitur, dimana pertemuan rutin hanya sekedar dijadikan sebagai wadah transaksi simpan pinjam serta belum menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat miskin sesuai dengan prinsip berkoperasi.

Mitos tersebut jika dikaitkan dengan pelaksanaan program Koperasi BAIK bisa saja kemungkinan itu terbukti. Jika memperhatikan profil anggota Koperasi BAIK pada bab sebelumnya, mayoritas anggota masuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah dan bekerja sebagai IRT. Sedangkan suami mereka mayoritas bekerja sebagai buruh yang mengandalkan penghasilan dari pekerjaan yang tidak tetap. Istri lebih banyak mengharapkan penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun kebutuhan tersebut bisa dikatakan “lebih besar pasak daripada tiang.” Salah satu cara untuk menutupi kekurangan tersebut dilakukan dengan mengajukan menjadi anggota koperasi agar memperoleh pinjaman, dengan syarat bersedia menyisihkan membayar tabungan kelompok yang besarnya ditetapkan oleh kelompok karena untuk kepentingan kelompoknya. Namun pinjaman tersebut tidak digunakan untuk kepentingan usaha produktif. Sebagian besar anggota menggunakan pinjaman dari koperasi diserahkan kepada suami untuk menambah modal usahanya. Anggota sama sekali tidak terlibat dalam usaha rumah tangga tersebut. Anggota sepenuhnya berperan sebagai ibu rumah tangga, sehingga pada anggota yang menyerahkan pinjamannya kepada suami cenderung berperan tidak lebih sebagai *debt collector* yang tidak dibayar yang menjadi penghubung antara suaminya dengan koperasi karena proses penagihan dilakukan melalui anggota peminjam langsung. Sehingga pembiayaan yang diperoleh anggota koperasi menjadi beban hutang karena tidak digunakan untuk usaha produktif yang secara ekonomi mampu meningkatkan nilai tambah penghasilan keluarga, implikasinya terjadi pada ketidak-mampuan anggota untuk membayar pinjaman.

Kondisi ini umumnya terjadi di level kelompok. Tingkat keaktifan anggota menurun dalam proses pelaksanaan program karena persoalan tidak bisa membayar angsuran, sehingga membuat dirinya kurang aktif dalam pertemuan kelompok, bahkan tidak sedikit ada anggota yang memutuskan keluar dari kelompok. Dari data yang telah dihimpun per Desember tahun 2010 jumlah anggota yang keluar sebanyak 65 orang atau sekitar 1,31 persen dari jumlah total anggota. Ketidakmampuan membayar merupakan alasan utama anggota tidak aktif, dari data yang telah diolah bahwa 40 persen anggota memutuskan keluar karena alasan ekonomi, 38 persen karena alasan keluarga, sisanya 12 persen karena karakter anggota yang cenderung tidak memiliki rasa solidaritas, kebersamaan, dan kekeluargaan dalam berkoperasi.

Kondisi ketidaktifan dan keluarnya anggota menjadi beban bagi anggota kelompoknya. Dengan penerapan pola “tanggung renteng” dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro, anggota yang masih aktif bertanggung jawab pada kesepakatan kelompoknya sendiri, yaitu memenuhi kewajiban pinjaman yang belum dibayarkan oleh anggota yang tidak aktif maupun yang sudah keluar. Keterbukaan penting untuk mengukur *power saving* peminjam jangan sampai pinjaman itu membebani peminjam dan menghabiskan seluruh sumber daya peminjam pada saat membayar angsuran. Di samping itu anggota majlis yang lain juga berkepentingan agar peminjam dapat membayar angsuran dengan lancar karena adanya sistem *tanggung renteng*. Dengan sistem ini, anggota majlis yang macet membayar angsuran akan menjadi beban anggota yang lain. Sebab pinjaman tersebut akan digulirkan kembali kepada anggota yang belum memperoleh giliran pinjaman. Untuk itu, disinilah pentingnya tabungan kelompok yang digunakan untuk menalangi angsuran anggota yang belum bisa membayar maupun yang sudah keluar.

Keberadaan tabungan kelompok belum sepenuhnya bisa memenuhi kewajiban penalangan angsuran. Jika tabungan tersebut habis, tidak jarang ada kelompok memutuskan ada anggota yang mengeluarkan dana pribadinya untuk menalangi angsuran. Seperti yang dialami oleh Mmh, salah satu ketua kelompok yang kelompoknya mengalami masalah (Bab IV,hal : 136). Tanggung jawab Mmh

sebagai ketua kelompok memang dikatakan cukup berat, selain ia berperan menjaga solidaritas kelompok, ia juga rela berkorban demi menjaga nama baik kelompok agar anggota lainnya memperoleh kesempatan yang sama memperoleh pembiayaan. Mmh dipilih dari proses pemilihan ketua majlis dilakukan secara demokratis. Pada saat dilakukan Latihan Wajib Kelompok (LWK) kepada peserta diberikan waktu bermusyawarah untuk memilih ketua kelompok. Peserta kemudian secara mufakat memilih dan mengangkat Mmh menjadi ketua majlis. Menjadi ketua majlis tidak berarti mendapatkan fasilitas khusus dari koperasi. Justru ketua majlis adalah orang yang terakhir mendapatkan kesempatan mengajukan pinjaman selain tentu bertanggung jawab atas majlis yang dipimpinya. Dalam kasus menghadapi anggota yang kurang kooperatif, ia mengeluh karena toleransi dari koperasi sangat sempit bagi kelompok.

Hampir semua ketua kelompok mengalami kondisi yang sama seperti Mmh, kebijakan program dirasakan berat bagi anggota terutama dalam penalangan angsuran. Posisi ini membuat kelompok semakin dilematis, penerapan pola “tanggung-renteng” menuntut persoalan kelompok mampu diselesaikan pada tingkat kelompok, sedangkan lemahnya pendampingan semakin menuntut mereka terbebani oleh permasalahan. Sehingga dapat dikatakan pemberdayaan masyarakat melalui program pembiayaan mikro kurang efektif.

5.2. Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro

Program pembangunan dirancang sebagai instrumen pemercepat peningkatan kualitas dan kuantitas taraf hidup dan penghidupan masyarakat. Dalam melaksanakan program pembangunan, tidak sedikit sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, bahkan dalam prosesnya melibatkan berbagai lintas sektor pembangunan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Namun hasilnya, program tersebut seakan-akan telah berlalu tanpa hasil, dukungan sumberdaya yang begitu besar kandas seketika oleh pengelolaan yang tidak efektif dan efisien, *ego*-sektoral memunculkan dominasi peran dalam pengelolaan program membuat program tidak tepat sasaran. Pada akhirnya, program pembangunan bukan lagi identik dengan instrumen penyelesaian masalah, namun menciptakan masalah-masalah baru di masyarakat.

Dalam menganalisa proses pemberdayaan pada program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK, ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam konteks kebijakan lembaga dan implementasi di lapangan. Kebijakan dan proses pemberdayaan masyarakat pada program pembiayaan mikro di atas, ditemukan sisi positif dalam proses pelaksanaannya, dimana ternyata ada faktor pendukung dalam pengembangan program pembiayaan mikro tersebut. Faktor pendukung tersebut, yaitu :

1. Kebijakan sebagai “payung hukum” pada segala bentuk aktivitas pelaksanaan program yang secara konstitusional berpihak pada pengembangan implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah selaku pengambil dan pelaksana kebijakan mendorong pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan pembiayaan mikro. Hal ini sejalan dengan pendapat Watson dalam Adi (2003 : 306-321) bahwa proyek pengembangan masyarakat didukung baik oleh masyarakat dan para pemimpin puncak yang terkait, maka akan pelaksana dan penerima program dapat mengatasi kendala yang muncul, sehingga program tersebut dapat berkembang sejalan dengan tujuan yang diharapkan.
2. Partisipasi yang menekankan pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama yang tumbuh dari kepentingan masyarakat untuk berupaya mengubah kondisi ke arah yang lebih baik dan mandiri sesuai dengan potensi/sumberdaya yang dimilikinya. Kebijakan dan partisipasi merupakan dua aras (makro dan mikro) yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro oleh Koperasi BAIK. Hasil yang muncul adalah anggota dapat menikmati hasil yang diharapkan dari kepesertaannya mengikuti rangkaian program pemberdayaan masyarakat ini. Sejalan apa yang dikemukakan Alma (2002 : 39) bahwa partisipasi akan memunculkan kesadaran anggota dalam menabung dan menghimpun dana yang akan disalurkan kepada anggota lainnya. Hal ini juga didukung oleh Watson dalam Adi (2003 : 306-321) partisipasi partisipan dapat merasakan perubahan yang dilakukan sehingga mengurangi beban yang mereka rasakan.

Pertemuan mingguan merupakan bentuk partisipasi anggota dan kesempatan bagi anggota untuk berkumpul dan saling bertukar informasi mengenai berbagai hal. Masalah ekonomi rumah tangga, sulitnya memperoleh minyak tanah, harga-harga sembako yang nyaris tak terjangkau, sampai biaya sekolah, dan jajan anak yang cukup merepotkan, serta beragam topik lainnya sepanjang menyangkut kepentingan dan kehidupan rumah tangga biasanya menjadi topik favorit untuk dibicarakan. Tidak aneh pertemuan kelompok menjadi ajang *ngerumpi* dan *curhat* para anggota, sebab melalui forum ini mereka mulai berkomunikasi terkait dengan masalah yang mereka hadapi, kondisi ini dijadikan momen untuk mulai membahas isu-isu yang dihadapi rumah tangga, sehingga muncul kebersamaan mereka mengatasi masalah tersebut yang berasal dari mereka sendiri.

3. Peranan tenaga pendamping dalam memfasilitasi kegiatan kelompok sangat mendukung bagi pengembangan program pembiayaan mikro. Pendampingan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan, menaungi aspirasi dan membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Semua anggota pernah merasakan pengalaman berbicara di depan forum kelompok, yaitu pada saat pengajuan pinjaman. Setelah itu kemudian proses tanya jawab layaknya *fit and proper test* berlangsung. Tenaga pendamping dan anggota kelompok akan menanyakan pemanfaatan dana pinjaman tersebut dan memberikan pendapatnya. Sedangkan calon peminjam akan memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kesempatan berbicara di depan forum kelompok lebih banyak dirasakan oleh ketua ketua, karena dalam setiap pertemuan ketua bertugas membuka dan menutup pertemuan serta membacakan ikrar anggota yang diikuti oleh seluruh anggota. Kegiatan yang selalu dilakukan dalam pertemuan mingguan ini sedikit demi sedikit menjadi kebiasaan yang merubah rasa malu dan takut menjadi berani dalam menggugah partisipasi anggota di dalam kelompok. Alma (2002 : 39) menyebutnya sebagai upaya memberikan pengetahuan bagi anggota dalam kerangka pemberdayaan.

Wujud dari manfaat pertemuan kelompok yang difasilitasi tenaga pendamping yaitu memunculkan keberanian memimpin rapat dan kelompok muncul pada beberapa orang anggota koperasi yang menjadi ketua kelompok atau pernah menjadi ketua kelompok tapi karena suatu alasan digantikan oleh anggota yang lain. Watson dalam Adi (2003 : 306-321) menjelaskan jika program pengembangan dapat menampilkan hal yang baru dan menarik minat warga masyarakat maka mereka akan merasakan dampak baik bagi keberlanjutan program tersebut. Sebab sebagian besar dari mereka sebelumnya tidak pernah punya pengalaman memimpin atau menjadi ketua suatu kelompok atau perkumpulan. Bahkan bagi sebagian besar anggota kelompok, sebelumnya mereka tidak pernah punya pengalaman berorganisasi secara formal seperti masuk menjadi Anggota Koperasi BAIK.

Faktor pendukung di atas belum dapat berjalan sinergis dan berkesinambungan sesuai dengan proses dan tujuan yang diharapkan, baik secara empirik maupun teoritik. Proses pelaksanaan program pembiayaan mikro ternyata belum mampu mengangkat keberdayaan masyarakat, dan cenderung kurang sinergis dengan arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi. Pengelolaan program yang kurang efektif dengan mengedepankan tujuan daripada proses dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadikan program bukan sebagai instrumen memberdayakan masyarakat, koperasi bukan lagi dijadikan sebagai instrumen menyatukan kepentingan usaha anggota, namun sekedar dijadikan wadah akumulasi modal. Sehingga faktor-faktor yang menjadi penghambat proses pemberdayaan masyarakat dalam program ini dipengaruhi oleh :

1. Faktor Eksternal.

Sejalan dengan penjelasan Esmen dan Uphoff (1984:182-202) berkaitan dengan kondisi di atas, bahwa faktor utama yang menjadi hambatan dan rentan terhadap kasus ini salah satunya adalah *ineffectiveness* yang dipengaruhi oleh rendahnya SDM dan minimnya pengalaman dalam berhubungan dengan pihak luar yang bersifat formal, sehingga dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri bagi peningkatan taraf hidup dan kehidupannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh aparaturnya dinas KUKM Perindag dan pengurus Koperasi BAIK (Bab IV : 138). Kedua pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas SDM dan pengalaman bekerjasama dengan pihak luar menjadi faktor penghambat dalam pengembangan koperasi yang dampaknya mengganggu kinerja koperasi. Aparatur dinas dan pengurus Koperasi BAIK dalam kasus ini belum bisa berbuat banyak untuk menghadapi masalah ini, sebab selain mereka memiliki komitmen untuk mengembangkan anggota koperasi, di sisi lain mereka terkendala oleh kurangnya otoritas yang dimiliki dalam membuat suatu keputusan yang mengikat semua anggota dalam berkoperasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Watson dalam Adi (2003 : 306-321) menjelaskan dalam Koperasi proses pemberdayaan pada program ini terdapat gejala enolakan terhadap “orang luar” (Rejection of “outsiders”) dibuktikan dengan salah satunya adalah anggota merasa terganggu (hostility) terhadap orang asing yang bergabung masuk dalam kegiatan Koperasi BAIK.

2. Faktor Internal

Munculnya kendala pada faktor penghambat di atas berdampak pada proses pemberdayaan di level kelompok dan anggota. Tidak salah lagi, bahwa kuatnya anggota yang memutuskan untuk keluar dari program disebabkan oleh faktor ekonomi yang melilit kehidupan mereka. Rendahnya penghasilan keluarga dibarengi dengan SDM, sulit bagi mereka untuk mengelola pembiayaan tersebut ke arah usaha-usaha produktif. Pada akhirnya, desain program yang ditujukan untuk memberdayakan mereka menjadi terhambat karena tidak sinergisnya kebijakan program dengan kepentingan di level kelompok. Fenomena ini terjadi seperti yang dikemukakan oleh Alma (2002 : 39) bahwa kondisi tersebut terjadi karena adanya kebijakan yang cenderung merugikan anggota serta munculnya informasi atau pemahaman yang *asimetris* antara anggota, kelompok dan pengurus yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya suasana kurang terbuka yang mengakibatkan rendahnya tingkat keaktifan anggota. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh *Superego* anggota yang terlalu kuat

cenderung membuat dirinya tidak mau menerima pembaruan, dan kadangkala menganggap pembaruan sebagai suatu yang tabu (Watson dalam Adi, 2003 : 306-321). Hal ini cukup dikatan wajar jika koperasi dimaknai sebagai perkumpulan yang memberi kebebasan keluar masuk sebagai anggota, namun hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan koperasi yang menekankan bahwa anggota berkumpul dalam koperasi untuk meningkatkan kebutuhan materi anggotanya dengan menjalankan usaha secara bersama. Artinya disini bahwa lemahnya tingkat keaktifan anggota dalam program pembiayaan mikro yang dilaksanakan koperasi BAIK bukan semata-mata dipengaruhi minimnya oleh pemahaman anggota untuk berkoperasi, namun dipengaruhi pula oleh kebijakan pembiayaan yang kurang tepat.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro tersebut kedua faktor itu juga mempengaruhi proses pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping. Kurangnya kegiatan-kegiatan yang berorientasi bagi pengembangan kapasitas pendamping serta minimnya pengalaman mereka mendampingi anggota koperasi sesuai konteks pendampingan, menjadikan mereka hanya sekedar memfasilitasi kegiatan-kegiatan teknis program agar mencapai tujuan yang diharapkan (Bab IV : 136-137). Sehingga dalam prosesnya program pembiayaan mikro tersebut berada pada titik jenuh, yang berada pada bayang-bayang antara harapan optimisme dan pesimisme.

Watson dalam Adi (2003 : 306-321) menjelaskan bahwa kondisi di atas terjadi karena faktor Kestabilan (Homeostatis) dan Kebiasaan (Habit) yang dihadapi oleh tenaga pendamping. Suatu proses pendampingan di tingkat kelompok yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum sepenuhnya dapat membuat perubahan yang permanen pada diri anggota dan kelompok dampingan jika tidak diikuti dengan penguatan yang relatif terus menerus dari sistem yang melingkupinya. Kemudian dampaknya pada diri tenaga pendamping bahwa dirinya melakukan pendampingan sesuai dengan kebiasaannya dan rutinitas yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada.

Atas dasar faktor pendukung dan penghambat di atas, analisa terhadap pemberdayaan masyarakat pada program pembiayaan mikro yang dilaksanakan oleh koperasi BAIK sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan yang dikaitkan dengan teori yang berkenaan pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberadaan program pembiayaan mikro mampu mendorong kelompok berpartisipasi dalam membangun kapasitas sosial ekonomi yang lebih baik dan mandiri, sebagai bentuknya adalah memberikan akses permodalan bagi usaha anggota di tingkat kelompok. Namun di sisi lain, pengembangan kapasitas sosial ekonomi tersebut belum banyak bersentuhan dengan aras makro (kebijakan) pemerintah, dimana pada aras tersebut menjadi faktor penting dalam proses pengembangan kapasitas sosial ekonomi kelompok sasaran. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengembangan koperasi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, melibatkan lintas sektor dan juga menggunakan sumberdaya yang besar untuk mencapai tujuan pembangunan. Kondisi ini belum diarahkan oleh Koperasi BAIK dalam upaya mencapai sinergitas kebijakan program pembiayaan mikro searah dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bogor.
2. Peran tenaga pendamping dalam pelaksanaan tahapan program belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi BAIK. Peran pendamping lebih fokus pada urusan teknis. Padahal secara teoritik, peran pendamping dalam proses pendampingan, kemampuan yang dimiliki tenaga pendamping bukan hanya sekedar teknis pelayanan simpan pinjam saja, melainkan mengkombinasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam memfasilitasi aktivitas kelompok.

Kemampuan ini belum terlihat dalam aktivitas pelaksanaan program, sebab dalam proses rekrutmen tenaga pendamping belum ada proses peningkatan sumberdaya manusia (SDM) bagi pendamping. Perencanaan dan peningkatan kualitas SDM tenaga pendamping yang lemah, mempengaruhi kinerja pendampingan di tingkat kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (2009:104-106) peranan tenaga pendamping mampu

melakukan upaya Peningkatan Kesadaran dimana tenaga pendamping berupaya membantu kelompok mengartikulasikan kebutuhannya, mengidentifikasi masalah, serta mengembangkan potensi dan kapasitasnya dalam menangani masalah secara efektif dalam kegiatan-kegiatan pertemuan rutin kelompok. Peranan tenaga pendamping di kelompok sebatas pada pelayanan transaksional simpan pinjam, pengabsenan, peneliti menyebutnya sebagai “guru” atau “penasehat” dalam memfasilitasi permasalahan di kelompok, serta mampu mengatasi masalah kelompok hanya sekedar selesai dipermukaannya saja.

3. Pendampingan yang lemah dalam konteks pemberdayaan masyarakat akan memunculkan proses fasilitasi yang kurang efektif mempengaruhi proses penguatan internal dan partisipasi anggota di tingkat kelompok. Keterlibatan aktif anggota atau kelompok merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, di antaranya adalah masyarakat akan merasa lebih dihargai apabila keterlibatan (partisipasi) mereka berpengaruh terhadap suatu kebijakan tertentu dan berpengaruh langsung terhadap apa yang mereka rasakan (Bab II : 44). Partisipasi dilakukan atas dasar sukarela terhadap perubahan yang ditentukannya sendiri. Walaupun koperasi merupakan lembaga yang sudah tersistem dengan struktur, tugas, dan fungsinya sudah jelas, namun dalam implementasi kebijakannya perlu mengedepankan partisipasi aktif anggotanya, terutama dalam proses pelaksanaan program. Sebab keikut-sertaan anggota sebagai peserta program diharapkan mampu memajukan koperasi melalui suatu aksi bersama untuk melakukan perubahan taraf hidup dan penghidupan anggotanya.

Lemahnya partisipasi anggota dibuktikan dengan tidak efektifnya penguatan kelompok yang dipengaruhi oleh keluar-masuknya anggota. Kondisi ini jika dikaitkan dengan makna spesifik koperasi menurut Hudiyanto (2002:12) yang menyatakan bahwa koperasi sebagai perkumpulan yang memberi kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan bertujuan untuk dapat meningkatkan kebutuhan materi anggotanya dengan

menjalankan usaha secara bersama. Artinya disini bahwa lemahnya partisipasi anggota dalam program pembiayaan mikro yang dilaksanakan koperasi BAIK masih berorientasi pada pemenuhan akses permodalan dan belum menjangkau suatu desain usaha bersama di tingkat kelompok. Kondisi ini dibuktikan dengan minimnya penyaluran pembiayaan yang difokuskan bagi pengembangan usaha.

4. Arah kebijakan program pembiayaan mikro kurang tepat sasaran yang hanya difokuskan untuk kegiatan usaha yang tidak produktif bagi keluarga miskin, hanya akan menambah beban hutang anggota serta membuat dirinya kesulitan membayar. Hal ini untuk membuktikan mitos yang dikemukakan oleh Daley-Haris (2005 : 11) bahwa sebuah lembaga yang entah bagaimana mengelola keuangan untuk menjangkau masyarakat yang sangat miskin hanya akan menambah beban hutang terhadap keluarga-keluarga yang melakukan pinjaman. Mitos tersebut dibuktikan dengan proses pelaksanaan program Koperasi BAIK. Sebagian besar pinjaman tersebut tidak digunakan untuk kepentingan usaha produktif, sehingga pembiayaan yang diperoleh anggota koperasi menjadi beban hutang karena tidak digunakan untuk usaha produktif yang secara ekonomi mampu meningkatkan nilai tambah penghasilan keluarga, implikasinya terjadi pada ketidak-mampuan anggota untuk membayar pinjaman. Kondisi ini mengakibatkan tingkat keaktifan anggota menurun dalam proses pelaksanaan program karena persoalan tidak bisa membayar angsuran, sehingga membuat dirinya kurang aktif dalam pertemuan kelompok, bahkan tidak sedikit ada anggota yang memutuskan keluar dari dari kelompok.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kebijakan perkopersian dalam upaya mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bogor tidak terlepas dari proses yang dijalankan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Proses implementasi kebijakan sangat besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan, jika proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan konteks pengembangan kapasitas keilmuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pelaksana program di tingkat operasional. Pemkab. Bogor melalui Dinas KUKM Perindag mengemban misi dalam mengawal Propeda khusus dalam pengembangan perkoperasian.

Studi pada penyelenggaraan program pembiayaan mikro melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh koperasi BAIK, merupakan bagian dari implementasi kebijakan dalam pengembangan perkoperasian. Dalam prosesnya, program tersebut menyediakan akses pembiayaan melalui pendekatan kelompok dengan pola “tanggung-renteng” serta melibatkan pendampingan sebagai instrumen pemercepat proses dalam memberdayakan anggota dari keluarga miskin. Dari hasil studi dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK sejalan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya pada aspek pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proses pemberdayaan masyarakat, tahapan pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya dipahami sebagai proses dalam konteks teoritik pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tahap pemilihan wilayah sasaran sampai pada tahap evaluasi dan perencanaan belum sejalan dengan tahapan pemberdayaan. Kondisi ini umumnya secara teknis tidak mempengaruhi aktivitas program pembiayaan mikro, namun dalam konteksnya berpengaruh terhadap pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan dalam memfasilitasi kegiatan dan partisipasi kelompok. Dalam konteksnya,

koperasi BAIK masih mengedepankan tujuan (output) daripada proses dalam mencapai kinerja koperasi yang mempengaruhi makna pemberdayaan sebagai proses. Di samping itu, kebijakan penyaluran pembiayaan belum banyak digulirkan untuk usaha produktif yang menyebabkan menurunnya “partisipasi” anggota dalam berkoperasi, kondisi ini mengakibatkan penguatan kelompok tidak berjalan efektif. Penyaluran pembiayaan dengan pola “tanggung-renteng” untuk kebutuhan konsumtif hanya akan menambah beban hutang anggota karena tidak ada “nilai tambah” secara ekonomi yang menyebabkan terganggunya tingkat keaktifan anggota, akibatnya menjadi “beban” bagi anggota kelompok lainnya.

Peran tenaga pendamping dalam pelaksanaan tahapan program belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi BAIK. Peran pendamping lebih fokus pada urusan teknis. Padahal secara teoritik, peran pendamping dalam proses pendampingan, kemampuan yang dimiliki tenaga pendamping bukan hanya sekedar teknis pelayanan simpan pinjam saja, melainkan mengkombinasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam memfasilitasi aktivitas kelompok. Kondisi ini juga berdampak pada proses pemberdayaan di tingkat kelompok maupun anggota, yang menimbulkan lambatnya kemajuan dalam membentuk kemandirian berbasis penguatan kapasitas sosial ekonomi kelompok.

2. Pengelolaan program yang berorientasi pada tujuan di mulai pada saat pencapaian kinerja menjadi prioritas koperasi akibat terbukanya investasi lembaga perbankan dalam program. Minimnya pengalaman anggota koperasi berbisnis dengan pihak luar disertai dengan kualitas SDM anggota yang masih rendah menjadi faktor penghambat bagi keberlanjutan koperasi. Kondisi ini semakin dilematis ketika pendekatan pemberdayaan dijadikan instrumen pengembangan koperasi, namun penyaluran pembiayaan bagi usaha produktif belum maksimal sehingga terjadi *ineffectiveness*.

Kondisi ini bukan segalanya menjadi penghambat bagi koperasi untuk berkembang, dukungan partisipasi anggota masih relatif tinggi untuk diberdayakan dengan mengarahkan pada peluang-peluang yang bisa

ditangkap melalui sinergitas dengan program pemerintah terkait pengembangan SDM. Dengan pola ini akan terjadi sinergitas antara praktek implementasi program dengan kebijakan yang ditetapkan, sehingga program yang dijalankan sejalan dengan kebijakan pembangunan. Di tambah lagi dengan peranan tenaga pendamping dalam memfasilitasi kegiatan kelompok sangat mendukung bagi pengembangan program pembiayaan mikro. Pendampingan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti yang ditujukan bagi pelaksana Koperasi Baik dan para pemangku kepentingan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pembiayaan mikro diupayakan mampu mensinergiskan dengan program pemerintah yang belum banyak disentuh oleh Koperasi BAIK, yaitu dengan cara masuk pada aras makro sebagai jalan untuk mengembangkan program pembiayaan mikro. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengembangan koperasi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, melibatkan lintas sektor dan juga menggunakan sumberdaya yang besar untuk mencapai tujuan pembangunan.
2. Pembiayaan yang diberikan diupayakan fokus pada pengembangan usaha-usaha produktif anggota. Dengan mempertimbangkan potensi yang dikembangkan, program diupayakan sejalan dengan potensi yang dikembangkan anggota tersebut sehingga akan menciptakan proses kemandirian bagi peningkatan usaha dan taraf hidup anggota.
3. Masuknya anggota ke dalam peran-peran produktif akan menambah berat beban kerja mereka. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan perlu melibatkan secara langsung berbagai pihak, terutama pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran akan

pentingnya sinergitas pelaksanaan program pemerintah dan koperasi BAIK untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

4. Penguatan peran tenaga pendamping merupakan faktor kunci keberlangsungan program secara berkesinambungan. Untuk itu, kiranya perlu melakukan upaya mempertajam peran tenaga pendamping dalam memfasilitasi aktivitas di tingkat kelompok dalam mengupayakan penguatan kapasitas sosial ekonomi sesuai dengan kebijakan Koperasi BAIK dan konteks perkembangan keilmuan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah pendekatan dalam proses pencapaian tujuan program pembangunan.



DAFTAR REFERENSI

1. Buku

- Adi, Rukminto, Isbandi. (2003). *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Seri Pemberdayaan Masyarakat 02. Jakarta: FISIP UI Press.
- _____. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Seri Pemberdayaan Masyarakat 03. Jakarta: FISIP UI Press.
- _____. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Seri Pemberdayaan Masyarakat 01. Jakarta: FISIP UI Press.
- Alma, Buchari. (2002). *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa : Mulai dari Belakang*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Esman, Milton J., dan Uphoff, Noman T. (1984). *Local . Organization: Intermediaries in Rural Development*. London: Cornell University.
- Friedmann, John. (1992). *Empowerment, The Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell, Publisher
- Hudiyanto. (2002). *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*. Jakarta : Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Dirjen PT Diknas

- Ife, Jim. (1995). *Community Development, Creating Community Alternatives: Vision, Analysis and Practice*. Sydney : Longman Australia Pty Ltd.
- Kartasasmita, G. (1993). *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*. Malang : Lembaga Penerbitan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Korten, David C (2001). *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela Dan Agenda Global*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kosasih, H.R.E. (1998). *Metodologi Kualitatif (Pokok-pokok Ulasan dari Sisi Konsep, Karakteristik, Segi Keilmiahan, dan Metode)*. Bandung: PPS Magister Ilmu Pemerintahan Setiagama.
- Kusnadi dan Hendar. (1999). *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Maskun, H. Sumitro. (1995). *Pembangunan Masyarakat Desa, Asas, Kebijakan, dan Manajemen*. Yogyakarta : Media Widia Mandala.
- Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (2000). "Introduction: Social Policy and Social Welfare" dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (Editor), *The Handbook of Social Policy*. London : Sage Publication.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. (Matheos Nalle, Penerjemah). Jakarta : Yayasan Obor
- Mkandawire, Thandika. (2004). *Social Policy in a Development Context*. New York : United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) and Palgrave Macmillan.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Narayan, Deepa. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Source book*. Washington DC : The World Bank.
- Neuman, W.L. (2000). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston : Allyn and Bacon.
- _____ (2003). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston : Allyn and Bacon.
- _____ (2006). *Social Research Methods* (6th ed). Boston : Parson International Edition.
- Patton, Michael. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park : Sage Publications.
- Prayitno, Ujianto Singgih . (2009). Tantangan dan Agenda Pembangunan Sosial: Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat. (Penyunting: Dr. Didiet Widiowati). 1999. *Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
- Skarlatos, Katt. (2004). *Microfinance and Women's Economic Empowerment: Bridging The Gap, Redesigning Future*. Wisconsin, USA : Wisconsin Coordinating On Nicaragua.
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Suharto, Edi. (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung. : Refika Aditama.
- Sukamdiyo, Ign. (1996). *Manajemen Koperasi*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Suryono, Agus. (2001). *Teori Dan Isu Pembangunan*. Malang : Universitas Negeri Malang Press

Tjokrowinoto, Moeljarto (1999). *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset

Tjondronegoro, Sediono M. P. (1997). *Diskusi Ahli: Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia* (Kata Pengantar). (Erna Ermawati Chotim dan Juni Thamrin, Editor). Bandung : Yayasan AKATIGA.

Wrihatnolo, Randi dan Dwidjowijoto, Riant. (2007). *Manajemen. Pemberdayaan*. Jakarta : Elexmedia Komputindo.

Yunus, Muhamad. (2007). *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. (Irfan Nasution, Penerjemah). Jakarta: Margin Kiri.

2. Skripsi/ Tesis

Riza, Tata Haidar. (2008). *Evaluasi Dampak Program Ikhtiar terhadap Individu Penerima Manfaat Program (Kasus Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor)*. Tesis. Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial. FISIP UI.

3. Dokumen Lembaga

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. (2007). *Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007*. Jakarta : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Badan Pusat Statistik. (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta: CV. Nario Sari.

_____. (2011). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2011*. Dalam Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2011). *Data Potensi Desa Tahun 2011*. Jakarta : BPS

Ditjen PMD. (1996). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta : PT. Penebar Swadaya.

4. Jurnal/Artikel/Makalah

Daley-Harris, Sam. (2005). *Microcredit Summit Campaign Report 2005*.

Ismawan, Bambang. (2003). Peran *Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonom Daerah*. *Journal Of Indonesian Economy and Business (JIEB)* Volume 18 Nomor 2, April 2003

Muharram, Agus. (2008). *Program CSR bagi Perempuan Pengusaha dalam Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Kesetiakawanan Sosial Nasional dan CSR di JCC, Senayan Jakarta pada tanggal 18 Desember 2008.

Sajogyo. (1977). *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Bogor : Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan (LPSP) Institut Pertanian Bogor.

Smith, Joseph A. *Financial Institutions and Rural Economic Development*. Durham: Rural Lending Conference, 2002.

Suharto, Edi (2006). *Kebijakan Sosial*. Makalah disampaikan pada Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli, Jenjang Madya, BBPPKS, Lembang 14 November 2006

5. Publikasi Elektronik

Adnan, Muhammad Akhyar. (2007). *Greemen Bank dan Bank Syariah Indonesia*. Makalah dalam :

<https://grelovejogja.wordpress.com/2007/08/14/greemen-bank-dan-bank-syariah-indonesia/>. 20 Juni 2012 pada jam 19:05 PM.

Hadi, Agus Purbathin. (2009). *Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Makalah dalam :

<http://suniscome.50webs.com/data/download/33%20Tinjauan%20Program%20Pemberdayaan.pdf>. 20 Juni 2012 pada jam 21:15 PM.

Universitas Indonesia

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. (2011). *Koperasi Simpan Pinjam Kian Strategis*. Artikel dalam http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=723:koperasi-simpan-pinjam-kian-strategis&catid=50:bind-berita&Itemid=97. 20 Juni 2012 pada jam 23:45 PM.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. (2011). *Rekapitulasi Data Koperasi Seluruh Indonesia per 31 Desember 2011*.

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=256:rekapitulasi-data-keragaan-koperasi-per-desember-2011&Itemid=93. 21 Juni 2012 pada jam 01:35 PM.

6. Peraturan dan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 1969 tentang *Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang *Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2002 – 2006*.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.

Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang *Perkoperasian*.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Tesis : **Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar, Kabupaten Bogor – Jawa Barat)**

IDENTIFIKASI UMUM INFORMAN

Nama Lengkap :

Status : 1. Kawin 2. Tidak Kawin

Pendidikan : 1. Tidak Tamat SD 2. Tamat SD
3. Tidak Tamat SMP 4. Tamat SMP
5. Tidak Tamat SMA 6. Tamat SMA
7. Tidak Diploma/Sarjana 8. Tamat
Diploma/Sarjana

Pekerjaan :

Jabatan :

Khusus Anggota Koperasi BAIK

Pekerjaan : 1. Sebelum menjadi Anggota
2. Setelah menjadi Anggota
3. Tahun masuk Anggota

Kepemilikan Rumah : 1. Sewa 2. Milik Sendiri
3. Rumah Keluarga

Luas Rumah : Meter Persegi

Status Penduduk : 1. Penduduk Asli
2. Penduduk Pendetang

Agama : 1. Islam 2. Protestan
3. Katolik 4. Budha
5. Hindu 6. Konghuchu

Daftar Pertanyaan dalam Pedoman Wawancara

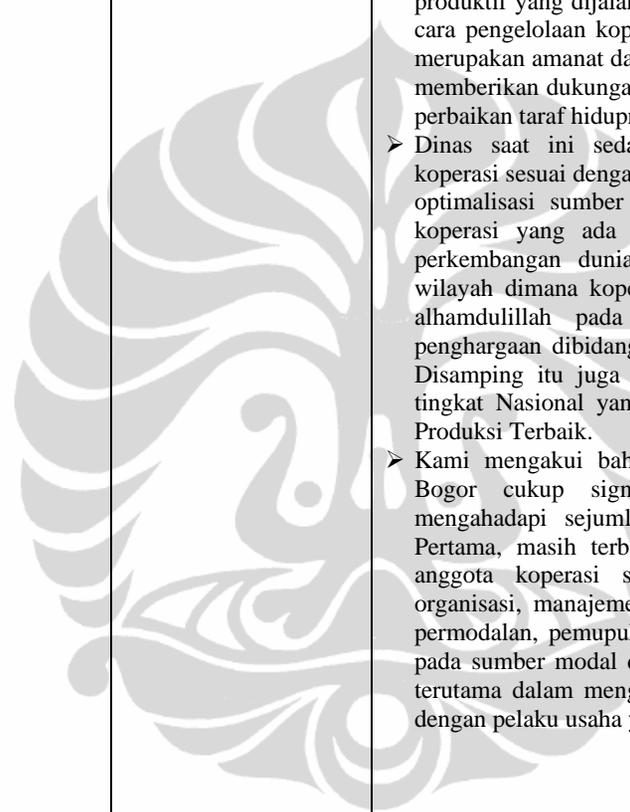
(Pertanyaan yang ada hanya garis besarnya saja. Pertanyaan yang luas dikembangkan di lapangan sesuai dengan kebutuhan)

No	Pertanyaan	Point Pertanyaan yang ditekankan	Informan
1	Bagaimana Kebijakan pemerintah daerah terhadap perkembangan Koperasi di Kabupaten Bogor?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Visi, Misi dan Tujuan Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada RPJM Kabupaten Bogor ➤ Program-program yang dilaksanakan pemerintah untuk pengembangan Koperasi dan pembiayaan mikro ➤ Strategi pengembangan Koperasi dan Pembiayaan Mikro di Kabupaten Bogor ➤ Peran pemerintah dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan Koperasi di Kabupaten Bogor 	Ketua Bidang Koperasi (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bogor)
2	Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Latar belakang & didirikannya Koperasi BAIK ➤ Jelaskan Visi, misi dan tujuan Koperasi BAIK serta Struktur organisasi Koperasi BAIK ➤ Kebijakan & Peran Pengurus Koperasi dalam pengembangan program pembiayaan mikro ➤ Perkembangan jumlah anggota dan pembiayaan yang disalurkan kepada anggota 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengurus Koperasi ➤ Pengurus Yayasan Peramu ➤ TPL
3	Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam program Pembiayaan Mikro?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tahap pemilihan wilayah sasaran ➤ Tahap persiapan sosial ➤ Tahap penerimaan anggota ➤ Tahap pelayanan pinjaman dan tabungan ➤ Tahap pertemuan rutin kelompok ➤ Tahap <i>monitoring</i> kinerja kelompok ➤ Tahap evaluasi pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengurus Koperasi ➤ TPL ➤ Ketua Kelompok
4	Bagaimana menurut Anda mengikuti program pembiayaan mikro?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Kelompok <ul style="list-style-type: none"> ➤ Latar belakang menjadi Ketua Kelompok ➤ Peran dan tugas ketua dalam kegiatan kelompok ➤ Manfaat menjadi ketua kelompok ➤ Manfaat program terhadap usaha yang dijalankan ➤ Proses kegiatan kelompok berlangsung dalam pertemuan rutin 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TPL ➤ Ketua Kelompok ➤ Anggota

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peran ketua kelompok dalam mengatasi permasalahan di tingkat kelompok <p>2. Anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Latar belakang menjadi anggota; ➤ Peran dan tugas anggota dalam kegiatan kelompok; ➤ Manfaat menjadi anggota; ➤ Manfaat program terhadap usaha yang dijalankan; ➤ Bentuk-bentuk partisipasi anggota terhadap pelaksanaan program. 	
5	Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses pelaksanaan Program?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan koperasi dan pembiayaan mikro; ➤ Kebijakan Koperasi BAIK terhadap keberlanjutan program pembiayaan mikro ➤ Peran pemerintah dalam pengembangan koperasi dan program pembiayaan mikro; ➤ Tahapan pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi BAIK 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas KUKM, Kab. Bogor ➤ Pengurus Koperasi ➤ TPL
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peran ketua dan anggota dalam kegiatan kelompok ➤ Partisipasi anggota terhadap keberlanjutan program dan kegiatan di tingkat kelompok ➤ Upaya ketua dan anggota dalam mengatasi masalah di tingkat kelompok ➤ Pendampingan TPL terhadap perkembangan kelompok dan usaha yang dijalankan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TPL ➤ Ketua Kelompok ➤ Anggota

LAMPIRAN II
TRANSKRIP WAWANCARA

Informan	Identitas Subyek	Topik	Jawaban
Aparatur Dinas KUKM Perindag Kab. Bogor	<p>Hari/Tanggal : Senin, 04 Juni 2012</p> <p>Waktu :</p> <p>Tempat : Kantor Dinas</p> <p>Metode : Wawancara Mendalam</p> <p>Nama Informan : Bapak JYA</p> <p>Instansi : Dinas KUKM Perindag Kab. Bogor</p> <p>Jabatan : Ketua Bidang Koperasi</p> <p>Pendidikan : Tamat Sarjana</p>	<p>Kebijakan pemerintah daerah terhadap perkembangan Koperasi di Kabupaten Bogor dan faktor-faktor mendukung dan menghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Visi, Misi dan Tujuan Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada RPJM Kabupaten Bogor ➢ Beberapa program yang telah dilakukan pada tahun 2011 kemarin di antaranya program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif melalui kegiatan fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah yang melibatkan 40 UKM, Kegiatan fasilitasi pendampingan bantuan sosial pupuk bagi petani di 30 koperasi, pembinaan dan pengawasan UKM berprestasi untuk di 35 koperasi, pelatihan manajemen dan kewirausahaan yang diikuti sekitar 100 UKM yang dilanjutkan dengan fasilitasi akses pembiayaan mikro bagi 100 UKM. ➢ Sejak tahun 2012, dinas kami punya program untuk pengembangan koperasi di bogor. Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, saat ini ada tiga strategi yang dilakukan, yaitu : Pertama, memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor. Arah kebijakan yang ditetapkan yaitu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan koperasi dan UKM yang mandiri dan professional. Kedua, peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi lokal dan daerah. Kemudian penguatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi program KUKM Arah kebijakan yang ditetapkan yakni memberdayakan industri kecil dan menengah yang ditekankan pada tiga hal, yaitu : peningkatan fasilitas dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah, peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan perekonomian daerah. Ketiga, peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Arah kebijakan yang ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ekspor.

- 
- | | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">➤ Peranan kami umumnya mendampingi dalam peningkatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan. Kami memfasilitasi mereka tentang pemahaman cara pengelolaan koperasi dan mendorong peningkatan usaha, peranan ini merupakan amanat dari Kementerian Koperasi yang kami laksanakan dalam memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan mereka untuk perbaikan taraf hidupnya.➤ Dinas saat ini sedang menjalankan amanah kebijakan pembangunan koperasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bogor. Kebijakan ini fokus pada optimalisasi sumber daya produktif dengan peningkatan pemberdayaan koperasi yang ada di wilayah kami dan diupayakan sejalan dengan perkembangan dunia usaha sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah dimana koperasi itu berdiri. Berkat kerja keras Pemkab. Bogor, alhamdulillah pada tahun 2011 Bapak Bupati berhasil mendapat penghargaan dibidang pengembangan perkoperasian di Kabupaten Bogor. Disamping itu juga Kabupaten Bogor dianugerahi Koperasi Berprestasi tingkat Nasional yang diraih oleh Kopti Bogor untuk kategori Koperasi Produksi Terbaik.➤ Kami mengakui bahwa meskipun pertumbuhan koperasi di Kabupaten Bogor cukup signifikan, namun dalam pengembangannya masih menghadapi sejumlah masalah yang dihadapi oleh anggota, yaitu : Pertama, masih terbatasnya kemampuan, keterampilan, wawasan SDM, anggota koperasi sehingga mengakibatkan masih lemahnya kinerja organisasi, manajemen dan usaha. Kedua, minim dan lemahnya struktur permodalan, pemupukan modal sendiri dan terbatasnya akses permodalan pada sumber modal dari luar. Ketiga, masih terbatasnya akses pemasaran terutama dalam menghadapi persaingan usaha yang berhadapan langsung dengan pelaku usaha yang punya modal besar |
|--|--|--|

Informan	Identitas Subyek	Topik	Jawaban
Pengurus Yayasan Peramu	Hari/Tanggal : Senin, 04 Juni 2012 Waktu : Tempat : Kantor Koperasi Metode : Wawancara : Kelompok Nama Informan : Bapak ASA & IMG Jabatan : Ketua & Anggota Pendidikan : Tamat Sarjana	Sejarah Pendirian Koperasi BAIK dan Kebijakan yang ditetapkan	<p>➤ Latar belakang Koperasi BAIK ini, dimana dulu masih dalam naungan Program Peramu, yaitu UPK Ikhtiar. Tahun 2008 dibentuklah UPK ini menjadi koperasi yang sudah di aktanotariskan, ini prosesnya bagaimana? Inisiasinya seperti apa, sehingga ini menjadi koperasi yang bisa dimiliki oleh anggota. Kalau demikian ini inisiatif dari siapa sebenarnya program UPK dari awal settingannya sudah seperti itu, hanya dari tahun 1999 sampai tahun 2005, itu kan tidak “greget” untuk cepat pelayana ikhtiar ini mandiri. Baru di tahun program 2006 – 2008 itu adalah masa program terakhir untuk membuat layanan ikhtiar ini menjadi mandiri. Jadi di peramu itu sebagai bagian dari perencanaan programnya, bahwa ini harus mandiri. Ya, hanya BMT lebih cepat, karena BMT dari awal pendirian itu melibatkan seluruh sumberdaya lokal, tokoh masyarakat, dan prosesnya lebih cepat. Kalau kita, BAIK ini benar-benar masyarakat kecil yang keterlibatan sumberdaya lokal ini tidak bisa langsung masuk ke dalam ke pelayanan. Orang kaya tidak bisa masuk ke pelayanan ini, namun ia hanya masuk melalui Baitul Mal dalam bentuk program zakat. Kalau teman-teman BMT itu bisa cepat masuk ke masyarakat, karena masyarakat bisa memanfaatkan produknya BMT, baik itu yang miskin maupun yang kaya. Yang kaya menabung atau deposito, uangnya dilempar ke masyarakat yang miskin, yang mereka membutuhkan pinjaman. Kalau BAIK kan tidak bisa, orang kaya tidak bisa langsung uangnya masuk ke BAIK, dimana harus melalui sebuah program, baik itu zakatnya maupun dalam bentuk modal kerja selain zakat, bekerja sama dengan lembaga dalam program yang dikhususkan bagi orang-orang kaya, yang</p>

			<p>peduli.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Di Peramu jika ada momen seperti itu, biasanya mengumpulkan seluruh aktivisnya. Misalnya di BMT, hadir para tokoh-tokohnya, dari manajer sampai ke Kabag-nya, dan memang sudah berlaku umum di peramu. Waktu itu seluruh BMT-BMT dan komunitas peramu berkumpul sepakat untuk membuat UPK Ikhtiar ini menjadi koperasi, maka diadakan rapat untuk pendirian Koperasi Baytul Ikhtiar, disitulah terjadi proses mulai dari penentuan nama yang sebelumnya dikonsep oleh tim kecil di peramu, yang dulu memang bagian kita, saya, aziz, asep, hifni, dan lain-lain sudah merumuskan program-program yang tinggal dibahas dan disepakati di Rapat Pendirian Koperasi, pada Januari 2008. Semua teman-teman berkumpul, termasuk inisiatornya peramu. Dari rapat ini memilih pengurus, kemudian orang-orang yang hadir dalam rapat ini sepakat menjadi anggota pendiri sebanyak 33 orang dan ini dimandatkan oleh peramu untuk menjadi anggota pendiri. Dari 33 orang ini, ada 5 orang yang tadinya menjadi karyawan peramu itu dimandatkan secara aklamasi duduk bersama kita ini diangkat menjadi pengurus. ➤ Visi Koperasi BAIK adalah menjadi organisasi keuangan mikro syariah yang memberdayakan masyarakat miskin melalui pelayanan simpan pinjam/pembiayaan, pendidikan, dan pengorganisasian. Visi ini dijabarkan dalam misi koperasi, yaitu : (1) Memperluas jangkauan pelayanan keuangan mikro syariah kepada masyarakat miskin. (2) Melakukan pendampingan dan pelayanan secara berkelompok yang terorganisir. (3) Membangun jaringan untuk memperkuat pelayanan dan pendampingan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Lembaga Keuangan Mikro.
--	--	--	--

Informan	Identitas Subyek	Topik	Jawaban
Pengurus Koperasi	Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Maret 2012 Waktu : 09.25-10.15 WIB Tempat : Kantor Koperasi Metode : Wawancara Mendalam Nama Informan : Bapak LTF Jabatan : Ketua Koperasi Pendidikan : Lulus SMA	a. Kebijakan & Peran Pengurus Koperasi dalam pengembangan program pembiayaan mikro b. Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam program Pembiayaan Mikro c. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses pelaksanaan Program	<p>➤ Peran pengurus, itu masuk pada teknis manajemen semuanya. Kalau teman-teman BMT, peran pengurus itu tidak masuk dalam tataran teknis, dan ini menjadi alasan mengapa teman-teman BMT tidak bisa masuk pengurus Koperasi, karena kita bekerja full time, harus masuk ke teknis. Pengurus BAIK ini pekerjaannya sama saja dengan manajemen, tidak hanya memonitoring saja, sampai membuat kebijakan. Fungsi-fungsi kepengurusan itu ada di pengawas, sebagai pengontrol. Fungsi-fungsi pengurus dan pengawas ada di pengawas, jadi pengawas juga melakukan fungsi-fungsi pengurus. Dan baru pengawas ini yang dari teman-teman perwakilan dari 3 BMT, Bu Erna KU, Pak Soleh Tbu, dan Titi dari WU. Mereka lebih pada peran monitoring dan controlling melekat pada jabatan pengawasnya. Pekerjaannya pengurus mencari dana, pengembangan, dan membentuk jaringan dan juga kita punya beban mengawal proses teknis, tetap, dalam pelaksanaan program kami lakukan melalui pendampingan supaya yang mengurus simpan-pinjam di kelompok. Walau kami udah jadi Koperasi, nilai dan semangat dampingi anggota sudah jadi ruh nya yang kami peroleh dari Peramu sejak program ini dimulai tahun 1999. 5 orang pengurus ini keahliannya berbeda-beda, Pak aziz dan Hifni orang lapangan, yang memiliki fungsi kontrol manajemen lapangan. Bu titin sebagai bendahara lebih pada manajerial operasional harian, Asep membantu bu titin dan spesifikasinya IT, kalau menurut saya ini merupakan tim yang solid dan sudah cocok. Saya dan bu</p>

titin di manajemen usahanya, dibantu asep memonitoring lewat IT, lapangannya aziz dan hifni. Kalaupun saya tahu tentang lapangan tidak setajam dengan hifni dan aziz, sementara mereka lemah di masalah manajemen, terutama manajemen keuangan, yang ini saling mengisi.

- Untuk menjamin keberlangsungan manfaat Koperasi kepada anggotanya, maka pengurus Koperasi BAIK menyusun kebijakan dalam membangun suatu kelembagaan ekonomi yang mengutamakan partisipasi aktif anggotanya. Strategi pengembang Koperasi BAIK, yaitu : (1) Mampu menjangkau lebih banyak orang miskin pada skala bisnis yang berkelanjutan secara finansial. (2) Pelayanan dapat diakses oleh usaha mikro dan IRT dari keluarga miskin. Proses pelayanan membuka ruang untuk proses pembelajaran, sehingga wawasan mereka lebih terbuka dan mampu melakukan perubahan dalam menghadapi persoalan-persoalan mereka. (3) Memadukan atau mengintegrasikan pemberdayaan melalui pendampingan masyarakat dan URT syariah kepada para IRT (4) Pendayagunaan sumber dana dari BM membuka peluang partisipasi sumber-sumber dana lain dari swasta dan pemerintah, baik dalam bentuk investasi maupun hibah.
- Kita juga tidak menafikkan bahwa kita bisa dikenal dan membangun jejaring karena peran teman-teman di koperasi lain, pemerintah, dan juga dari perguruan tinggi yang melakukan studi disini, menceritakan ke orang lain. Adanya beberapa perbankan syariah yang bekerja sama dengan kita berkat mereka, sehingga

Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Maret 2012
Waktu : 09.25-10.15 WIB
Hari/Tanggal : Selasa, 10 April 2012
Waktu : 11.10-12.05 WIB
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2012

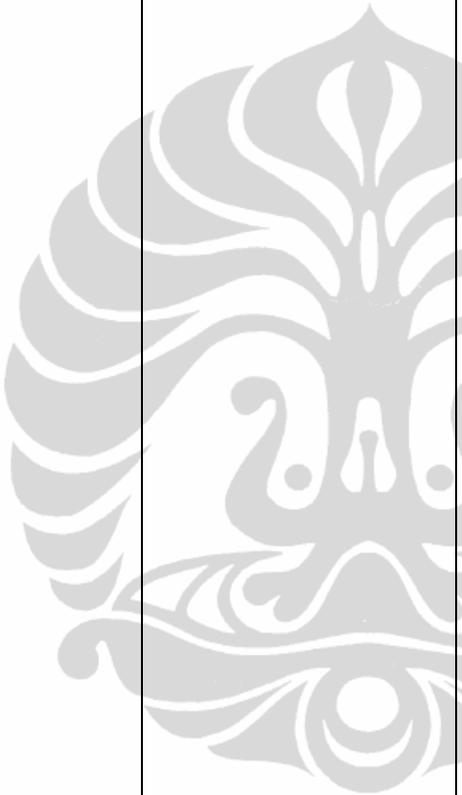
membuat kalangan tertarik dan bekerja sama dengan kita. Jadi semuanya kami jadikan sumberdaya untuk membangun sebuah jaringan bagi kepentingan koperasi BAIK. Karena keterlibatan mereka bisa mendorong program kami, seperti BMI, BSM, Sinar Mas, dan sebagainya. Akibat kebijakan mengikutkan lembaga perbankan berinvestasi di dalam program, dampaknya luar biasa. Sebelum kami mengikutsertakan mereka margin yang kita tetapkan maksimal hanya 10% sekarang menjadi 24%, pernah ada yang bilang begini : pinjaman Rp. 500.000 dengan margin 10% menjadi Rp. 550.000,- dimana angsuran hanya Rp. 11.000,-/minggu (angsuran Rp, 10.000,- ditambah margin Rp.1000,-). Nah sekarang menjadi Rp. 12.500,-/minggu, kan yang dilihat rupiahnya, bukan persentasinya (itu masyarakat), kalau mereka itu berapa rupiah. Itu adalah perjuangan bagi kita bagaimana memberikan pemahaman kepada anggota tentang perubahan tadi. Kita menaikkan margin “menjerit” anggota, ini menjadi pertempuran yang sangat besar, karena merubah margin dari 10% ke 24 % itu hal yang drastis, akibatnya banyak anggota yang keluar. Salah satu alasan anggota keluar akibat kebijakan itu. Akibat kebijakan itu, sekitar 800 orang yang keluar, dari 800 orang itu salah satunya disebabkan banyak mempertanyakan angsuran sekarang mahal.

- Kegiatan pemilihan wilayah sasaran program merupakan tahapan awal untuk mengetahui kondisi kemiskinan pada wilayah tersebut. Agar memperoleh data yang akurat, tugas Tenaga Pendamping berbaur dengan masyarakat dan melihat sendiri aktivitas

Waktu : 08.15-08.55 WIB
 Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Mei 2012
 Waktu : 08.45-09.05 WIB
 Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Mei 2012
 Waktu : 08.45-09.05 WIB
 Tempat : Kantor Koperasi
 Metode : Wawancara Mendalam
 Nama Informan : Bapak AMA
 Jabatan : Pengurus Koperasi
 Pendidikan : Lulus SMA

keseharian masyarakat, karena disitulah akan terlihat jelas kondisi nyata kemiskinan masyarakat, kemudian baru mencocokkan dengan data profil desa dari kantor desa, sehingga data dan informasi tersebut bisa menjadi justifikasi pelaksanaan program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. Proses ini butuh kerja keras buat semua TPL, siapapun dia sebab Pendidikan formal gak jamin orang bisa kerja keras sebagai TPL, disini banyak yang udah ikut seleksi masuk, diterima dan ikut proses pelatihan 3 bulan. Baru berapa hari kerja, dia uda mengundurkan diri. Tapi ada juga TPL yang pendidikannya cuma sampe SMP, dia bisa kerja keras dengan mengandalkan catatan harian yang dia catat setiap pertemuan terus diterapin di lapangan

- Rapat komite UK sangat penting yang didalamnya membahas data-data hasil UK. Laporan data calon anggota akan diverivikasi secara rinci dan sangat berpengaruh pada proses penerimaan yang bertujuan agar program ini tepat sasaran. Lanjut kata pengurus, Dari pembahasan data 20 orang calon anggota ini, semuanya tidak ada data yang ganjil yang menimbulkan bias data. Dilihat dari laporan Tenaga Pendamping, semua calon anggota adalah kaum perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka membantu usaha suami yang tidak menentu penghasilannya, seperti tukang ojek, buruh sepatu dan sandal, buruh bangunan, dan kerajinan (pintu, lemari, meja, dan kursi). Sebagian calon anggota tersebut ada membuka usaha sampingan, yaitu : warung..... Lanjutnya, Hasil rapat komite UK memutuskan 20 orang calon anggota ini layak

- 
- mengikuti program yang dilaksanakan Koperasi BAIK.
- Pinjaman, angsuran, tabungan, dan kehadiran hanya sebagai instrumen saja pelaksanaan program ini. Yang dijadikan fokus program oleh Koperasi BAIK yaitu peningkatan kapasitas sosial ekonomi rumah tangga anggota, dengan pola seperti ini kami berupaya mereka menjadi lebih sejahtera, dan jika ada anggota yang tidak sejalan dengan pendekatan program kami keputusan untuk berhenti kembali pada dirinya sendiri.
 - Kegiatan harian dilakukan setiap sore sebelum jam kerja berakhir, kegiatan mingguan setiap hari jum'at (minggu II – IV) yang dihadiri oleh seluruh Pengurus, Supervisi, dan TPL di semua wilayah pelayanan, sedangkan kegiatan bulanan dilakukan setiap hari jum'at (Minggu I) yang pesertanya sama dengan kegiatan mingguan. Agenda yang dibahas dalam tiap kegiatan berbeda-beda, kegiatan harian membahas beberapa laporan teknis yang diutarakan oleh TPL dalam satu hari kerja, kegiatan mingguan membahas beberapa laporan oleh seluruh Supervisi dan TPL terkait proses pendampingan selama satu minggu, sedangkan kegiatan bulanan fokus pada laporan dan proyeksi pelayanan, seperti laporan keuangan, kegiatan sosial (misal : sunatan massal, kurban, sembako), dan perkembangan kelompok. Ini demi menjaga kinerja jangan sampe ada yg gag bisa dipertanggung kawabkan. Makanya, demi menjaga nama baik di anggota layanan kami semua punya aturan jelas utuk ngatur uang mereka, seperti kemaren ada yang kita keluarin karena ya gitu, ada uang tabungan anggota gak ngikutin aturan.
 - Kegiatan lokakarya diadakan setiap tahun, tujuannya

		<p>taitu mengevaluasi seluruh aktivitas pemberdayaan masyarakat dan mencoba merumuskan perencanaan ke depan untuk menghasilkan rumusan program tahunan yang diterjemahkan menjadi rencana kegiatan dan anggaran tahunan (annual working plan & budget), serta proyeksi finansial. Semua anggota yang diwakili oleh ketua kelompoknya hadir dalam lokakarya ini, termasuk pengurus, supervisor, dan TPL berpartisipasi memikirkan koperasi ke depan, karena merekalah pemilik koperasi BAIK.</p> <p>➤ Kedisiplinan anggota dalam kehadiran pertemuan rutin, menabung, dan membayar angsuran merupakan proses yang perlu dijalankan anggota dan menjadi salah satu pelaksanaan kebijakan lembaga kita. Tidak ada kebijakan yang memperbolehkan anggota yang menabung dan membayar angsuran namun tidak hadir dalam pertemuan, semua proses pelayanan dilakukan di tingkat pertemuan majelis yang dihadiri oleh anggota.</p>
<p>Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2012 Waktu : 08.45-09.05 WIB Tempat : Kantor Koperasi Metode : Wawancara Mendalam Nama Informan : Ibu TTN Jabatan : Pengurus Koperasi Pendidikan : Lulus Sarjana</p>		

Informan	Identitas Subyek	Topik	Jawaban
Tenaga Pendamping	Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Maret 2012	<p>a. Perkembangan jumlah anggota dan pembiayaan yang disalurkan kepada anggota</p> <p>b. Proses Pemberdayaan</p>	<p>➤ Perkembangan pelayanan Koperasi BAIK tidak dilepaskan dari pelaksanaan program Ikhtiar tahun 1999 – 2008. Program yang dirancang untuk memberikan akses permodalan melalui pelayanan simpan pinjam kepada IRT miskin di desa, berdampak pada peningkatan jumlah anggota, penyaluran pinjaman, dan tabungan anggota Perkembangan pelayanan Koperasi BAIK mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari sisi jumlah anggota,</p>
	Waktu : 09.25-10.15 WIB		
	Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2012		
	Waktu : 09.25-10.15 WIB		
	Hari/Tanggal : Rabu, 23 Mei 2012		
	Waktu : 14.15-14.45 WIB		
	Tempat : Kantor Unit		
Metode : Wawancara Kelompok			

	<p>Nama Informan : Bapak KMR & IMM</p> <p>Jabatan : Tenaga Pendamping</p> <p>Pendidikan : Lulus SMA</p>	<p>Masyarakat dalam program Pembiayaan Mikro</p> <p>c. Faktor penghambat dan pendukung Peran Pendamping terhadap perkembangan kelompok dan usaha yang dijalankan</p>	<p>tabungan, dan pembiayaan. Pada tahun 2010, dana yang digulirkan kepada anggota lebih dari Rp. 6 miliar dengan jumlah tabungan sekarela Rp. 600 juta, diiringi dengan peningkatan jumlah anggota sebanyak 6.888 orang (480 majelis)</p> <p>➤ Dalam pertemuan majelis baru, ada 2 (dua) anggota yang mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000. Tenaga Pendamping yang mendampingi majelis mulai memfasilitasi kebutuhan dan pemaanfaatan dana pinjaman tersebut melalui analisa usaha. Dua anggota yang memiliki usaha sebagai pedagang Gorengan dan Nasi Uduk ini mengikuti arahan dari Tenaga Pendamping, dan menulisakannya di kertas Plano, dan hasilnya dipaparkan di hadapan para anggota majelis. Pemaparan dari anggota tesebut memperoleh tanggapan dari anggota lainnya, jika tidak sesuai maka dilakukan perubahan dalam analisa usaha tersebut, begitu yang dilakukan dalam setiap pencairan pinjaman.</p> <p>➤ Biasanya peran pendampingan yang dilakukan oleh TPL menghadapi masalah pembayaran anggota yang macet. Di sini peran TPL sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi persoalan tersebut. Jika TPL kurang berpengalaman, mereka sharing dengan teman2 TPL lain dan supervisor, dengan anggota juga, pendampingan, dimana fokusnya berjalan dengan teman-teman TPL. Tapi harus didukung. Atau ada juga mungkin, biasanya mereka menemui problem atau masalah di lapangan yang mereka tidak bisa mengatasi, itu kita musyawarahkan, lebih memfasilitasi untuk mereka. Dimana mereka juga</p>
--	---	--	--

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2012
Waktu : 14.15-15.15 WIB
Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2012
Waktu : 13.10-13.36 WIB
Tempat : Kantor Unit
Metode : Wawancara Mendalam
Nama : Bapak MSS
Informan :
Jabatan : Tenaga Pendamping
Pendidikan : Lulus SMP

sering mengadu ada masalah seperti ini, dan solusi seperti ini. Jika di lain waktu ada masalah yang sama, mereka bisa menyelesaikannya sendiri.

- Di desa kami selalu menegur/menyapa warga desa ketika kami lewat dihadapan mereka, biasanya dengan kata-kata : punteun (permisi) saja, dan kebanyakan kami menemui mereka ketika sedang berkumpul dan mengajak mereka untuk : kongko-kongko (ngobrol bareng). Bahasa sunda menjadi pembuka komunikasi di antara kami, sebab warga desa akan merasa percaya diri jika diajak komunikasi dengan bahasanya. Pertanyaan yang sering ditanya oleh mereka biasanya : bade' nuju naon ka dieu? bade' aya bantuan nyak? Ieu' nembe pendataan lain? (apa tujuannya datang ke sini? Apa mau ada bantuan ya? Lagi pendataan bukan?). Terus terang kami jika ditanya seperti itu agak hati-hati menjawabnya, karena kami menghindari memberikan janji-janji kepada warga. Supaya kami diterima dengan baik, kami menjawabnya dengan jelas tujuan kami dan menjelaskan prosesnya kepada mereka.
- Desa Sukaluyu terletak di wilayah dataran tinggi yang lokasinya di sebelah selatan Kota Bogor. Sama dengan desa-desa di kecamatan Tamasari, penduduk desa ini mayoritas bekerja pada sektor pertanian (petani dan buruh tani). Lahan-lahan pertanian kebanyakan sudah tidak dimiliki penduduk, karena banyak yang dijual ke "orang jakarta." Akhirnya sebagian penduduk beralih ke sektor jasa (ojek), industri kecil (sepatu, sandal, kerajinan), dan banyak pula yang membuka usaha

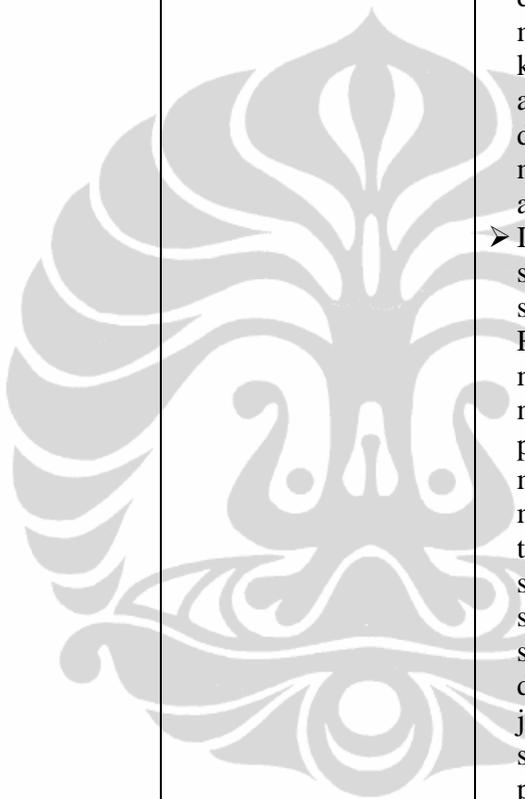


warung. Pemukiman di desa ini terkelompok yang terbagi ke dalam kampung-kampung, setiap kampung dibatasi oleh lahan pertanian, sungai, maupun tebing yang ditempuh melauai jalan setapak. Pemukiman di setiap kampung tampak padat, dimana setiap rumah saling berdempet-dempetan dan tidak teratur. Fasilitas umum setiap kampung hanya ada musholla, sedangkan masjid, sekolah, dan Puskesmas ada di dekat kantor desa, sehingga warga di setiap kampung jika ingin sholat jum'at, sekolah, ke posyandu perlu jalan ke fasilitas umum tersebut, dengan jarak yang berbeda-beda dari setiap kampung. Minimnya sarana infrastruktur desa (terutama jalan dan sekolah) membuat banyak warga yang mengurungkan niat anak-anaknya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SMP, SMP, dan Perguruan Tinggi) dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Lokasi sekolah SMP dan SMA jauh dan ada di dekat kecamatan sehingga membutuhkan biaya transportasi yang relatif tinggi, apalagi biaya untuk kuliah. Roda perekonomian di desa sangat dipengaruhi oleh pasar dan bergantung pada “tengkulak,” jika sedang tinggi mereka untung, jika harga rendah mereka rugi. Tidak sedikit penduduk yang berhutang modal dengan tengkulak untuk usahanya, namun bunga yang ditetapkan mencapai 30-50 persen. Karena tidak ingin terbelit utang penduduk di desa ini membuka usaha sampingan, yaitu “warung jajanan” untuk mempertahankan ekonomi rumah tangganya, namun kendalanya di permodalan. Kondisi ini menggambarkan kehidupan masyarakat desa dalam

Hari/Tanggal : Rabu, 04 April 2012
Waktu : 14.15-15.15 WIB
Tempat : Kantor Unit
Metode : Wawancara Mendalam
Nama Informan : Bapak DNI
Jabatan : Tenaga Pendamping
Pendidikan : Lulus SMA

serba keterbatasan, yaitu : akses pendidikan, infrastruktur, pengembangan usaha, permodalan. Pemerintah desa juga belum bisa mengatasi persoalan desanya, sebab dalam prakteknya bergantung dari program bantuan pemerintah saja.

- LWK ini sebagai pintu masuk bagi calon anggota menjadi anggota Koperasi BAIK, sehingga ibu-ibu diwajibkan mengikuti pelatihan ini dengan baik yang manfaatnya untuk melatih kekompakan anggota. Ibu-ibu akan diberikan materi tentang Koperasi dan Akad Pembiayaan supaya ibu-ibu mengerti dan memahami pelaksanaannya nanti...
- Kami menemui kesulitan di wilayah ini karena ada perselisihan pendapat dari tokoh masyarakat di desa. Menurut kami, pemikiran tokoh agama di desa ini masih terlihat kolot, dalam kegiatan keagamaan di musholla tidak boleh menggunakan alat pengeras suara (speaker), baik sholat maupun pengajian ibu-ibu. Pengaruh tokoh masyarakat ini bahkan sampai urusan pendidikan yang melarang masyarakat tidak boleh sekolah di sekolah SD, SMP, atau SMA, namun hanya diperbolehkan sekolah di pesantren. Jangankan program yang ingin kami jalankan, pendataan yang dilakukan oleh RT/RW untuk mengidentifikasi masyarakat miskin yang akan diberikan bantuan oleh pemerintah (subsidi BBM dan Askeskin) mendapat pertentangan dari tokoh agama, seringkali program pemerintah desa tanpa melibatkan tokoh agama, padahal masyarakat sebenarnya ingin hidupnya maju, namun masih ada saja yang masih patuh dengan tokoh



Hari/Tanggal : Selasa, 15 Mei 2012

agama. Untuk program koperasi jelas memperoleh dukungan dari pemerintah desa, namun belum memperoleh dukungan dari tokoh agama. Walau kondisinya demikian, bersama masyarakat (ibu-ibu anggota pengajian) kami melaksanakan program ini dikarenakan kebutuhan masyarakat sendiri untuk mempertahankan ekonomi keluarga, meski tokoh agama di desa ini tidak menyetujuinya.

- Ibu Winah dan Mimi adalah saudara sekandung yang sudah tidak memiliki orang tua, mereka tinggal dalam satu rumah yang terbuat dari kayu dan atap rumbia. Rumahnya tidak ada pelayanan listrik, hanya menggunakan lampu tempel yang dihidupkan setiap malam hari saja. Suami ibu Winah sebagai petani penggarap, ia tidak bertani lagi karena kekurangan modal untuk menanam sayur-sayuran, sedangkan mereka memiliki 8 anak yang masih dalam tanggungannya. Ibu Mimi memiliki 1 orang anak, suaminya membuka usaha produksi sepatu. Saat ini sedang menganggur karena permintaan sepatu sedang sepi. Kebutuhan pengeluaran harian rumah tangga dalam satu rumah sekitar Rp. 40.000 untuk makan dan jajan anak, mereka tidak memiliki usaha sampingan seperti warung, biasanya kalau tidak ada uang mereka pinjam dulu ke tetangga atau “tengkulak” yang sering berbisnis dengan suaminya, namun menurutnya itu cukup memberatkan dalam membayarnya. Mereka memiliki sepeda motor yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga.
- bu Soraya dari Kelompok Gunung Agung terkena

Waktu : 08.40-09.15 WIB
Tempat : Kantor Koperasi
Metode : Wawancara Kelompok
Nama Informan : ICM, RNO, NNU
Jabatan : Tenaga Pendamping
Pendidikan : Lulus SMA

musibah, rumahnya hancur karena bencana longsor, beliau menelpon saya menanyakan peluang memperoleh bantuan karena kena bencana. Ibu Soraya memiliki peluang memperoleh bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 2 jt, namun kabar itu masih belum pasti, menurut saya ini perlu ditindaklanjuti oleh kita dan kelompoknya supaya dia bisa kembali aktif di pertemuan kelompok.

- Ibu Ati dari Kelompok Toge, 3 bulan ini sudah tidak hadir, kerena alasan malu tidak bisa mengangsur, pengeluaran rumah tangganya cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan pekerjaan suaminya tidak menentu. Tabungan kelompok sudah tidak ada lagi, karena sudah banyak dikeluarkan untuk membantu angsuran Ibu Ati, pernah saya datang ke rumahnya untuk mengajak ke pertemuan, di hadir namun minggu depan ia tidak hadir.
- Ibu Neni dari Kelompok Cihurang tidak hadir. Ia tidak memiliki uang untuk mengangsur, suaminya sedang dalam kesulitan ekonomi, pekerjaannya sebagai tukang ojeg penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tabungan kelompok dikeluarkan untuk membayar angsurannya, ditambah dana dari hasil penggalangan dari anggota yang lain. Rencananya, ketika angsurannya sudah lunas, ia memutuskan untuk keluar, karena ia sudah tidak mampu membuka usaha menopang ekonomi keluarga.
- Untuk RNO, coba didalami kembali informasi dari pemerintah terkait peluang Ibu Soraya memperoleh bantuan Rp. 20 Jt, termasuk juga prosedur untuk

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Mei 2012
Waktu : 08.40-09.15 WIB
Tempat : Kantor Koperasi
Metode : Wawancara Mendalam
Nama : YSN
Informan :
Jabatan : Tenaga Pendamping
Pendidikan : Lulus SMP

memperoleh bantuan tersebut. Kemudian sampaikan di tingkat Kelompok Gunung Agung, dari informasi tersebut apa yang bisa dibantu untuk Ibu Soraya, penyelesaian ada tingkat kelompok kita hanya sekedar membantu mengarahkan anggota untuk memperkuat solidaritas.

- Untuk ICM dan NNU, coba ditawarkan kepada kelompoknya apakah bersedia pertemuan mingguan diadakan di rumah Ibu Ati dan Neni. Dalam kehidupan ekonomi yang sulit, kita mencoba untuk memotivasi kedua keluarga tersebut, minimal memberikan perhatian pada masalah yang dihadapinya melalui silaturahmi. Dengan begitu, kita memberikan proses belajar bukan hanya dari membantu lewat tabungan anggota atau galangan dana, namun perhatian kelompok kepada yang terkena musibah melalui pertemuan mingguan dirumahnya.
- “Ya... saya sih ngerti kalau Bu Aci ingin mundur soalnya dia harus nombokin terus angsuran anggota majlisnya padahal usaha suaminya lagi sepi. Saya berusaha menjelaskan masalah ini ke manajer wilayah, ya... supaya gimana, ada kebijakan gitu..., soalnya sayang, sebelumnya Bu Aci anggota majlis yang rajin, nggak pernah ada masalah. Saya nggak mau majlis ini bubar.
- “Dulu ada anggota majelis saya yang tadinya keukeuh (keras) pengen keluar. Nah pas ada keluarganya yang meninggal, saya datangi ke rumahnya, sebenarnya niat saya ikhlas gak ada tujuan apa-apa, bener. Nah si ibu itu teh jadi gimana ya... asa diaku cenah (merasa

diakui keberadaannya). Akhirnya si ibu itu jadi termotivasi lagi, katanya saya gak mau keluar, saya ingin terus bergabung dengan Koperasi BAIK. Sebenarnya sih saya hanya berusaha menempatkan diri saya itu tidak hanya sebagai petugas tapi juga teman buat ibu-ibu.

- “Untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan ibu-ibu anggota majlis saya memperbanyak silaturahmi aja. Saya selalu menanyakan kondisi kesehatan mereka, bagaimana perkembangan usahanya. Kalau ada yang harus dibicarakan atau diketahui lebih jauh, ya.... saya datang rumahnyanya. Sekarang sih itu lebih giat dilakukan. Nah di sana saya tidak sekedar melihat kondisi rumahnyanya kayak gimana tapi juga menanyakan kondisi anak-anaknya, sekolahnyanya gimana...”
- Ya saya berterima kasih kepada petugas dari Koperasi yang sudah mengajak saya dan ibu-ibu yang lain di kampung ini sehingga menjadi anggota Koperasi BAIK.
- Banyaknya majelis yang bermasalah disebabkan oleh oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari masalah yang dihadapi oleh anggota, yang biasanya terkait dengan kehidupan rumah tangga yang terkena musibah (bencana, kesulitan ekonomi, perceraian, dan di tinggal wafat oleh suami) sehingga membuat kedisiplinan anggota jadi berkurang. Sedangkan dari faktor eksternal berasal dari kemampuan TPL untuk mendampingi anggota dalam memotivasi anggota. Kemampuan ini sangat

			<p>diperlukan untuk menjaga keaktifan anggota hadir dalam setiap pertemuan majelis.</p> <p>➤ Setiap hari dari senin sampai kamis saya bertugas sebagai TPL di desa Sukaluyu, saya berangkat dari rumah jam 7.15 wib, terus sampe kantor unit biasanya jam 8 kurang, habis itu menyiapkan administrasi harian untuk kelompok, mulai dari absensi, formulir tabungan, angsuran, dll gitu deh, hehhe... Kira-kira jam 9-an saya baru mulai datang ke majelis-majelis, yah tiap hari paling banyak 7 lah, biasanya sih bisa selesai sampe jam 2-an siang, kalau udah beres kita semua kumpul di kantor sambil mencatat semua transaksi keuangan harian, kalau gak sempet yah dikerjain di rumah,, hehehe... abis banyak juga tugas2 harian kita, trus jam 4-5 sore kita ada briefing sama temen2, ya bahas masalah2 kelompok gitu... biasanya kita sharing aja masalahnya apa dan solusinya gimana... makanya kita mah belajar dari pengalaman temen2 yang udah pernah ngadepin duluan gimana nyelesaiin masalah... hehehe...</p>
--	--	--	---

Informan	Identitas Subyek	Topik	Jawaban
Ketua Kelompok	<p>Hari/Tanggal : Senin, 28 Mei 2012</p> <p>Waktu : 10.35 - 11.07 WIB</p> <p>Tempat : Rumah MMH</p> <p>Metode : Wawancara Mendalam</p> <p>Nama Informan : MMH</p>	<p>a. Pendapat Mengikuti Program Pembiayaan Mikro</p> <p>b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Program</p>	<p>➤ Ke Koperasi aja, nggak pernah sama yang lain. Itu juga di pasar suka banyak yang nawarin pinjaman ke saya sampai satu juta dua juta mah bisa tapi saya nggak mau soalnya bunganya tinggi terus bayarnya juga harus harian, jadi berat.</p> <p>➤ Kalau yang dari Baytul Maal, saya aja, kan sekarang mah kalau pinjam ke Baytul Maal uangnya untuk modal usaha saya jadi yang make ya saya. Saya tinggal bilang</p>

Jabatan : Ketua
Pendidikan : Tamat SD

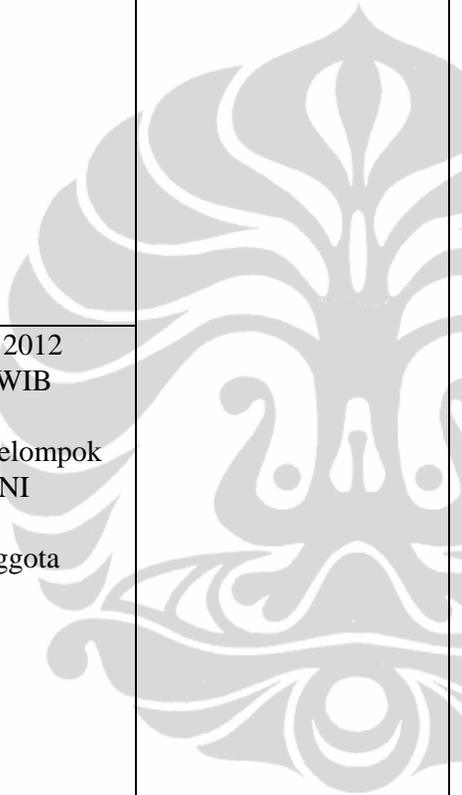
c. Faktor pendukung dan Penghambat selama mengikuti Program

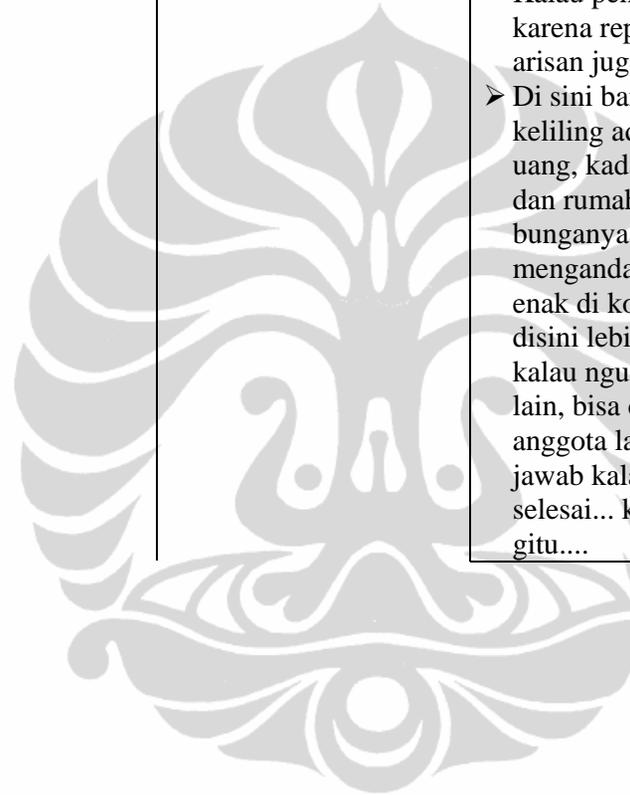
- ke bapaknya uang dipake modal gitu aja.
- Ya kan pinjaman dari Baytul Maal saya gunakan untuk nambah modal saya jualan. Ada juga sihyang buat makan tapi nggak banyak. Dengan tambahan modal itu saya bisa beli barang dari orang lain dulu atau saya tuker-tukeran barang dengan sesama pemasok terus saya bawa ke Bos. Sekarang usaha saya lumayanlah. Nggak lagi disuhun saya sekarang sudah punya Bos langganan.
 - Sekarang tambah dengan ikut Majelis Baytul Maal. Kalau ikut Baytul Maal alasannya agar bisa pinjam karena saya bener-bener butuh modal. supaya saha saya bisa berkembang.
 - Sekarang saya ya lumayanlah agak berani kalau bicara mah. Bukan hanya di majlis, di acara halal bihal juga saya berani. Awalnya saya memang gemetar. tapi setelah itu nggak. Kata saya, Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Pak RW, Pak RT dan hadir semua mari kita mulai acara ini dengan membaca Bismillah. Kepada Pak Lurah silahkan ke depan untuk memberikan sambutannya. Begitu saja tidak banyak kata-kata...kata ibu-ibu siapa itu yang menjadi MCnya...he...he...he...
 - Atuh kalau di majlis, saya kan sekarang jadi ketua majlis, kalau ketua majlis setiap pertemuan kan harus membuka pertemuan, membaca ikrar dan menutup pertemuan. Terus kalau mau pinjam harus bicara di depan anggota majlis yang lain.
 - Ya sama suami juga. Tapi sekarang mah kalau kepepet-kepepet banget, mah saya suka bicara sama TPL atau di majlis juga kan saya suka cerita keadaan saya. Kalau mau pinjam suka disuruh cerita keadaan di rumah

Hari/Tanggal	: Senin, 28 Mei 2012
Waktu	: 10.45 - 11.07 WIB
Tempat	: Rumah MMH
Metode	: Wawancara Kelompok
Nama	MMH & YYN
Informan	:
Jabatan	: Ketua & Anggota
Pendidikan	: Tamat SD

tangga.

- Ke Koperasi say akrifnya aja, nggak pernah sama yang lain. Itu juga di pasar suka banyak yang nawarin pinjaman ke saya sampai satu juta dua juta mah bisa tapi saya nggak mau soalnya bunganya tinggi terus bayarnya juga harus harian, jadi berat.
- Kalau sekarang alhamdulillah ada juga Koperasi. Kalau dengan Koperasi bisa pinjam bayarnya seminggu sekali, sering juga sih. Soalnya ke kan kita bisa pinjam uang. Kalau dulu saya kalau perlu uang saya nunggu hasil arisan saja atau kalau bener-bener perlu banget ya pinjam ke saudara nanti bayarnya pake uang arisan itu.
- Ya anggota kalau dapat tambahan modal buat dagang keuntungannya jadi tambah besar kalau begitu berarti kan uang belanja bertambah banyak yang bagus leluasa ngatur-ngaturnya, tapi banyak juga yang gunainnya bukan buat dagang.
- Makin ke sini saya mimpin kelompok memang terasa berat, Sekarang cicilannya naik dan terasa berat, udah gitu gak bisa minta penundaan sama koperasi, setiap minggu semua anggota wajib bayar angsuran dan tabungan kelompok. Kan gini ada anggota saya yang tidak bisa bayar cicilan, terus tetap harus bayar, sedangkan uang kelompok udah habis buat nalangin, sampe-sampe sama saya ditalangin dulu gitu
- Kalau boleh jujur mah, banyak ibu-ibu anggota disini ingin pinjam uang lagi lebih gede jumlahnya tapi nanti takut gak kuat bayarnya..... klu ibu-ibu punya yang punya usaha kan enak, bisa punya uang buat ngangsur,

			<p>kalo yang gak punya atuh kumaha....? ngandelken suami atuh uangnya cukup buat makan, kalau saya sudah nggak bisa kerja apa-apa. Buat makan saja susah. Enteu kumaha atuh, arek punya warung encan tercapai iyeu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Arisan dan pengajian masih ikut, terus ikut Koperasi juga. Saya dulu diajak sama petugasnya. Ditawarin pinjaman tapi syaratnya harus membuat kelompok. Terus saya bareng dengan ibu-ibu di sini membuat kelompok, waktu itu semuanya ada 15 orang, sekarang tinggal 12 orang. Tiga orang sudah keluar....usaha suaminya lagi sepi katanya.
	<p>Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2012 Waktu : 14.23 - 15.41 WIB Tempat : Kantor Dinas Metode : Wawancara Kelompok Nama : WRI, ENH, YNI Informan : Jabatan : Ketua dan Anggota Pendidikan : Tamat SD</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Setelah ikut Koperasi saya sampaikan terima kasih ke TPLnya. Kalau di Koperasi kan saya sudah kenal dengan TPLnya jadi enaklah kalau saya ada usul ya tinggal disampaikan saja nggak seperti di pengajian meskipun namanya kelompok juga.....saya menjadi ketua ketua dari awal sampai sekarang nggak tahu kenapa....mungkin karena yang lain pada nggak mau kali ya...sebagai ketua ya saya tiap pertemuan harus membuka pertemuan, memimpin ibu-ibu yang lain membaca ikrar anggota terus kalau sudah selesai menutup acara. Awalnya saya grogi tapi sekarang mah nggak, udah biasa ➤ Alhamdulillah ikut jadi anggota enak, bayarnya bisa dicicil terus kelompok selalu kompak kalau ada masalah... seperti bayar uang iuran aja, terus usaha keluarga juga bisa lumayan hasilnya... usaha keluarga saya berkembang. Bayar angsuran juga lancar... kalau ada lebihnya bisa nabung, alhamdulillah di koperasi uangnya aman.

- 
- Sekarang juga sama, saya cuma ikut Koperasi saja. Kalau pengajian masih jalan tapi arisan sudah berhenti karena repot kalau setor harus ke Baytul Maal juga ke arisan juga. Maksudnya repot uangnya he..he.
 - Di sini banyak yang nawarin pinjaman.... ada dari bank keliling ada juga dari orang-orang yang suka minjem uang, kadang-kadang mereka suka datang ke warung dan rumah-rumah, kalau saya nggak mau sebab bunganya kan tinggi. Udah gitu, saya hanya mengandalkan dari keuntungan warung aja, jadi lebih enak di koperasi atuh kalau gitu. Ibu-ibu anggota ikut disini lebih enak daripada di rumah melamun jadi stres kalau ngumpul-ngumpul kan bisa bercanda dengan yang lain, bisa curhat gitu, ada masalah kita obrolin sama anggota lain. Ketua kelompok mah punya tanggung jawab kalau anggotanya ada masalah masalahnya selesai... kalau selesai mah, kelompok kita mah bagus gitu....